



Building The Foundation For

ACCELERATED GROWTH

DAFTAR ISI

- 2. IKHTISAR KEUANGAN
- 4. LAPORAN DEWAN KOMISARIS
- 8. LAPORAN DIREKSI
- 12. PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
- 14. KEJADIAN PENTING 2009
- 22. PROFIL PERUSAHAAN
- 35. ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
- 47. TATA KELOLA PERUSAHAAN
- 78. JARINGAN DAN ALAMAT
- 80. TANGGUNG JAWAB PELAPORAN
- 81. LAPORAN KEUANGAN



PERESMIAN TIGA PROYEK
ADHI (TERMINAL 3 BANDARA
SOEKARNO-HATTA, JEMBATAN
SURAMADU, JALAN TOL KANCI-
PEJAGAN) OLEH BAPAK PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA, SOESILO
BAMBANG YUDHOYONO

Membangun Landasan untuk PERCEPATAN PERTUMBUHAN

Tahun 2009 membawa tantangan yang tidak kecil bagi perekonomian dunia termasuk perekonomian Nasional yang mencatat tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang lebih rendah daripada pertumbuhan PDB tahun sebelumnya. Namun bagi beberapa sektor industri, termasuk sektor industri konstruksi dan infrastruktur, tahun 2009 juga menawarkan peluang pertumbuhan yang tidak kecil pula.

Selaku pelaku usaha terkemuka di bidang jasa konstruksi, rekayasa serta investasi infrastruktur, ADHI berhasil memanfaatkan peluang usaha di tahun 2009 tersebut untuk membangun landasan kokoh yang diperlukan guna menopang percepatan pertumbuhan Perseroan di tahun 2010 dan tahun-tahun mendatang.



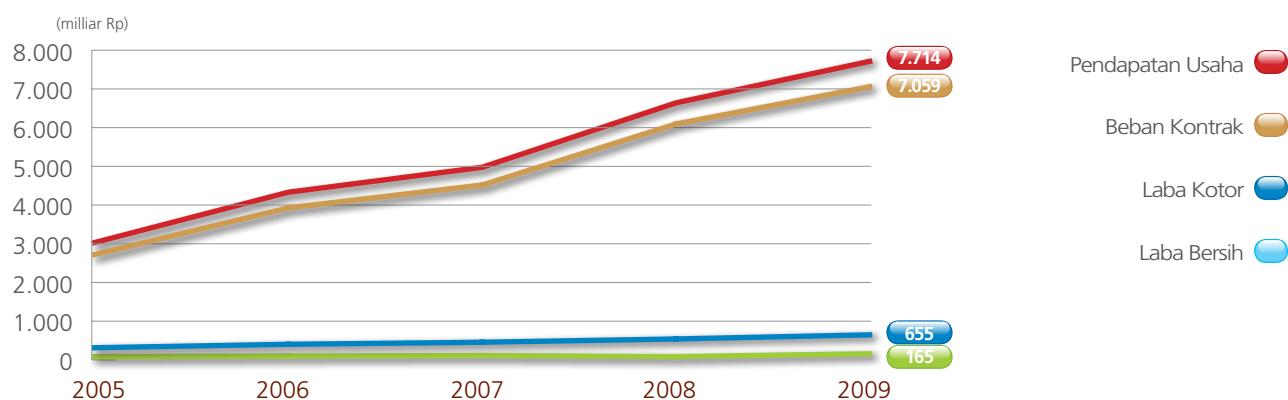
Tol Kanci - Pejagan sepanjang 35km menghubungkan Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah. Jalan tol ini dibangun dengan menggunakan teknologi ACPS.

IKHTISAR KEUANGAN

dalam juta rupiah, kecuali dinyatakan lain

	2009	2008	2007	2006	2005
Pendapatan Usaha	7.714.614	6.639.942	4.973.867	4.328.860	3.027.081
Beban Kontrak	7.059.135	6.095.669	4.516.924	3.926.033	2.716.777
Laba (Rugi) Kotor	655.479	544.273	456.943	402.827	310.304
Laba (Rugi) Proyek Kerja Sama	96.401	28.248	38.513	34.160	39.932
Laba (Rugi) Kotor Sesudah Proyek Kerja Sama	751.880	572.521	495.456	436.987	350.236
Laba (Rugi) Usaha	536.819	367.908	291.094	251.700	173.885
Laba (Rugi) Sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi, dan Amortisasi	429.983	258.715	309.492	287.544	225.722
Beban Bunga	107.846	106.289	135.061	141.388	94.207
Laba (Rugi) Bersih	165.530	81.482	111.601	95.581	77.919
Laba (Rugi) Bersih per Saham (Rupiah penuh)	94,20	46,04	61,96	53,06	43,26
Modal Kerja Bersih	852.098	689.926	684.113	419.420	534.872
Jumlah Investasi	61.545	61.948	73.460	51.260	24.052
Jumlah Aset	5.629.454	5.125.369	4.333.167	2.869.948	2.413.950
Jumlah Kewajiban	4.888.581	4.525.469	3.787.812	2.425.550	2.039.031
Jumlah Ekuitas	731.200	584.279	531.235	440.661	370.850
Hutang Berbunga	852.536	715.563	1.008.516	931.347	758.395
Hak Minoritas Pada Anak Perusahaan	9.673	15.620	14.121	3.737	4.069
Jumlah Saham Beredar (ribu saham)	1.757.225	1.769.847	1.801.320	1.801.320	1.801.320
Dividen per saham (Rupiah penuh)	11,51	15,04	12,98	10,61	25,96
Arus Kas Operasi	(150.792)	(3.306)	605.832	(155.990)	53.664
Belanja Modal	9.072	51.448	33.966	9.377	35.315
Kapitalisasi Pasar (juta Rp)	738.541	477.859	2.449.795	1.441.056	1.332.977
Enterprise Value	1.284.175	828.518	2.688.134	2.260.460	1.899.873
Rasio - Rasio Keuangan					
EBITDA Margin (%)	5,57	3,90	6,22	6,64	7,46
Return on Equity (%)	27,08	19,31	32,27	27,88	27,31
Return on Assets (%)	5,94	1,59	2,58	3,33	3,23
Rasio Lancar (%)	119,58	117,41	120,93	119,49	134,18
Debt to Equity Ratio (%)	116,59	122,47	189,84	211,35	204,50
EBITDA to Interest Expense (x)	3,99	2,43	2,29	2,03	2,40
Price-Earnings Ratio (x)	4,46	5,9	22	15,1	16,7
EV / EBITDA (x)	2,99	3,20	8,69	7,86	8,42
Rasio - Rasio Pertumbuhan					
Pendapatan Usaha (%)	16,18	33,50	14,90	43,00	9,50
Laba (Rugi) Usaha (%)	45,91	26,39	15,65	44,75	20,36
EBITDA (%)	66,20	(16,05)	7,63	27,39	26,56
Laba (Rugi) Bersih (%)	103,15	(26,99)	16,76	22,67	10,55
Jumlah Aset (%)	9,84	18,28	50,98	18,89	32,32
Ekuitas (%)	25,15	9,99	20,55	18,82	12,22
Nilai Tukar (Rp/USD)	9.400	10.950	9.419	9.038	9.855

Pendapatan Usaha, Beban Kontrak, Laba Kotor, dan Laba Bersih



Pergerakan Harga dan Volume Saham 2009 dan 2008



Harga Saham dan Volume Perdagangan per Kuarter 2009 dan 2008

Kuartal	Q4	Q3	2009	Q2	Q1	2008	Q4	Q3	2008	Q2	Q1
Tertinggi (Rp)	490	490	475	315		290	610	730	1.390		
Terendah (Rp)	390	405	285	250		150	265	580	710		
Penutupan (Rp)	410	460	425	275		270	340	600	780		
Volume (juta saham)	572	432	783	335		335	221	443	163		

Informasi Jumlah Obligasi Beredar

Tahun Penerbitan	Nama Obligasi	Nilai Emisi (Juta Rp)	Tingkat Bunga/ Nisbah (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat Obligasi
2007	Obligasi IV ADHI	375.000	11,00 p.a	6 Juli 2012	id A-
2007	Sukuk Mudharabah I ADHI	125.000	76,39*	6 Juli 2012	id A- (Sy)

* Nisbah

LAPORAN DEWAN KOMISARIS



KINERJA ADHI MELONJAK

Perseroan dalam Tahun Buku 2009 telah mampu meningkatkan kinerjanya, hal ini tampak dengan dicapainya Pendapatan Usaha pada Tahun Buku 2009 sebesar Rp7,715 triliun atau meningkat 16,19% dari sebelumnya, serta Laba Bersih Tahun Buku 2009 setelah penyisihan piutang beberapa proyek adalah sebesar Rp165,5 miliar atau meningkat 103,15% dari tahun sebelumnya.

PEMEGANG SAHAM YANG KAMI MULIAKAN,

Krisis ekonomi dan keuangan global tahun 2008 tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI). Pada tahun 2009 ADHI membukukan kinerja kokoh dengan mencetak Laba Bersih sebesar Rp 165,5 miliar, naik 103,07% dari Tahun 2008, dan Pendapatan Usaha sebesar Rp7,715 triliun naik sebesar 16,19% dari tahun 2008.

Beberapa faktor yang meningkatkan kinerja ADHI, antara lain efisiensi biaya produksi sebesar 0,3% dan penghematan biaya usaha sebesar 0,3% serta ada peningkatan laba proyek kerja sama menjadi Rp96 miliar dari tahun 2008 sebesar Rp28 miliar. Disamping itu, ADHI juga mampu menekan Bunga Bank dari tahun 2008 sebesar 1,6% menjadi 1,4% tahun 2009 dengan meningkatkan kesehatan cash flow Perseroan, yang pada gilirannya dapat meraih Laba Bersih yang berkualitas (quality of earning).

Kami menilai usaha dan kebijakan yang diambil oleh Direksi beserta jajarannya sudah merupakan keputusan yang tepat. Namun sekiranya usaha efisiensi dapat terus ditingkatkan terutama efisiensi pada biaya produksi. Hal ini akan lebih berhasil bila didukung dengan

usaha melakukan inovasi pada metode pelaksanaan pekerjaan.

Dihadapkan pada berbagai tantangan serta ketidakpastian yang mewarnai dunia usaha dewasa ini, kemampuan menghasilkan pendapatan yang berkesinambungan (sustainable income) semakin menjadi tuntutan dan prioritas setiap kegiatan Perseroan. Terhadap prospek usaha yang disampaikan oleh Direksi, Dewan Komisaris berpendapat bahwa ke depan Perseroan harus lebih selektif dalam memilih proyek dengan mengutamakan pada proyek di dalam

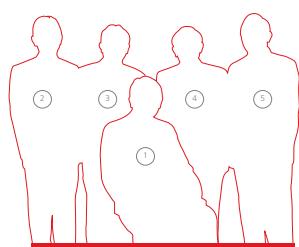
negeri yang sumber dananya jelas. Tentunya keputusan pengambilan proyek tersebut telah melalui kajian risiko dan tetap berdasarkan atas prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Tata kelola perusahaan yang baik, yaitu pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran serta kemandirian semakin melembaga untuk membentuk budaya kerja ADHI di semua jajaran insan Perseroan. Untuk itu, seluruh unsur Perseroan di bawah kepemimpinan Direksi dan pengawasan

Peningkatan Laba Berkualitas



* Compound Annual Growth Rate



1. Imam Santoso Ernawi - Komisaris Utama
2. Gatot Trihargo - Komisaris
3. Harry Susetyo Nugroho - Komisaris
4. Amir Muin - Komisaris Independen
5. Murhadi - Komisaris Independen

Dewan Komisaris yang dibantu oleh Komite-Komite harus secara serempak menjalankan tugasnya guna meraih sasaran yang telah ditetapkan di dalam rencana tahunan dan rencana jangka panjang perusahaan.

Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite-Komite yang bekerja efektif, yaitu: Komite Audit yang melakukan reviu atas laporan-laporan Perseroan serta laporan Hasil Audit Internal; Komite Manajemen Risiko yang bekerja sama dengan Risk Management Department melakukan analisa risiko Perseroan; Komite Kebijakan Corporate Governance yang memonitor implementasi GCG. Disamping itu, Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi maupun sistem remunerasinya serta dalam mengusulkan calon anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi, Dewan Komisaris juga dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

Berbagai potensi ancaman eksternal diperkirakan masih akan berlanjut di tahun 2010, namun demikian, Pemerintah telah menetapkan 10 (sepuluh) arahan untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional 5 (lima) tahun mendatang, antara lain pertumbuhan pembangunan ekonomi

harus lebih tinggi, daya saing harus meningkat yang khususnya melalui peningkatan infrastruktur ekonomi di tanah air, membangun keterhubungan, inovasi teknologi besar-besaran, iklim investasi yang membaik dan produktivitas nasional, disumbang oleh inovasi dan efisiensi.

Seiring dengan penetapan arahan dimaksud, patut menjadi alasan bagi kita untuk semakin mewaspadai dampak semua ini terhadap perusahaan. Untuk itu, Perseroan diharapkan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan senantiasa menjaga tingkat kewaspadaan yang tinggi dalam menjalankan usahanya didukung oleh menguatnya fungsi manajemen risiko guna meminimalisir potensi risiko yang bisa terjadi.

Wafatnya salah seorang Komisaris Independen, Sdr. Mas'ud Machfoedz, membuat Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan bursa dalam hal jumlah minimal Komisaris Independen. Kekurangan ini telah terpenuhi dengan ditunjuknya Sdr. Amir Muin sebagai Komisaris Independen pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 27 Januari 2010. Sehingga saat ini jumlah Komisaris Independen adalah 40% dari jumlah anggota Dewan

Komisaris. Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris yang baru menjadi sebagaimana terdapat pada bagian Tata Kelola Perusahaan Laporan Tahunan ini.

Dewan Komisaris sangat mengapresiasi hasil inovasi yang telah dilakukan oleh Perseroan, terutama sistem perkerasan jalan beton pracetak yang diberi gaya pratekan yang diberi nama *Adhi Concrete Pavement System (ACPS)* yang telah berhasil diterapkan di proyek jalan tol Kanci-Pejagan. Semoga dengan inovasi-inovasi yang dilakukan dapat mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

Dewan Komisaris juga mengucapkan selamat kepada Direksi beserta seluruh jajaran Perseroan atas prestasi yang berhasil diraih selama tahun 2009. Dengan kerja keras dan kebersamaan kita upayakan hasil yang terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan.

PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Dewan Komisaris



Imam Santoso Ernawi
Komisaris Utama

LAPORAN DIREKSI



Pencapaian Kinerja ADHI yang memuaskan sepanjang tahun 2009 merupakan buah hasil strategi manajemen yang tepat dan efektif namun juga tidak terlepas dari dukungan segenap karyawan serta seluruh pemangku kepentingan.

PEMEGANG SAHAM YANG KAMI HORMATI,

Walaupun pada penghujung tahun 2008 ekonomi global telah mengalami kondisi krisis, namun kondisi tersebut relatif tidak berpengaruh terhadap kinerja ADHI tahun 2009. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja yang memuaskan yang melebihi target maupun pencapaian kinerja tahun sebelumnya. Tentunya hal tsb. merupakan hasil kerja keras seluruh karyawan dan manajemen serta dukungan dari para pemangku kepentingan.

Pada tahun 2009, ADHI telah berhasil membukukan Pendapatan Usaha sebesar Rp7,7 triliun atau 16% di atas Pendapatan Usaha tahun 2008 atau 2,5% dari target Pendapatan Usaha sebesar Rp7,5 triliun. Sedangkan untuk Laba Bersih, berhasil meningkat 103% dibanding tahun 2008 yaitu dari Rp81,4 miliar (net profit margin 1,2%) menjadi Rp165,5 miliar (net profit margin 2,1%) atau meningkat 38% jauh melebihi dari target laba bersih sebesar Rp120,1 miliar.

Walaupun terjadi peningkatan beban pajak akibat diberlakukannya peraturan pajak final, laba bersih masih meningkat sangat tinggi. Hal ini selain karena peningkatan pendapatan usaha, kenaikan laba yang besar tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain keberhasilan program efisiensi biaya baik efisiensi biaya produksi (Harga Pokok Penjualan) maupun efisiensi Biaya Usaha sejumlah 0,3% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2008 serta penurunan Biaya Bunga sebesar 0,2 %. Kenaikan laba juga diakibatkan adanya peningkatan laba proyek kerja sama.

Pendapatan usaha tahun 2009 masih didominasi oleh proyek-proyek Pemerintah dan BUMN, yaitu sebesar 56%. Walaupun porsi tersebut masih lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Adapun yang mendorong meningkatnya porsi proyek swasta adalah diperolehnya proyek jalan tol Kanci-Pejagan yang telah diresmikan penggunaanya pada akhir bulan Januari 2010.

Seperti dapat dilihat dalam Laporan Tahunan ini khususnya bagian MD&A dan Laporan Keuangan, untuk tahun buku 2009 kami telah melakukan penyisihan piutang beberapa proyek. Penyisihan terbesar adalah pembebasan jaminan pelaksanaan proyek Qatar sebesar Rp89,7 miliar dan pencadangan tagihan bruto atas proyek Qatar sebesar Rp23,5 miliar. Manajemen telah menganut prinsip konservatif dalam masalah ini dengan asumsi penyelesaian dispute akan memakan waktu lama. Walaupun demikian, manajemen tetap berupaya keras dalam penyelesaian dispute tsb. baik melalui upaya amicable settlement maupun arbitrase sesuai kontrak perjanjian kedua belah pihak.

Sebagaimana telah kami sampaikan pada Laporan Tahunan Tahun 2008 maupun Laporan Tahunan ini baik di bagian MD&A maupun bagian Laporan Keuangan, bahwa telah terjadi dispute antara pihak ADHI dengan Al Habtoor LLC selaku main contractor yang mengakibatkan pihak Al Habtoor melakukan terminasi secara sepikak. Kondisi itu mengakibatkan dicairkannya jaminan sisa uang muka serta jaminan pelaksanaan.

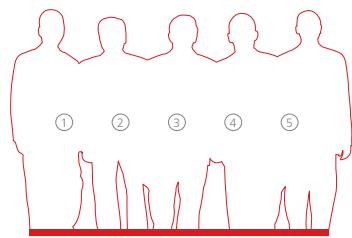
Mengenai Proyek Jakarta Monorail, manajemen tetap melakukan upaya-

upaya penyelesaian masalah proyek tsb. walaupun pada tahun 2008 telah dilakukan penyisihan atas piutang usaha dan piutang bruto sebagai langkah konservatif yang diambil. Upaya-upaya tsb. dilakukan dengan harapan dapat memperoleh penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Saat Laporan ini dibuat, telah terbit Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2010 yang memasukkan proyek Monorail di Jakarta ke dalam daftar prioritas proyek yang harus diselesaikan. Berdasarkan hal tsb. kami berkeyakinan bahwa dalam waktu yang tidak lama, proyek Jakarta Monorail akan dilanjutkan kembali. Dan diharapkan keputusan mengenai penggantian biaya khususnya biaya produksi yang telah dikeluarkan oleh Perseroan akan diterbitkan.

SASARAN MENDATANG

Pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam masa sekarang dan yang akan datang akan terus meningkat. Terlebih dorongan dari Pemerintah kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dalam program pembangunan infrastruktur tsb. melalui skema Public Private Partnership (PPP). Hal ini masih sejalan dengan respon Definisi Bisnis Perseroan yang mengembangkan bisnisnya dari Konstruksi sebagai core business dengan memasuki bisnis Engineering Procurement Construction (EPC) dan bisnis Investasi baik di bidang properti maupun di bidang infrastruktur.

Seperti tahun sebelumnya, pada tahun mendatang manajemen masih tetap memfokuskan pada pencapaian laba yang berkualitas (Quality of Earning). Upaya peningkatan efisiensi biaya produksi maupun biaya usaha tetap dilakukan a.l. dengan target waste



1. Bambang Pramusinto - Direktur Operasi II
2. M. Fauzan - Direktur Pengembangan Usaha
3. Bambang Triwibowo - Direktur Utama
4. Indradjaja Manopol - Direktur Operasi I
5. Supardi - Direktur Keuangan & SDM

material utama dapat lebih ditekan kembali. Kegiatan *procurement* juga dipusatkan khususnya untuk pengadaan material utama maupun jasa sehingga diharapkan dapat menurunkan biaya produksi secara konsolidasi.

Target pendapatan usaha maupun laba bersih untuk tahun 2010 diharapkan terjadi pertumbuhan sebesar 12%. Untuk pencapaian ini direncanakan belanja modal sebesar Rp82,5 miliar yang akan digunakan selain untuk peralatan produksi juga direncanakan untuk investasi proyek-proyek properti maupun infrastruktur.

Dalam jangka panjang untuk dapat tumbuh dan sekaligus dalam rangka merespon program pembangunan seperti infrastruktur dll. di Indonesia, ADHI memerlukan tambahan modal. Untuk itu sesuai dengan rencana sebelumnya, akan dilakukan Rigths Issue yang diharapkan akan dapat segera terlaksana.

INOVASI UNTUK KEBERLANJUTAN

Perusahaan tidak dapat tumbuh dan bersaing bila tidak ada inovasi. Hal ini diyakini oleh manajemen sehingga manajemen telah berkomitmen untuk menggali inovasi dengan membentuk bagian khusus yang menangani riset dan pengembangan sekaligus menetapkan tugas direktorat baru yang bernama Direktur Pengembangan Usaha

Dalam pelaksanaan proyek jalan tol Kanci-Pejagan, ADHI telah berhasil menerapkan sistem perkerasan jalan beton pracetak yang diberi gaya pratekan. Sistem ini kami beri nama Adhi Concrete Pavement System (ACPS). Sistem ini juga telah kami daftar dan patenkan di Departemen Hukum & HAM, Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual. Kami berharap – sebagai competitive advantage – selain akan mendorong pertumbuhan perusahaan, dengan ACPS ini akan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan infrastruktur jalan di Indonesia. Tentunya upaya ini tidak hanya sampai di sini, ke depan diharapkan inovasi-inovasi lain tetap bermunculan dan menjadi peningkatan daya saing bagi ADHI.

PENINGKATAN STANDAR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) terkait erat dengan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang yang mempunyai

relevansi terhadap kinerja perusahaan. Nilai akhir dari penerapan GCG adalah kinerja yang tinggi serta citra perusahaan yang baik. Dengan menerapkan GCG pada seluruh proses bisnis Adhi diharapkan dapat meningkatkan daya saing perusahaan yang tentunya akan meningkatkan kepercayaan pelanggan kepada Adhi.

Untuk melihat tingkat penerapan GCG di ADHI, telah dilakukan assessment – dengan menggunakan kriteria standar dari Kementerian BUMN – oleh pihak independen terhadap pengelolaan perusahaan selama tahun 2009 dengan capaian nilai 90,13 atau peringkat Sangat Baik dalam kualitas penerapan GCG. Dengan melihat hasil capaian tersebut di atas, maka untuk lebih meningkatkan penerapan GCG di perusahaan, pada tahun 2010 kami berniat untuk meningkatkan standar kriteria penilaianya.

PERUBAHAN MANAJEMEN

Salah satu keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2008 adalah perubahan pengurus Perseroan yang semula Direksi terdiri dari lima orang diubah menjadi hanya empat orang dan untuk sementara – sampai dengan RUPS berikutnya – tidak dilakukan penggantian Anggota Dewan Komisaris yang telah meninggal dunia. RUPS juga memberikan wewenang kepada Direksi untuk melakukan pembagian tugas diantara anggota Direksi setelah berkonsultasi dengan Dewan Komisaris.

Namun saat ditulisnya Laporan Tahunan ini, telah dilaksanakan RUPS Luar Biasa dengan hasil pengangkatan satu orang anggota Direksi Bambang Pramusinto dan satu orang Komisaris Independen Amir Muin. Dengan demikian jumlah Komisaris Independen telah memenuhi persyaratan Bapepam maupun Bursa menjadi dua orang atau 40% dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris. Susunan anggota Direksi dapat dilihat pada bagian Tata Kelola Perusahaan Laporan Tahunan ini.

KINERJA SAHAM ADHI

Pada awal tahun 2009 ADHI melaksanakan *buyback* sebagai kelanjutan dari periode *buyback* sebelumnya yang dimulai pada akhir tahun 2008. realisasi *buyback* keseluruhan menjadi sejumlah 44.094.500 saham. Sehingga total saham beredar menjadi 1.757.225.500 saham. Harga saham ADHI sejak awal tahun

sampai dengan akhir tahun meningkat sebesar 37% dari Rp300 menjadi Rp410. Kenaikan tertinggi terjadi pada pertengahan tahun dengan harga Rp490 atau kenaikan sebesar 63%. Ke depan, manajemen tetap akan melakukan terobosan-terobosan bisnis sehingga dapat memberikan *additional value* bagi ADHI yang akan tercermin pada peningkatan harga saham ADHI.

PENGHARGAAN UNTUK MENDUKUNG REPUTASI

Seperti tahun-tahun sebelumnya, sepanjang tahun 2009, Perseroan juga memperoleh sejumlah penghargaan baik yang bersifat mempertahankan prestasi sebelumnya maupun yang berupa penghargaan yang baru. Penghargaan tsb. a.l. *Best Disclosure & Transparency* oleh *Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)* dan *Majalah Business Review, The Most Trusted Company* dalam penilaian *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)* dan *Majalah SWA, The Best in Building and Managing Corporate Image* dalam penghargaan *Indonesia's Most Admired Company (IMAC)* oleh *Frontier Consulting Group* dan *BusinessWeek*, Juara I Kategori BUMN Non Keuangan *Listed* dalam *Annual Report Award, The Best User Interface* dalam penghargaan *website terbaik* oleh Kantor Kementerian BUMN, dan dalam *Indonesia Quality Award (IQA)*.

Penghargaan-penghargaan tsb. yang tetap diperoleh oleh Perseroan dalam mempertahankan prestasinya menunjukkan bahwa sampai saat ini Perseroan tetap menjadi Perusahaan yang memiliki reputasi yang tinggi dan dipercaya. Semua ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan seperti karyawan, manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada kesempatan ini, disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga prestasi tsb. dapat tetap dipertahankan maupun ditingkatkan di masa yang akan datang dengan ridha Tuhan Yang Maha Esa.

PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Direksi,

Bambang Triwibowo
Direktur Utama

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI



Annual Report Award (ARA)

Yang diselenggarakan oleh Bapepam-LK, Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia, Kementerian BUMN, Ditjend. Pajak, Ikatan Akuntan Indonesia, dan Komite Nasional Kebijakan Governance.

- 2008 **Juara I** kategori BUMN Non Keuangan Listed sekaligus menduduki urutan ke-3 dari 163 peserta.
- 2007 **Juara III** untuk kategori BUMN Non Keuangan Listed sekaligus menduduki urutan ke-3 dari 167 peserta.
- 2006 **Juara III** untuk kategori BUMN Non Keuangan Listed sekaligus menduduki urutan ke-3 dari 169 peserta.
- 2005 **Juara I** untuk kategori BUMN Non Keuangan Listed.
- 2004 **Juara II** untuk kategori BUMN Non Keuangan Listed.



Indonesia's Most Admired Company (IMAC)

Yang diselenggarakan Frontier Consulting Group bekerja sama dengan Majalah BusinessWeek.

- 2009 ADHI raih predikat "**The Best in Building and Managing Corporate Image**" untuk kategori Kontraktor.
- 2008 ADHI raih predikat "**The Best Corporate Image**" untuk kategori Kontraktor.



Indonesia Quality Award (IQA)

2009, 2007, 2006

ADHI memperoleh penghargaan IQA dari IQA Foundation.

Indonesian Financial Reporting Award (IFRA) 2008



ADHI sebagai pemenang IFRA 2008 untuk kategori Industri Kontruksi dari FEUI, Bapepam-LK, dan Bisnis Indonesia.

CEO BUMN Award 2006



Direktur Utama ADHI memperoleh penghargaan untuk kategori CEO on Innovation Management dari BUMN dan CEO BUMN Award.

Zero Accident Achievement



Penghargaan yang diberikan oleh PT Chevron Pacific Indonesia kepada ADHI atas prestasinya yaitu **20 Million Safe Work Hours** dengan DAFW Incidence Rate: 0 untuk periode Maret 2007 - Mei 2008.



Indonesia's Most Trusted Company Award

Berdasarkan Corporate Governance Perception Index yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG).

2009 ADHI peroleh predikat sebagai **"Perusahaan Terpercaya"**.

2008 ADHI peroleh predikat sebagai **"Perusahaan Terpercaya"**.

2007 ADHI peroleh predikat sebagai **"Perusahaan Terpercaya"** sekaligus **"Perusahaan Terbaik"** untuk sektor Properti dan Real Estate.



Indonesia GCG Award 2009

"Best Disclosure & Transparency"

Yang diselenggarakan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) dan Majalah Business Review.



Website BUMN Award 2009

"The Best User Interface"

Situs (website) ADHI meraih peringkat II untuk kategori The Best User Interface yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN.

ISO 14001:2004



Dikeluarkan oleh United Register Standard Service pada tanggal 28 Juli 2009 dan berlaku sampai dengan 27 Juli 2012.

OHSAS 18001:2007



Occupational Health and Safety Management System dikeluarkan oleh United Register Standard Service pada tanggal 28 Juli 2009 dan berlaku sampai dengan 27 Juli 2012.

ISO 9001:2008



Dikeluarkan oleh United Register Standard Service pada tanggal 28 Juli 2009 dan berlaku sampai dengan 27 Juli 2012.

KEJADIAN PENTING 2009



12 Januari

ADHI menyelesaikan Pembelian Kembali (*Buyback*) Saham ADHI tahap I yang telah dimulai sejak 13 Oktober 2008. Jumlah saham yang di-*buyback* adalah 40.001.000 saham atau senilai Rp8,714 miliar.

23 Januari

ADHI melanjutkan Pembelian Kembali (*Buyback*) Saham ADHI tahap berikutnya, yang berakhir 22 April 2009. Sehingga total pembelian kembali saham ADHI untuk kedua periode adalah sebanyak 44.094.500 saham atau senilai Rp9,7 miliar.



28 April

Terminal 3 (T3) Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng secara resmi dibuka untuk umum oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. T3 menganut konsep terminal *eco modern*. T3 dibangun di atas lahan seluas 30.000 meter persegi.



1 Mei

Penganugerahan GCG Award 2009 sebagai pemenang *the Best Disclosure & Transparency*. Acara ini diselenggarakan oleh IICD bekerja sama dengan Majalah *Business Review* di Denpasar, Bali.



13 Mei

ADHI mengadakan *Analyst Meeting* pertama di tahun 2009 di Jakarta.



10 Juni

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Jembatan Suramadu yang dikerjakan oleh Consortium of Indonesia Contractors (CIC), gabungan dari beberapa kontraktor nasional dimana ADHI sebagai *leader*.



11 Juni

Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk Tahun Buku 2008 di Kantor Pusat Jakarta.



12 Agustus

Penganugerahan *Indonesia's Most Admired Company (IMAC)* 2009 dengan predikat **"The Best in Building and Managing Corporate Image"** dari *Frontier Consultant* bekerja sama dengan majalah *BusinessWeek*



25 November

Penghargaan *Indonesian Quality Award (IQA) 2009* untuk kategori "Early Improvement" dari *IQA Foundation*.



2-3 Desember

ADHI berpartisipasi dalam acara *Investor Summit and Capital Market Expo 2009* di Jakarta.



23 November

Peresmian jalan tol Bogor *Ring Road (BRR)* Seksi I oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Jalan Tol seksi I sepanjang 3,8 km ini menghubungkan Sentul Selatan dengan Kedung Halang, Bogor.



25 November

ADHI kembali mengadakan *Analyst Meeting* di Jakarta.



3 Desember

ADHI menyelenggarakan Paparan Publik yang dihadiri oleh Direksi dan Manajemen pada acara *Investor Summit and Capital Market Expo 2009* di Jakarta.



1 Desember

ADHI mendaftarkan Hak Paten ke Depkumham atas inovasi teknologi di bidang pekerjaan jalan tol yang diberi nama ACPS (*Adhi Concrete Pavement System*).

GEDUNG & PROPERTI

Bisnis Gedung & Properti sempat merasakan dampak mengetatnya likuiditas perbankan di akhir tahun 2008 dan sepanjang paruh tahun pertama 2009. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap kelancaran beberapa proyek pembangunan gedung dan properti di Indonesia. Beruntung bahwa hal yang sama tidak terjadi pada proyek-proyek yang





Agar terus berkembang, sebuah perusahaan harus ditopang oleh manusia yang berintegritas, mampu beradaptasi, serta siap meningkatkan segala aspek dari kegiatan bisnis kita,

ditangani oleh ADHI.

Sebagai bagian dari sikap kehati-hatian yang dianut oleh Perseroan, dan dengan mengantisipasi dampak krisis keuangan global terhadap kelancaran pembiayaan proyek secara umum, ADHI meletakkan garis kebijakan yang intinya mengarah pada kepastian kelancaran proyek-proyek pembangunan gedung maupun pengembangan properti yang dilakukan Perseroan.

Hal ini diupayakan antara lain dengan menyeleksi secara cermat proyek-proyek yang ingin ditangani, mulai dari menentukan keikutsertaan Perseroan dalam tender-tender proyek yang ditawarkan; mengutamakan proyek-proyek yang memiliki sumber pendanaan yang pasti dan dapat dipertanggungjawabkan; memastikan bahwa penanganan

proyek-proyek tersebut tidak akan membebani arus kas Perseroan secara berlebihan; dan akhirnya, memastikan bahwa Perseroan dapat melaksanakan berbagai proyek pembangunan gedung dan pengembangan properti tersebut secara efektif baik dari segi biaya, waktu maupun pemanfaatan sumber daya yang terkait.

Berkat garis-garis kebijakan tersebut, yang diterapkan secara konsisten dan merata sebagai bagian dari penerapan good corporate governance, maka ADHI mampu menjadikan bidang usaha Gedung & Properti sebagai salah satu pilar utama bisnis Perseroan.

Bisnis Gedung & Properti menyumbangkan sekitar 39% dari seluruh perolehan pendapatan Perseroan, atau sebesar Rp3 triliun, pada tahun 2009, dan diperkirakan akan terus meningkat di tahun 2010 dan selanjutnya.

ENGINEERING, PROCUREMENT, CONSTRUCTION (EPC)

Jasa rekayasa, pengadaan dan konstruksi atau yang umumnya disebut jasa EPC (Engineering, Procurement and Construction), merupakan suatu pengembangan yang wajar dari jasa konstruksi semata yang di masa lalu merupakan satu-satunya bidang usaha ADHI. Perkembangan Perseroan dalam beberapa tahun terakhir ke bidang usaha





Keberhasilan di setiap organisasi merupakan keberhasilan membangun keakraban dan keharmonisan antar individu.

EPC, yang antara lain ditandai oleh pencanangan *positioning Beyond Construction* sejak tahun 2006, telah menempatkan Perseroan pada jalur peluang maupun pertumbuhan usaha sebagaimana yang diharapkan.

Sebagaimana diketahui, jasa EPC memberikan marjin usaha yang lebih tinggi dibandingkan dengan jasa konstruksi semata, dan dengan menguasai bidang ini, maka Perseroan juga turut berperan dalam peningkatan aset intelektual serta kemampuan kontraktor nasional dalam memberikan layanan *end-to-end* secara menyeluruh dan terpadu atas sebuah proyek pembangunan.

Diawali dari proyek TPPI Tuban pada tahun 2004, maka kiprah ADHI sebagai pelaksana EPC terus berkembang dan kini telah mencakup berbagai kegiatan EPC di beberapa sektor industri

seperti sektor ketenagalistrikan, migas, pertambangan, properti, prasarana, dan lain sebagainya.

Pengembangan usaha ke arah EPC turut membuka pasar ADHI dalam arti yang seluas-luasnya. Saat ini ADHI telah berhasil dan sedang menyelesaikan proyek-proyek EPC lainnya.

Maka, sejak pencanangan *Beyond Construction* oleh ADHI, EPC telah menjadi salah satu pilar bisnis Perseroan yang semakin diandalkan untuk menopang pertumbuhan usaha Perseroan yang berkesinambungan dalam jangka panjang.

Pada tahun 2009, bidang jasa EPC menyumbangkan 7% dari seluruh perolehan pendapatan Perseroan, atau sebesar Rp540 miliar.

INFRASTRUKTUR

Ketersediaan infrastruktur sangat vital bagi perputaran roda ekonomi. Pada kondisi yang normal, pembangunan infrastruktur diperlukan guna mengimbangi laju pertumbuhan ekonomi, dan dalam kondisi tertentu, bahkan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Saat dunia





Masa depan kita...
akan tergantung dari apa
yang kita kerjakan dan
hasilkan saat ini.

dilanda oleh resesi ekonomi yang berkepanjangan, maka para pemimpin dunia menyerukan perlunya digalakkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu stimulus bagi pemulihhan perekonomian.

Pada pertemuan tingkat tinggi negara-negara ASEAN belum lama ini, *joint communique* konferensi puncak tersebut menyerukan perlunya ASEAN memperbaiki serta meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai guna memicu laju pertumbuhan ekonomi kawasan.

Sedangkan di Indonesia sendiri, Kabinet Indonesia Bersatu II juga mencanangkan pembangunan infrastruktur sebagai kunci untuk membuka lapangan kerja, meningkatkan penanaman modal, menyediakan sumber daya energi dalam jumlah yang memadai, memperlancar arus barang dan jasa, serta mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

Semua ini sangat menguntungkan bagi bidang usaha yang digeluti Perseroan, baik sebagai kontraktor pembangunan, sebagai pelaksana jasa EPC, maupun sebagai penanam modal langsung pada beberapa pengembangan infrastruktur tersebut.

Sejak tahun 2006, juga sebagai manifestasi *Beyond Construction* ADHI, Perseroan mulai berperan sebagai penanam modal. Dan ke depan oleh karenanya diharapkan ADHI akan menjadi pemilik sebagian dari infrastruktur yang dikembangkan seperti jalan tol, pembangkit tenaga listrik, dan lain sebagainya disamping sebagai pemilik/pengembang properti.

Pada tahun 2009, bidang usaha Investasi belum memberi kontribusi pendapatan yang signifikan. Namun sejalan dengan waktu, investasi diharapkan menghasilkan pendapatan tetap bagi Perseroan, mengimbangi volatilitas pendapatan bisnis jasa konstruksi yang tidak sama dari tahun ke tahun.

PROFIL PERUSAHAAN

LANGKAH BESAR MENUJU TAHUN EMAS

Kiprah ADHI dimulai sejak 11 Maret 1960 saat Menteri Pekerjaan Umum menetapkan Architecten-Ingenicuren en Annemersbedrijf "Associatie Selle en de Bruyn, Reyerse en de Vries N.V. (Associatie N.V.), salah satu perusahaan milik Belanda yang dinasionalisasi, menjadi PN Adhi Karya. Nasionalisasi ini ditujukan untuk memacu pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Status ADHI berubah menjadi sebuah Perseroan Terbatas pada tanggal 1 Juni 1974 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman.

ADHI 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sampai pada akhir tahun 2003 saat Negara Republik Indonesia melalui Menteri Negara BUMN, selaku Kuasa Pemegang Saham, melepas 49% kepemilikannya atas saham ADHI untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Initial Public Offering (IPO). Keputusan tersebut diikuti oleh pendaftaran saham ADHI di Bursa Efek Jakarta yang sekaligus menjadikan ADHI sebagai BUMN konstruksi pertama yang terdaftar pada bursa.

MEMANTAPKAN BIDANG USAHA

Mencermati kondisi eksternal termasuk kebutuhan dan keinginan konsumen serta

perkembangan kemampuan Perseroan dari waktu ke waktu, maka setelah melalui kajian yang panjang, Perseroan menetapkan visi dan misi barunya. Sejalan dengan itu ADHI menambah bidang usaha EPC yang merupakan extended business dan bidang investasi sebagai expanded businessnya. Namun demikian, jasa konstruksi tetap menjadi core business ADHI. Dalam mengembangkan bisnisnya, ADHI selalu membatasi area pengembangannya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Hal ini dilakukan agar komitmen untuk selalu memberikan kualitas pelayanan terbaik dapat dipertahankan.

Dalam kegiatan operasionalnya, ADHI didukung oleh sembilan divisi yang tersebar di seluruh Indonesia dan Luar Negeri. Dimana beberapa divisi diarahkan sebagai divisi

Visi & Misi

Visi dan Misi Perusahaan

Seiring dengan tantangan yang harus dihadapi khususnya pada bidang industri jasa konstruksi dan adanya tuntutan bahwa perusahaan harus selalu melakukan value creation demi meningkatkan firm value maka ADHI mengubah Visi dan Misinya menjadi sebagai berikut:

Visi 2011

Menjadi juara sejati di bisnis jasa konstruksi dan mitra pilihan dalam bisnis jasa perekayasaan dan investasi infrastruktur di Indonesia dan beberapa negara terpilih.

Misi 2007-2011

Membangun sebuah Great Infrastructure Enterprise dengan:

1. Menciptakan nilai yang berkesinambungan kepada pelanggan, karyawan, pemegang saham, dan berbagai pihak lain yang berkepentingan.
2. Memperkokoh kompetensi inti dalam jasa konstruksi, memperluas kapabilitas dalam jasa perekayasaan, serta mengembangkan kapabilitas dalam jasa investasi secara selektif.
3. Berkecimpung aktif dalam program-program Public-Private-Partnership (PPP) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menjalankan inisiatif-inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) dalam rangka pengembangan kemanusiaan.

Visi dan Misi tersebut disusun dengan pertimbangan bahwa pasar jasa konstruksi masih mempunyai prospek yang bagus sehingga ADHI bertekad untuk menjadi juara sejati di bisnis jasa konstruksi. Bidang EPC ke depan akan semakin berkembang demikian pula dengan bidang Investasi. Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan perundungan yang mendukung kerja sama investasi (skema Public-Private-Partnership) di bidang infrastruktur, sehingga tidak berlebihan jika ADHI menetapkan visinya menjadi mitra pilihan di bidang EPC dan Investasi. ADHI menyadari bahwa untuk menjamin kelangsungan usaha tidak terlepas dari peran serta masyarakat, sehingga ADHI akan berperan aktif dalam program CSR.

spesialis, yaitu spesialis gedung, spesialis infrastruktur dengan teknologi tinggi, dan spesialis EPC.

ADHI mengelompokkan proyek-proyek konstruksinya menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Proyek Infrastruktur

Terdiri dari proyek-proyek infrastruktur seperti jalan dan jembatan, pengairan, pembangkit listrik, pelabuhan, dan lain-lain.

2. Proyek Bangunan

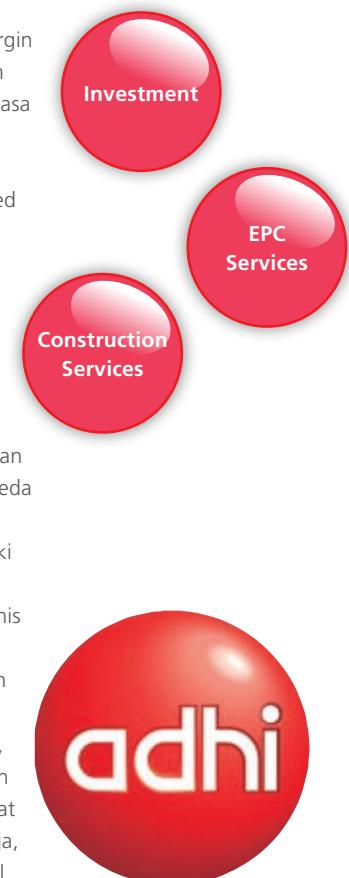
Terdiri dari pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan gedung bertingkat seperti hotel dan perkantoran; pembangunan fasilitas umum seperti rumah sakit dan sekolah; bangunan komersial; perumahan; kawasan industri dan manufaktur; pekerjaan mekanikal dan elektrikal pada gedung dan industri, transmisi kelistrikan dan gardu induk, otomatisasi

bangunan, pembangkit listrik, tata udara dan tata suara, radio, telekomunikasi, dan instrumentasi serta pemimpinan.

EPC, yang merupakan extended business ADHI, adalah perpanjangan bisnis jasa konstruksi yang dipilih karena bisnis ini masih sangat berkaitan dengan core business Perseroan. Kompetensi ADHI di bidang jasa konstruksi merupakan modal kekuatan yang positif untuk memenangkan proyek EPC. Mengingat kompetensi dan sumber daya yang dimiliki Perseroan, ADHI membatasi pekerjaan EPC yang diambil hanya pada pembangunan pembangkit listrik dan oil & gas. Begitu juga dengan wilayah operasinya, Divisi EPC dibatasi hanya beroperasi di wilayah Indonesia. Kebijakan ini ditetapkan mengingat bisnis merupakan bisnis baru bagi

ADHI, walaupun sebenarnya proyek EPC menawarkan margin keuntungan yang relatif lebih besar dibandingkan dengan jasa konstruksi.

Investasi merupakan expanded business yang dipilih oleh ADHI. Bisnis ini mempunyai value creation yang tinggi, walaupun untuk masuk dalam bisnis ini mempunyai tantangan yang cukup berat karena dibutuhkan pola pikir yang lebih jangka panjang, dan syarat kompetensi yang berbeda dengan yang telah dimiliki Perseroan. Dengan memasuki bidang investasi, diharapkan ADHI dapat menciptakan bisnis EPC dan konstruksi sendiri. Tentunya selain mendapatkan keuntungan dari bisnis investasinya. Dalam bisnis ini, ADHI membatasi hanya terjun ke bidang investasi yang dekat dengan bidang konstruksi saja, misalnya jalan tol, properti dll.



Prinsip-prinsip ADHI

Nilai-nilai Perusahaan

Dalam rangka menciptakan nilai (value creation), ADHI mengandalkan keunggulan yang berasal dari budaya yang dimiliki perusahaan. Oleh karena itu, dilakukanlah perumusan kembali budaya perusahaan yang menggunakan kekuatan nama "ADHI", dan sebagai hasilnya dirumuskanlah ADHI Principles yang memiliki nilai:



Advanced, berarti menjadi maju dan terdepan dalam pikiran (mind), perasaan (heart) dan jiwa/spiritual (spirit).



Determined, berarti tegas, berkehendak keras, teguh, fokus dan konsisten dalam menghasilkan Quality, Cost, Delivery (QCD) di bidang konstruksi, menjunjung tinggi nilai-nilai Health, Safety and Environment (HSE) di jasa perekayasaan, dan memegang prinsip nilai-nilai tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) di investasi.



Humane, berarti memiliki kepedulian dan empati dalam menjalankan operasi perusahaan dengan menjaga lingkungan hidup sekitar (preserving environment), berkomitmen mendukung upaya pengembangan komunitas (supporting community development) dan memelihara kelangsungan hidup dunia (promoting sustainable world).



Inspiring, maksudnya memberikan inspirasi kepada rekan sejawat, pelanggan, dan pemegang saham (inspiring to the people, customer and shareholder).

SUMBER DAYA MANUSIA

TOP TALENTS

Kekuatan sebuah perusahaan sangat ditentukan oleh kekuatan sumber daya manusia di dalamnya. ADHI sebagai perusahaan jasa konstruksi sangat menjaga dan selalu meningkatkan kekuatan kompetensi sumber daya manusia yang merupakan ujung penggerak bisnis utama. Untuk menghasilkan sumber daya manusia handal, ADHI memulainya dengan melakukan proses rekrutmen secara terstruktur. Dilanjutkan dengan program pelatihan dan pengembangan karyawan yang tepat sasaran, sehingga akan berdampak pada peningkatan motivasi dimana setiap karyawan akan memberikan kontribusi terbaik mereka untuk perusahaan.



Sejak awal, perusahaan telah melakukan pemetaan kompetensi karyawannya melalui kombinasi antara kinerja dan budaya kerja yang tercermin pada perilaku, sehingga dapat lebih sesuai dengan kebutuhan yang nyata. Sedangkan untuk melihat iklim organisasi, perusahaan telah melaksanakan survei keterikatan karyawan (Engagement Survey) yang dilanjutkan dengan penyusunan dan pelaksanaan program peningkatannya.

Untuk menjaga kesinambungan ketersediaan SDM yang kompeten dan sekaligus memiliki keterikatan yang tinggi terhadap perusahaan, setiap tahap dari proses pengelolaan SDM yang dimulai dari desain organisasi, perencanaan, rekrutmen/seleksi, penempatan, pengembangan sampai dengan berakhirnya hubungan kerja, selalu dimasukkan faktor produktivitas dan keterikatan. Dengan demikian kompetensi ADHI dapat selalu meningkat dari waktu ke waktu guna menjawab tantangan dalam kompetisi yang ada.

Pada akhir tahun 2009, jumlah karyawan tetap ADHI sebanyak 1.853 orang, yang sebagian besar (76%) berlatar belakang pendidikan teknik.

PROGRAM PENGEMBANGAN SDM

Untuk meningkatkan kompetensi karyawannya, ADHI melakukan bermacam pengembangan dan pelatihan baik dilaksanakan secara internal melalui On the Job Training/magang, penambahan tanggung jawab (enrichment), coaching dan counseling dsb. yang lebih menitikberatkan pada peningkatan keterampilan teknis. Selain itu, untuk menambah dan meningkatkan wawasan serta kompetensi manajerial, diupayakan melalui pengembangan secara eksternal.

Program pengembangan SDM yang dilaksanakan pada tahun 2009 merupakan kelanjutan dari pengembangan program yang dilakukan pada tahun sebelumnya. Program

pengembangan SDM ditujukan bukan hanya kepada karyawan tetapi juga kepada pimpinan Perseroan. Pengembangan untuk para pimpinan lebih menitikberatkan pada aspek-aspek strategis dan wawasan ke depan. Begitu pula kesempatan untuk meraih jenjang karir setinggi-tingginya maupun dalam mengikuti program pengembangan, ADHI tidak membeda-bedakan gender, status maupun kekurangan fisik setiap karyawan untuk tetap mempunyai hak dan kesempatan yang sama.

Penyempurnaan kesisteman SDM yang telah dimulai sejak tahun 2007 masih terus dikembangkan. Pada tahun 2009 telah dilakukan penyempurnaan lebih mendalam tentang Organisasi, Job Description, Job Requirement dan Sistem Penilaian Kinerja.

PELATIHAN

Program pelatihan dan pengembangan karyawan yang dilakukan ADHI secara berkesinambungan, akan melahirkan

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi 2009 dan 2008



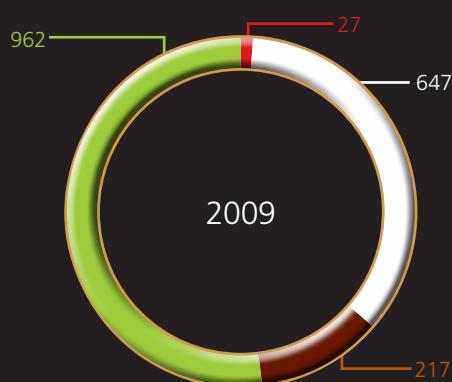
Para Kepala Departemen (dari kiri ke kanan) :

Berdiri : Ferry Febrianto, Adriyanto Karyo Utomo, Anis Anjayani, Budhi Hidayati, Amrozi Hamidi, Shoful Ulum.

Duduk : Kurnadi Gularso, A. Tharmuzie Romlie



Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan 2009 dan 2008

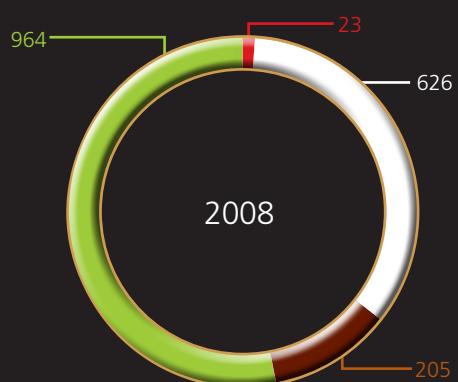


Pasca Sarjana

Sarjana

Diploma

SLTA



karyawan ADHI mampu bersaing secara sehat dengan para pesaingnya. Realisasi biaya pelatihan untuk tahun 2009 adalah sebesar Rp1,87 miliar yang diikuti oleh 412 karyawan.

Pelatihan yang dilaksanakan tahun 2009 antara lain adalah :

- Project Management
- Risk Based Audit & Fraud Audit
- ADB Business Opportunities
- Mitigasi Risiko Kontrak bagi BUMN dan Penyelesaian sengketa
- Audit Intern Tingkat Lanjut
- Contract Administration
- Risk Management
- PSAK 50 & PSAK 55 Akuntansi Instrumen Keuangan
- Sertifikasi Ahli Struktur
- Sertifikasi Ahli Mechanical & Electrical
- Sertifikasi Pelaksana
- Sertifikasi Ahli Madya Sumber Daya Air
- Sertifikasi Ahli Utama Struktur
- Sertifikasi Ahli Utama Teknik Sipil
- Sertifikasi Ahli Utama Pelaksana Jembatan
- Sertifikasi Ahli Madya Geoteknik
- Sertifikasi Ahli Madya Geodesi

- Hukum Kontrak Konstruksi
- Pasca Sarjana Hukum Bisnis
- Komunikasi Persuasif
- Pemahaman dan Penerapan Sistem K3
- Pelatihan Mediasi
- Hubungan Industrial
- Pelatihan Cost Control
- HSE Management
- Project Planning & Schedulling
- Kuliah Umum Teknologi Beton
- Contract Management

berikut :

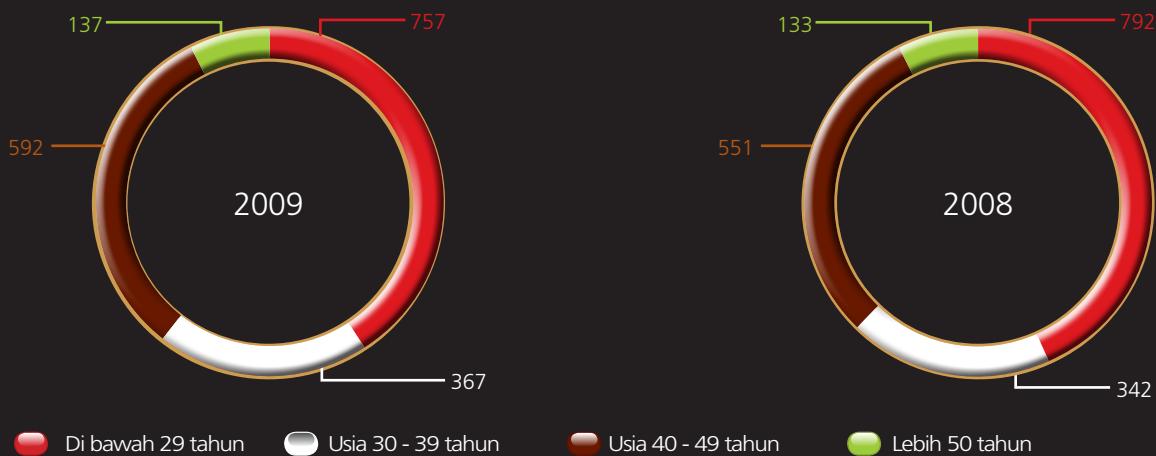
- Communication Skill
- General Humance Resources
- Cost Control
- Project Management
- Trade Service
- Risk Management
- Bank Garansi
- Treasury
- Finance Management
- Finon
- Sertifikasi berbagai keahlian dan ketrampilan.

Pelatihan dan sertifikasi ini dilaksanakan oleh instansi yang kredibel dan kompeten di bidangnya. Selain untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas karyawan, dengan program sertifikasi profesi ini akan dapat menunjang Perseroan dalam proses perolehan pekerjaan.

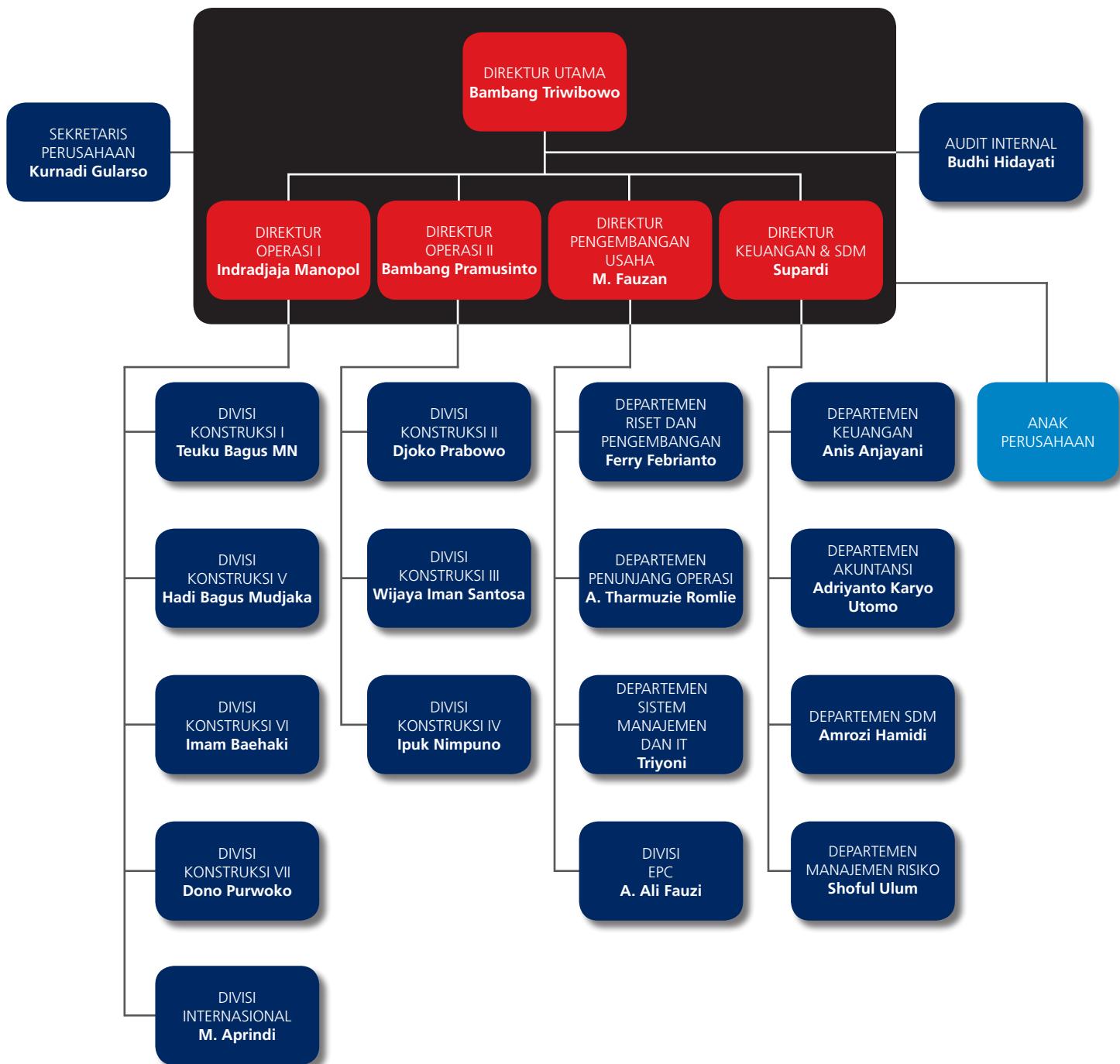
Untuk tahun 2010, perusahaan merencanakan pengembangan karyawan dengan anggaran sebesar Rp4,63 miliar.

Selain melanjutkan pelatihan yang masih berlanjut dari tahun sebelumnya, ADHI merencanakan program pendidikan dan pelatihan untuk tahun 2010 sebagai

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia 2009 dan 2008



STRUKTUR ORGANISASI



INFORMASI PEMEGANG SAHAM

Komposisi Kepemilikan Saham per 31 Desember 2009

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Kepemilikan
Pemodal Nasional		
Negara Republik Indonesia	918.680.000	52,28%
Perorangan Indonesia	283.301.500	16,12%
Reksa Dana	160.346.000	9,12%
Dana Pensiun	94.447.000	5,37%
Asuransi	31.255.000	1,78%
Perseroan Terbatas	18.076.312	1,03%
Yayasan	5.506.000	0,31%
Karyawan	10.000	0,00%
Sub Total I	1.511.621.812	86,02%
Pemodal Asing		
Badan Usaha Asing	240.080.188	13,66%
Perorangan Asing	5.523.500	0,31%
Sub Total II	245.603.688	13,98%
Sub Total I + II (Saham Beredar)	1.757.225.500	100,00%
<i>Treasury Stock*</i>	44.094.500	-
Total (saham diterbitkan)	1.801.320.000	-

Keterangan:

*Program buy back

Komposisi Kepemilikan Saham Komisaris dan Direksi per 31 Desember 2009

Pemegang Saham	Jabatan	Jumlah Saham	Kepemilikan
Dewan Komisaris			
Imam Santoso Ernawi	Komisaris Utama	0	0,00%
Harry Susetyo Nugroho	Komisaris	0	0,00%
Gatot Trihargo	Komisaris	0	0,00%
Murhadi	Komisaris Independen	0	0,00%
Direksi			
Bambang Triwibowo	Direktur Utama	0	0,00%
Indradjaja Manopol	Direktur Keuangan & SDM	1.999.500	0,11%
M. Fauzan	Direktur Operasi I	4.236.000	0,24%
Supardi	Direktur Operasi II & EPC	1.750.000	0,10%
Total		7.985.500	0,45%

Komposisi Kepemilikan Saham yang Memiliki 5% Atau Lebih per 31 Desember 2009

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Kepemilikan
Negara Republik Indonesia	918.680.000	52,28%
Fortis Bank (Nederland) N.V.	100.000.000	5,69%
Sub Total	1.018.680.000	57,97%
Pemegang Saham Lainnya (masing-masing di bawah 5%)	738.545.500	42,03%
Total (saham beredar)	1.757.225.500	100,00%
<i>Treasury Stock*</i>	44.094.500	-
Total (saham diterbitkan)	1.801.320.000	-

Keterangan:

*Program buy back

PENCATATAN SAHAM DAN EFEK LAINNYA

KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM

Menjadi Perusahaan Terbuka disandang ADHI pada tahun 2003. Melalui Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep 289/MBU/2003 tanggal 7 November 2003, Pemerintah menyetujui untuk menjual sebagian kepemilikannya atas saham ADHI melalui Penawaran Umum kepada Masyarakat dan/atau penawaran khusus melalui Program EMBO. Program EMBO tersebut terlaksana pada tanggal 4 Maret 2004, ditandai dengan adanya jual beli 441.320.000 (empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu) saham milik Negara kepada Koperasi Pesaham Adhi Karya dengan nilai nominal Rp100 pada harga Rp150 per lembar saham. Sedangkan Penawaran Umum saham kepada masyarakat efektif berlaku pada tanggal 18 Maret 2004. Saham ADHI dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Program EMBO terlaksana sebesar maksimal 49% dari seluruh jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Saham EMBO ditetapkan untuk di-lock-up sampai dengan secepat-cepatnya akhir triwulan II tahun 2006 dan berdasarkan SK Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. No: 014-6/026 tanggal 15 Juni 2006 lock-up tersebut telah dibuka pada tanggal 3 Juli 2006.

Pada Oktober 2008, ADHI melakukan pembelian kembali saham. Berpedoman Peraturan Bapepam No.XI.B.3 tentang Pembelian Kembali Saham Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi

Pasar yang Berpotensi Krisis, Perseroan melakukan pembelian kembali (buy back) saham ADHI untuk periode 13 Oktober 2008 – 12 Januari 2009 sebanyak 40.001.000 saham atau senilai Rp8.705.681.000,- (delapan miliar tujuh ratus lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Perseroan melaksanakan Pembelian Kembali Saham tahap kedua pada periode 23 Januari 2009 – 22 April 2009, mengingat penggunaan dana pembelian kembali saham tersebut belum digunakan secara maksimal serta memperhatikan kondisi pasar yang masih belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Perseroan merencanakan untuk melakukan pembelian kembali saham ADHI sebanyak-banyaknya 320.263.000 (tiga ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu) saham. Dan sampai dengan akhir periode, ADHI telah melakukan pembelian kembali saham sebanyak 4.093.500 saham atau senilai Rp1.044.052.500,- (satu miliar empat puluh empat juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah). Sehingga total realisasi pembelian kembali saham (buy back) ADHI selama periode 13 Oktober 2008 sampai dengan 12 Januari 2009 dan periode 23 Januari sampai dengan 22 April 2009 adalah sebanyak 44.094.500 saham atau senilai Rp9,749 miliar.

Deskripsi	Jumlah Saham
Jumlah Saham diterbitkan (A)	1.801.320.000
Buyback	
• Periode I : (13/10/2008 - 12/01/2009)	40.001.000
• Periode II : (23/01/2009 - 22/04/2009)	4.093.500
Total Buyback (B)	44.094.500
Jumlah Saham beredar setelah Buyback (A)-(B)	1.757.225.500
<i>Harga rata-rata perolehan Buyback Rp221</i>	

KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN OBLIGASI

OBLIGASI IV ADHI TAHUN 2007

Perseroan telah menerbitkan Obligasi IV ADHI tahun 2007 sebesar Rp375.000.000.000,- dengan bunga tetap sebesar 11% per tahun. Jangka waktu Obligasi IV ADHI ini adalah

lima tahun terhitung sejak 6 Juli 2007 sampai dengan 6 Juli 2012. Rencana penggunaan dan hasil obligasi ini adalah untuk refinancing dan modal kerja.

SUKUK MUDHARABAH I ADHI TAHUN 2007

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi IV ADHI, Perseroan juga menerbitkan Sukuk Mudharabah I ADHI tahun 2007 sebesar Rp125.000.000.000,- dengan nisbah pemegang Sukuk sebesar 76,39%, Jangka waktu Sukuk ini adalah lima tahun terhitung sejak 6 Juli 2007 sampai dengan 6 Juli 2012. Rencana penggunaan dana hasil Sukuk ini seutuhnya untuk modal kerja.

Obligasi IV ADHI Tahun 2007 dan Sukuk Mudharabah I ADHI Tahun 2007 telah

dicatatkan dan diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia.

PT Pefindo telah melakukan pemeringkatan atas Obligasi IV ADHI Tahun 2007 dan Sukuk Mudharabah I ADHI Tahun 2007 dengan hasil: idA– (Single A Minus; Stable Outlook) dan idA(Sy)– (Single A Minus Syariah; Stable Outlook).

Hasil pemantauan pemeringkatan untuk periode 16 September 2009 – 1 Juni 2010 yang dilakukan oleh PT Pefindo, atas Obligasi IV ADHI Tahun 2007 mendapat peringkat idA– (Single A Minus; Negative Outlook) dan Sukuk Mudharabah I ADHI tahun 2007 mendapat peringkat idA(Sy)– (Single A Syariah Minus; Negative Outlook).

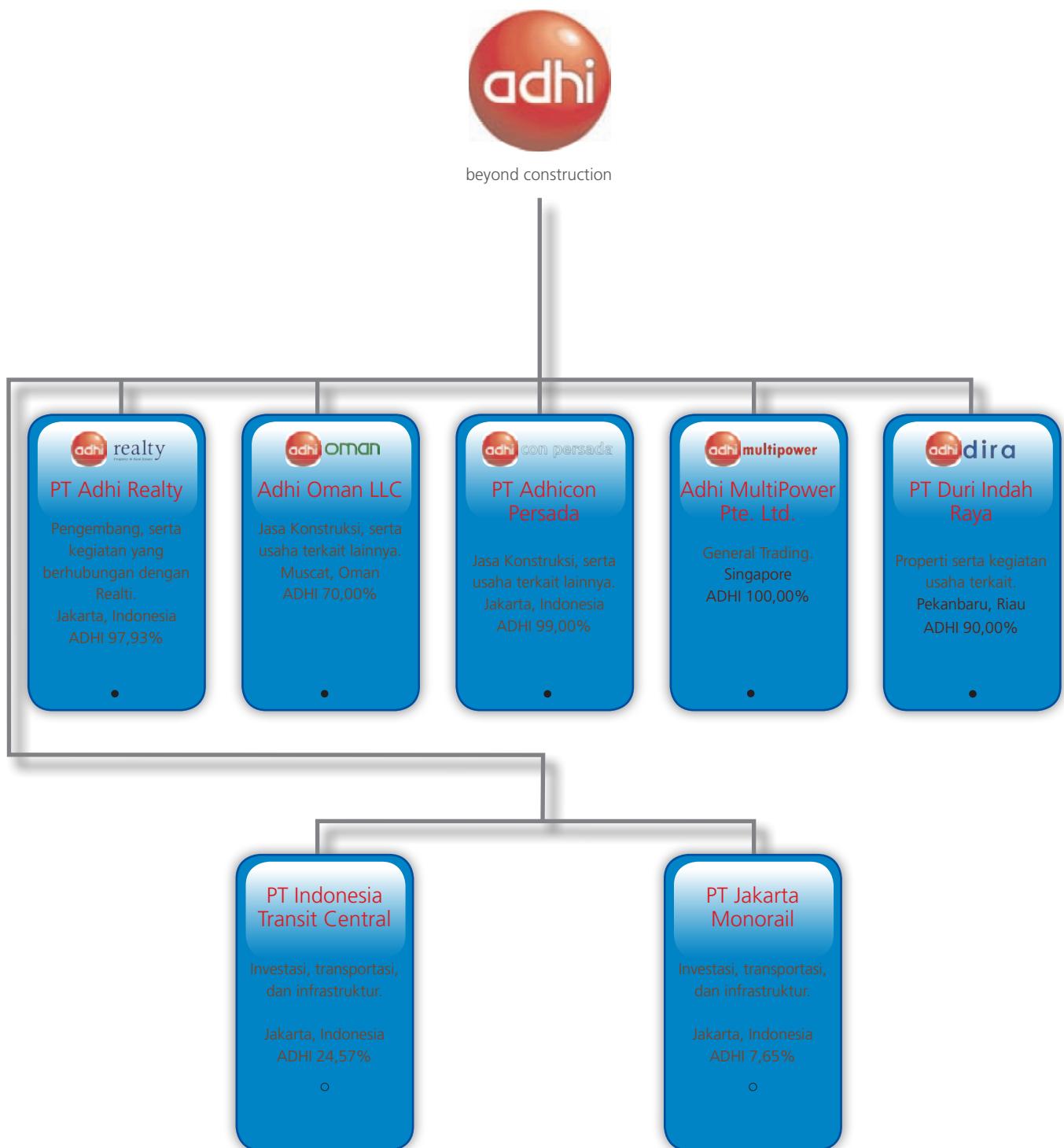
Negative Outlook tersebut dikarenakan *dispute* atas proyek Qatar yang diperkirakan akan berdampak negatif terhadap ADHI. Namun pencapaian kinerja tahun 2009 telah jauh melampaui target begitu pula diharapkan pada tahun-tahun mendatang, sehingga hasil pemantauan pemeringkatan berikutnya dapat jauh lebih baik.

Sampai dengan akhir tahun buku 2009 tidak ada tindakan korporasi terhadap penerbitan obligasi dan sukuk tersebut sehingga sejak awal pencatatan hingga saat tsb. tidak ada perubahan atas jumlahnya.

Profesi Penunjang Pasar Modal

Lembaga Penunjang	Nama Lembaga	Alamat
LEMBAGA PENUNJANG IPO		
Penjamin Pelaksana Emisi	PT Ciptadana Sekuritas	Citra Graha 8th Floor, Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 35-36 Jakarta 12950.
Akuntan Publik	Soejatna, Mulyana & Rekan	Ruko Taman Meruya Blok M/78, Jakarta 11620.
Konsultan Hukum	Gani Djemal & Partner	Gani Jemal Plaza 8th Floor, Jl. Jend Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Pusat.
Notaris	Imas Fatimah, SH.	Wisma Danamon Aetna Life 9th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav 45-46, Jakarta Pusat.
Biro Administrasi Efek	PT Datindo Entrycom	Wisma Diners Club annex, Jl. Jend. Sudirman 34, Jakarta 10220.
LEMBAGA PENUNJANG OBLIGASI IV ADHI TAHUN 2007 DAN SUKUK MUDHARABAH I ADHI TAHUN 2007		
Penjamin Pelaksana Emisi	PT Mandiri Sekuritas	Plaza Mandiri 28th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190.
Wali Amanat	PT Bank Mega Tbk.	Menara Bank Mega, 16th Floor, Jl. Kapten Tendean Kav. 12 -14A Jakarta 12970.
Akuntan Publik	HLB Hadiri & Rekan	Wisma Staco, 3rd Floor, Suite D, Jl. Casablanca Kav. 18, Jakarta 12870.
Konsultan Hukum	Priyadi & Co.	Rasuna Office Park IO-10, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta 12960.
Notaris	Poerbaningsih Adi Warsito, SH.	Jl. Panglima Polim V/11, Jakarta 12160.
Perusahaan Pemeringkat Efek	PT PEFINDO	Setiabudi Atrium 8th Floor, suite 809-810 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62, Jakarta 12920, Indonesia.
LEMBAGA PENUNJANG TAHUN 2009:		
Kantor Akuntan Publik	Husni, Mucharam dan Rasidi	Komplek Perkantoran Royal Palace Blok C-18 Jl. DR. Soepomo, SH., No. 178 A, Jakarta 12780.
Notaris	DR. A. Partomuan Pohan, SH., LL.M.	Jl. Wolter Mongonsidi No. 7, Kebayoran Baru, Jakarta 12110.
Biro Administrasi Efek	PT Datindo Entrycom	Wisma Diners Club annex, Jl. Jend. Sudirman 34, Jakarta 10220.

STRUKTUR PERSEROAN



● Beroperasi

○ Belum Beroperasi





ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

TINJAUAN UMUM

Dihadapkan pada berbagai tantangan serta ketidakpastian yang mewarnai dunia usaha dewasa ini, kemampuan menghasilkan pendapatan yang berkesinambungan (sustainable Income) semakin menjadi tuntutan dan prioritas setiap kegiatan Perseroan. Ke depan diharapkan Perseroan akan lebih selektif dalam memilih proyek, dengan mengutamakan pada proyek di dalam negeri yang sumber dananya jelas. Tentunya keputusan pengambilan proyek tersebut telah melalui kajian risiko dan tetap berdasarkan atas prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Perseroan pun menyadari bahwa persaingan di dunia bisnis semakin tinggi, begitu pun pada usaha jasa konstruksi yang menjadi core bussines Perseroan. Bisnis ini juga mempunyai risiko dengan berbagai kompleksitas usaha, untuk itu Perseroan mencoba untuk melakukan terobosan baru menciptakan unit bisnis lain yang lebih memberikan imbal yang cukup tinggi dan risiko yang rendah dengan melakukan diversifikasi usaha yaitu EPC dan Investasi. Walaupun

demikian bisnis Jasa Konstruksi masih menjadi pilihan utama Perseroan sebagai *core bussines*.

Perseroan berusaha fokus pada Growth yang diimbangi dengan upaya melakukan efisiensi yang dapat meningkatkan competitiveness Perseroan. Untuk mencapai hal tersebut, Perseroan bertekad meningkatkan kinerja internal dengan membentuk tim khusus yang fokus pada upaya peningkatan efisiensi, peningkatan kompetensi SDM, dan efisiensi biaya bunga dengan meningkatkan kesehatan cash flow Perseroan. Salah satu targetnya adalah dengan meningkatkan turn over dan menurunkan tingkat collection period.

Perseroan dalam Tahun Buku 2009 telah mampu meningkatkan kinerjanya, hal ini tampak dengan dicapainya Pendapatan Usaha Tahun Buku 2009 sebesar Rp7,715 triliun atau meningkat 16,18% dari sebelumnya serta Laba Bersih Tahun 2009 sebesar Rp165,5 miliar atau meningkat 103,15% dari tahun sebelumnya.

TINJAUAN KEUANGAN

PRODUKSI

Total Kontrak, termasuk Proyek Kerja Sama, yang dikerjakan Perseroan di tahun 2009 adalah sebesar Rp14.760.070 juta, naik 9,12% dari tahun 2008.

Dengan komposisi diantaranya Rp8.133.318 juta (55,10%) merupakan sisa kontrak tahun 2008 dan Rp6.626.752 juta (44,90%) adalah murni kontrak tahun ini.

Perolehan kontrak baru tahun 2009 dihasilkan diantaranya dari pekerjaan Infrastruktur jalan dengan diperolehnya Proyek SOR Gedebage Bandung dengan nilai kontrak Rp451 miliar, Taxiway Bandara Kuala Namu dengan nilai kontrak Rp382 miliar, Jalan Tol Semarang-Bawen dengan nilai kontrak Rp374 miliar, Kuningan City dengan nilai kontrak Rp252 miliar, pengadaan dan pemasangan ME Bandara Kuala Namu dengan nilai kontrak Rp180 miliar

Tabel Peningkatan Produksi (dalam juta Rp)

Tipe Proyek	Kontrak 2009	Persentase	Kontrak 2008	Persentase
Gedung	5.850.864	39,64	7.447.593	55,06
EPC	891.504	6,04	3.237.899	23,94
Infrastruktur	8.017.632	54,32	2.840.968	21,00
TOTAL	14.760.000	100,00	13.526.460	100,00

Tabel Pendapatan Usaha (dalam juta Rp)

Segmen Usaha	Pendapatan Usaha 2009	Persentase	Pendapatan Usaha 2008	Persentase
Jasa Konstruksi	6.800.697	88,15	5.996.273	91,31
EPC	215.348	2,79	300.098	4,52
Investasi	698.569	9,06	343.571	5,37
TOTAL	7.714.614	100,00	6.639.942	100,00

PENDAPATAN USAHA

Selama tahun 2009, ADHI berhasil membukukan Pendapatan Usaha sebesar Rp7.714.614 juta, meningkat 16,18% dari tahun 2008. Pendapatan Usaha ini berasal dari tiga segmen usaha, yakni Jasa Konstruksi, EPC, dan Investasi, dengan tipe proyek Gedung, EPC, dan Infrastruktur.

Kontribusi masing-masing segmen di tahun 2009 yaitu: Jasa Konstruksi 88,15% yang merupakan kontribusi terbesar adalah proyek jalan dengan adanya penerapan ACPS (Adhi Concrete Pavement System) yaitu sistem perkerasan kaku modular yang menggunakan metode beton pracetak dengan kekuatan pratekan sehingga pekerjaan proyek terutama proyek-proyek infrastruktur jalan tol lebih cepat, lebih baik dan lebih efisien, EPC 2,79% dengan kontribusi dari proyek-proyek EPC seperti PLTU Lampung dan Investasi 9,06% dengan kontribusi terbesar pada proyek-proyek realty & property serta jasa konstruksi anak perusahaan. Sedangkan kontribusi di tahun 2008 adalah Jasa Konstruksi 90,31%, EPC 4,52% dan Investasi 5,17%. Pendapatan Usaha dari sisa kontrak 2008 adalah sebesar Rp5.662.503 juta dan Pendapatan Usaha dari Kontrak Baru 2009 sebesar Rp2.052.111 juta.

PROFITABILITAS

Ditahun 2009 Laba Usaha Perseroan meningkat 45,91% dari tahun 2008, bahkan Laba Bersihnya meningkat sebesar 103,15% dari tahun 2008 hal ini disebabkan selain karena peningkatan pendapatan usaha juga karena adanya efisiensi (efisiensi beban kontrak, beban usaha, penurunan biaya bunga) dan peningkatan laba proyek kerjasama.

Rasio (%)	2009	2008
Net Profit Margin	2,15	1,23
Return on Assets	5,94	1,59
Return on Equity	27,08	19,22

PENINGKATAN/ PENURUNAN KAPASITAS PRODUKSI TIAP SEGMENT USAHA

Pendapatan Usaha Perseroan terdiri dari tiga segmen usaha yakni Jasa Konstruksi, EPC, dan Investasi. Segmen Jasa Konstruksi meningkat 13,42%, segmen EPC turun 28,24%, sedangkan segmen Investasi meningkat 103,33%. Peningkatan terbesar adalah pada segmen Jasa Konstruksi terutama pada proyek-proyek infrastruktur seperti Jalan Tol Kanci Pajagan yang menerapkan ACPS (Adhi Concrete Pavement System) yaitu sistem perkerasan kaku modular yang menggunakan metode beton

pracetak dengan kekuatan pratekan sehingga pekerjaan proyek terutama proyek-proyek infrastruktur jalan tol lebih cepat, lebih baik, dan lebih efisien,

BEBAN KONTRAK

Komponen beban kontrak terbesar adalah untuk pembelian bahan Rp 2.745.829,85 juta (38,90%), sub kontraktor Rp 1.997.215,63 juta (28,29%), upah Rp1.331.919,71 juta (18,87%), umum Rp558.366,13 juta (7,91%), dan peralatan Rp425.803,51 juta (6,03%).

URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN TOTAL AKTIVA

Di tahun 2009 Total Aset Perseroan adalah Rp5.629.454 juta terdiri dari 92,45% Aktiva Lancar dan 7,55% Aktiva Tidak Lancar. Nilai Total Aset ini meningkat Rp504.086 juta atau 9,84% dari Rp5.125.369 juta pada tahun 2008. Peningkatan yang cukup tinggi terdapat pada Piutang Prestasi dan Piutang Usaha masing-masing sebesar 19,46% dan 19,42%.

AKTIVA LANCAR

Aktiva Lancar Perseroan meningkat 11,85% menjadi Rp5.204.366 juta di tahun 2009 hal ini disebabkan karena

Perbandingan Beban Kontrak Tahun 2009 dan 2008



kenaikan Piutang Usaha 19,42% dan Piutang Prestasi 19,46%.

a. Kas dan Setara Kas

Pos ini terdiri dari Kas sebesar Rp26.117 juta dan Rp280.785 juta Setara Kas dalam Simpanan Giro dan Berjangka. Komposisi Simpanan Giro dan Berjangka ini adalah 87,45% Rupiah, 8,84% USD, 3,70% Real Oman, dan sisanya 0,0043% dalam mata uang Riyal Qatar dan Yen. Pos Setara Kas ini tersebar di 27 Bank yang berbeda dengan Suku Bunga rata-rata 5% - 10%. Kas dan Setara Kas mengalami penurunan 15,90% dari Rp364.904 juta pada tahun lalu, hal ini terjadi karena digunakan untuk pembayaran operasional proyek.

b. Piutang Usaha

Kenaikan Piutang Usaha 19,42% dari tahun lalu Rp1.116.259 juta menjadi Rp1.333.081 juta (net) di tahun ini tentunya berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Usaha Perseroan. Komposisi Piutang Usaha di tahun ini terdiri dari 26,44% Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan 73,56% Pihak Ketiga. Di tahun 2009 ini Perseroan mencadangkan Rp72.883 juta sebagai Penyisihan Piutang Ragu-ragu. Dari Rp72.883 juta ini, 91,77% -nya berasal dari Piutang Usaha Pihak Ketiga. Selanjutnya, untuk penghapusan Piutang Tak Tertagih hanya bisa dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

c. Piutang Retensi

Dibandingkan dengan tahun 2008, Piutang Retensi Perseroan mengalami kenaikan 21,91% menjadi Rp373.942 juta di tahun 2009. Sebesar Rp147.031 juta (39,32%) adalah Piutang Retensi kepada Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Rp226.911 juta (60,68%) kepada Pihak Ketiga. Rincian Piutang Retensi kepada Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa diantaranya adalah

Rp33.065 juta (8,84%) PT PLN (Persero), Rp28.935 juta (7,74%) Departemen Pekerjaan Umum, dan Rp21.007 juta (5,62%) Pemerintah Daerah Provinsi.

Sedangkan porsi Pihak Ketiga diantaranya adalah Rp48.996 juta (13,10%) Tilal Development Company LLC, Rp32.972 juta (8,82%) PT Cakrawala Bumimandala, dan Rp15.583 juta (4,17%) PT Zelan Priamanaya.

d. Tagihan Bruto Pada Pemberi Kerja

Tagihan Bruto Pada Pemberi Kerja meningkat sebesar Rp310.589 juta (19,46%) dari tahun 2008 Rp1.596.244 juta menjadi Rp1.906.832 juta di 2009. Komposisi di tahun 2009, sebesar Rp964.937 juta (50,60%) merupakan Tagihan Bruto Pada Pemberi Kerja Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, diantaranya kepada Departemen Pekerjaan Umum Rp328.640 juta (17,23%), PT Angkasa Pura (Persero) Rp164.725 (8,64%), Pemerintah Daerah Provinsi Rp90.075 (4,72%), Rp64.717 juta (3,39%) PT PLN (Persero) dan Rp59.548 juta (3,12%) PT Jasa Marga (Persero) Tbk, sedangkan sebesar Rp941.895 juta (49,40%) merupakan Tagihan Bruto Pada Pemberi Kerja Pihak Ketiga yang diantaranya adalah kepada Al Habtoor Engineering Enterprises LLC Rp221.846 juta (11,63%), Tilal Development Company LLC Rp147.373 (7,73%), sebesar Rp105.362 juta (5,53%) PT Jakarta Monorail, sebesar Rp96.571 juta (5,06%) PT Chevron Pacific Indonesia dan sebesar Rp 87.876 juta (4,61%) kepada PT Putra Pratama Sukses.

e. Persediaan

Penurunan Persediaan dari tahun lalu sebesar 15,95% dari Rp606.988 juta menjadi Rp510.174 juta di 2009. Komponen terbesar dalam penurunan ini adalah pemakaian bahan baku proyek konstruksi sebesar Rp125.830 juta dan

penurunan persediaan Gedung Menara MTH di Jalan MT Haryono sebesar Rp34.665 juta, meskipun ada juga kenaikan persediaan atas Gedung Mandau Town Square sebesar Rp51.806 juta dan kenaikan persediaan Apartemen Salemba sebesar Rp26.754 juta yang merupakan reklasifikasi dari biaya dibayar dimuka.

AKTIVA TIDAK LANCAR

Di tahun 2009, Aktiva Tidak Lancar Perseroan turun sebesar 10,01%, menjadi Rp425.088 juta. Hal ini dikarenakan adanya koreksi Aktiva Pajak Tangguhan sebesar Rp47.773 juta akibat penerapan PPh final jasa konstruksi dan adanya penjualan aktiva tanah, bangunan beserta peralatan pabrik yang ada di Cibitung yang masih mempunyai nilai buku Rp.15.602 juta dengan harga jual sebesar Rp60.000 juta.

TOTAL KEWAJIBAN

Total Kewajiban Perseroan di 2009 sebesar Rp4.888.581 juta terdiri dari Rp4.352.268 juta (89,03%) Kewajiban Lancar dan Rp536.313 juta (10,97%) Kewajiban Jangka Panjang. Total Kewajiban Perseroan meningkat 8,02% dari tahun 2008 Rp4.525.469 juta menjadi Rp4.888.581 juta.

KEWAJIBAN LANCAR

Di tahun 2009, Kewajiban Lancar Perseroan Meningkat 9,82% menjadi Rp4.352.268 juta. Komposisi dari Kewajiban Lancar Perseroan ini adalah Hutang Usaha 65,48%, Hutang Bank dan Non Bank 8,13%, Hutang Pajak 1,10%, Pendapatan Diterima Dimuka 2,15%, Uang Muka Kontrak 12,60%, Biaya Masih Harus Dibayar 5,73%, Bagian Kewajiban Jangka Panjang Yang Akan Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun 3,21%, dan Kewajiban Lancar Lain-Lain 1,60%. Pos-pos yang mengalami peningkatan/penurunan lebih dari 20% adalah Hutang Usaha naik 20,98%, Hutang Bank dan Non Bank naik 62,83%, Pendapatan Diterima di muka naik 70,87%, Uang Muka Kontrak turun 40,77%, Biaya Masih Harus Dibayar naik 38,69% dan

Bagian Kewajiban Jangka Panjang Yang Akan Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun naik 33,05%.

a. Hutang Usaha

Hutang Usaha Perseroan pada 2009 sebesar Rp2.849.718 juta, meningkat 20,98% dari tahun 2008 yang nilainya Rp2.355.605 juta. Berdasarkan Sifat Hubungannya, Hutang Usaha Perseroan terdiri dari Hutang Usaha Pada Pihak Hubungan Istimewa 4,50%, dan Hutang Kepada Pihak Ketiga 95,5%.

b. Hutang Bank

Hutang Bank meningkat cukup besar yakni 62,83%, dari tahun 2008 Rp217.250 juta menjadi Rp353.741 di tahun 2009. Hal ini terjadi karena adanya penambahan kredit modal kerja (KMK) Indonesia Exim Bank untuk proyek Jalan Tol Semarang-Bawen sebesar Rp100.000 juta dan kredit MML Bank CIMB Niaga untuk tambahan modal kerja sebesar Rp50.000 juta . Komposisi Hutang Bank di 2009 terdiri dari Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, yakni Bank Mandiri 35,62%, Bank BNI '46 1,17%, Bank BTN 0,57%, Bank Bumiputera 0,55%, dan Pihak Ketiga yakni Indonesia Eximbank 28,27%; Muscat Bank 19,69%; Bank CIMB Niaga 14,13%.

c. Hutang Pajak

Hutang Pajak Perseroan meningkat seiring dengan peningkatan Pendapatan Usaha. Hutang Pajak ini meningkat 14,09% dari tahun 2008 Rp42.144 juta menjadi Rp48.080 juta di tahun 2009.

d. Uang Muka Kontrak

Pos ini merupakan sisa Uang Muka dari Pemberi Kerja yang belum diperhitungkan secara proporsional dengan tagihan termin. Di tahun 2009 saldo Uang Muka Kontrak Rp548.889 juta, turun 40,77% dari tahun 2008 Rp926.156 juta.

Saldo Uang Muka yang cukup besar diantaranya adalah Uang Muka Kontrak atas Proyek PLTU Lampung Rp156.218 juta (28,48%) dari total saldo Uang Muka Kontrak 2009, Al Madina Real Estate (ADHI Oman) Rp88.208 juta (16,08%), Pasar Tanah Abang Blok B Rp28.823 juta (5,25%), Jalan Tol Semarang - Bawen Thp I Rp23.210 juta (4,23%), dan Kuningan City Rp22.281 juta (4,06%). Sedangkan penurunan yang cukup besar adalah Uang Muka Kontrak PLTU Lampung sebesar Rp97.440 jt (38,41%), BRR NAD & Nias sebesar Rp29.610 juta dan Puspem Badung Bali sebesar Rp26.811 juta.

e. Biaya yang Masih Harus Dibayar Pos Biaya yang Masih Harus Dibayar Rp249.233 juta terdiri dari Biaya Bunga Obligasi 5,15%, Biaya Operasional Proyek 52,14%, Biaya Pekerjaan Proyek 36,49% dan Cadangan Tantiem & insentif 6,23%. Pos ini naik 38,69% dari tahun 2008 Rp179.709 juta menjadi Rp249.233 juta di tahun 2009 seiring dengan kenaikan pendapatan usaha.

f. Hutang Lainnya

Pos Hutang Lainnya terhadap Total Kewajiban adalah 1,42%. Pos Hutang Lainnya ini turun 15,58% dari tahun 2008 Rp82.347 juta menjadi Rp69.519 juta di tahun 2009. Penurunan ini diantaranya disebabkan adanya penurunan Hutang Jangka Pendek Lainnya yang ada pada anak perusahaan.

KEWAJIBAN TIDAK LANCAR

Komposisi Kewajiban Tidak Lancar Perseroan sebesar Rp536.313 juta adalah Hutang Obligasi 93,00%, Kewajiban Imbalan Kerja 4,25%, dan Hutang Jangka Panjang Lainnya 2.75%. Kewajiban Tidak Lancar Perseroan turun 4,64% dari tahun 2008 Rp562.418 juta menjadi Rp536.313 juta di tahun 2009.

HAK MINORITAS ANAK PERUSAHAAN

Hak Minoritas Anak Perusahaan di tahun 2009 sebesar Rp9.673 juta, turun 38,07% dari tahun 2008 sebesar Rp15.620 juta. Penurunan Hak Minoritas Atas Anak Perusahaan berasal dari PT Duri Indah Raya turun sebesar Rp3.677 juta, ADHI – Oman LLC turun sebesar Rp2.680 juta, PT Adhi Realty naik sebesar Rp381 juta dan PT Adhicon Persada naik sebesar Rp28 juta.

EKUITAS

Ekuitas Perseroan meningkat 25,15% menjadi Rp731.200 juta dari tahun 2008 Rp584.279 juta, yang disebabkan oleh meningkatnya Saldo Laba Tidak Dicadangkan di tahun 2009 Rp162.178 juta dari Rp78.131 juta di tahun 2008 dan peningkatan di Saldo Laba Dicadangkan di tahun 2009 Rp366.690 juta dari Rp306.189 juta di tahun 2008.

PENDAPATAN USAHA

Di tahun 2009 ADHI membukukan Pendapatan Usaha sebesar Rp7.714.614 juta, hasil ini meningkat 16,18% dari tahun 2008 Rp6.639.942 juta. Kontribusi masing-masing segmen ditahun 2009 yaitu : 88,15% Jasa Konstruksi atau mengalami kenaikan 13,42% dari tahun 2008 sebesar 91,31%, segmen EPC yang mengalami penurunan sebesar 28,24% dari tahun 2008 dari 4,52% menjadi 2,79% ditahun 2009. Berbeda dengan segmen Investasi yang mengalami peningkatan sebesar 103,33% pada tahun 2009 yaitu dari 5,17% ditahun 2008 menjadi 9,06% ditahun 2009.

BEBAN KONTRAK

Beban Kontrak Perseroan ditahun 2009 sebesar Rp7.059.135 juta, meningkat 15,81% dibanding tahun 2008 Rp6.095.669 juta. Persentase kenaikan ini lebih kecil dari kenaikan Pendapatan Usaha Perseroan yang meningkat 16,18%, hal ini menunjukkan adanya efisiensi beban kontrak sebesar 0,3% dibandingkan dengan tahun 2008.

LABA (RUGI) PROYEK KERJA SAMA

Perseroan juga melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam mengerjakan proyek. Ditahun 2009 laba dari proyek-proyek kerja sama mencapai Rp96.401 juta atau mengalami kenaikan sebesar 241,27% dari tahun 2008 sebesar Rp28.246 juta.

Lima Proyek Kerja Sama Terbesar Tahun 2009 (dalam juta Rp)

Nama Proyek	2009
Pengadaan Tabung LPG 3 kg	26.730
Jembatan Suramadu	11.670
Rigid Taxiway Bandara Kualanamu	8.022
Dermaga Pantoloan	6.462
Bojonegoro Barrage LRSIP II	6.067

BEBAN USAHA

Terjadi kenaikan Beban Usaha di tahun 2009 menjadi Rp215.061 juta dari Rp204.613 juta di tahun 2008 atau naik sebesar 5,11%. Tetapi secara prosentase terhadap pendapatan usaha terjadi penurunan dari 3,08% ditahun 2008 menjadi 2,79% ditahun 2009, sehingga terdapat efisiensi sebesar 0,30%.

LABA BERSIH

Laba Bersih konsolidasi (setelah Pajak Penghasilan) Perseroan meningkat cukup besar 103,15% dari tahun 2008 Rp81.482 juta menjadi Rp165.530 juta

di 2009, hal ini disebabkan selain karena peningkatan pendapatan usaha juga karena adanya efisiensi (efisiensi beban kontrak, beban usaha, penurunan biaya bunga) dan peningkatan laba proyek kerjasama.

SOLVABILITAS DAN KOLEKTIBILITAS

Kemampuan Solvabilitas Perseroan meningkat dari 1,22 kali pada tahun 2008 menjadi 1,17 kali di tahun 2009, hal ini disebabkan oleh meningkatnya hutang bank masih lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan modal Perseroan akibat meningkatnya laba tahun 2009. Kemampuan Perseroan membayar bunga pinjaman meningkat dari 2,43 kali ditahun 2008 menjadi 3,99 kali ditahun 2009. Untuk tingkat Kolektibilitas Perseroan, ditahun 2009 adalah 62 hari sedangkan pada tahun 2008 adalah 61 hari, hal ini karena terdapatnya piutang yang baru jatuh tempo awal tahun 2010

Rasio	2009	2008
Debt to Equity Ratio (x)	1,17	1,22
TIE (x)	3,99	2,43
Collection Period (hari)	62	61

STRUKTUR MODAL PERSEROAN

Struktur modal Perseroan terdiri dari Modal Sendiri (7,95%), Utang berbunga

(Bank dan Obligasi) (15,14%) dan sisanya dari utang usaha, uang muka dan lainnya (76,91%) dari total asset Perseroan. Permodalan Perseroan masih ditopang oleh pembiayaan dari leveransir.

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Perusahaan telah menetapkan suatu kebijakan atas Struktur Modal Perseroan yaitu Struktur Utang terhadap Modal atau Debt Equity Ratio (DER) yang tidak boleh melebihi 3,5 kali tetapi harus memperhatikan kemampuan Perseroan dalam membayar Bunga Bank atau Time Interest Earning (TIE) harus lebih besar dari 1,85 kali. Realisasi pada tahun 2009 untuk DER 1,17 kali dan TIE sebesar 3,99 kali

TINGKAT LIKUIDITAS PERSEROAN

Kemampuan Perseroan untuk membayar Kewajiban Lancarnya dari Aktiva Lancarnya (Likuiditas) harus lebih besar dari 1,1 kali. Realisasi Likuiditas pada tahun 2009 sebesar 1,20 kali masih di atas rasio yang ditetapkan Perseroan.

Rasio	2009	2008
Rasio Lancar (%)	119,58%	117,41%
Modal Kerja (juta Rp)	852.098	689.926

Neraca Konsolidasian (dalam juta Rp)

Deskripsi	2009	2008	Naik / (Turun)	Pertumbuhan (%)
Aktiva Lancar	5.204.366	4.652.976	551.390	11,85
Aktiva Tidak Lancar	425.088	472.392	(47.304)	-10,01
Total Aktiva	5.629.454	5.125.369	504.085	9,84
Kewajiban Lancar	4.352.268	3.963.051	389.217	9,82
Kewajiban Tidak Lancar	536.313	562.418	(26.105)	-4,64
Hak Minoritas pada Anak Perusahaan	9.673	15.620	(5.947)	-38,07
Ekuitas	731.200	584.279	146.921	25,15
Total Kewajiban dan Ekuitas	5.629.454	5.125.369	504.085	9,84

IKATAN MATERIAL DALAM INVESTASI BARANG MODAL

Tidak ada ikatan material dalam investasi barang modal.

INFORMASI KEUANGAN DENGAN KEJADIAN LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

Tidak terdapat kontribusi material dari kejadian luar biasa selama tahun 2009.

INFORMASI MATERIAL TENTANG INVESTASI DAN DIVESTASI

Guna meningkatkan produktivitas, Perseroan telah melakukan investasi berupa peralatan proyek, kendaraan dan peralatan kantor sebesar Rp9.072 juta yang sumber dananya berasal dari laba penjualan aktiva tetap. Investasi Aktiva Tetap sebesar Rp9.072 juta atau turun 82,37% dari tahun 2008 yang sebesar Rp51.448 juta, sehingga nilai akhir 2009 untuk Investasi Aktiva Tetap adalah Rp278.245 juta (sebelum dikurangi akumulasi penyusutan). Komposisi Investasi Aktiva Tetap Rp9.072 juta tersebut terdiri dari 60,70% peralatan proyek, 7,46% kendaraan, 4,91% peralatan kantor, dan Akt SGU - Kendaraan 26,94%

Divestasi aktiva tetap Perseroan selama tahun 2009 adalah penjualan atas tanah, bangunan pabrik dan peralatan pabrik yang ada didalamnya di daerah Cibitung seharga Rp60.000 juta dengan nilai buku Rp15.602 juta sehingga terdapat laba sebesar Rp44.398 juta.

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG KEPENTINGAN PIHAK-PIHAK AFILIASI

Sifat hubungan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah RI diwakili oleh Menteri BUMN merupakan pemegang saham Perusahaan dan BUMN lain memiliki hubungan afiliasi melalui penyertaan modal Pemerintah RI.
- b. Perusahaan yang menempatkan dana dan memiliki pinjaman dana pada bank-bank yang dimiliki oleh Pemerintah atau dari bank-bank yang dimiliki oleh BUMN dengan persyaratan dan tingkat bunga normal sebagaimana yang berlaku untuk nasabah pihak ketiga.
- c. Perusahaan yang mengadakan perjanjian dalam rangka usaha, dengan BUMN-BUMN lain maupun anak perusahaan BUMN serta badan-badan lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang.

d. Mempunyai anggota pengurus yang sama dengan Perusahaan Anak, yaitu Direksi Perusahaan menjadi Komisaris pada Perusahaan Anak.

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Perseroan yang kontribusi paling besar terhadap asset Perseroan adalah Departemen Pekerjaan Umum dengan hubungan sebagai pemberi kerja pada Perseroan sebesar 5,84% pada Tagihan Bruto Pemberi Kerja terhadap Total Aset Perseroan. Sedangkan hubungan dalam pembiayaan/permodalan atau transaksi rekening Koran dengan Perseroan adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan kontribusi terhadap total asset sebesar 2,24%.

ASET DAN KEWAJIBAN DALAM MATA UANG ASING

Transaksi valuta asing dibukukan setelah dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi.

Pada setiap tanggal neraca:

1. Pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tanggal neraca.
2. Pos non moneter tidak boleh dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal neraca tetapi tetap harus dilaporkan dengan

Laba Rugi Konsolidasian (dalam juta Rp)

Deskripsi	2009	2008	Naik/(Turun)	Pertumbuhan (%)
Pendapatan Usaha	7.714.614	6.639.942	1.074.672	16,18
Beban Kontrak	(7.059.135)	(6.095.669)	963.466	15,80
Laba Kotor	655.479	544.273	111.206	20,43
Laba Kotor Setelah Proyek Kerja Sama	751.880	572.521	179.359	31,33
Beban Operasi	(215.061)	(204.613)	10.448	5,11
Laba Operasi	536.819	367.908	168.911	45,91
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(97.200)	(139.079)	(41.879)	(30,11)
Beban Bunga (net)	(107.846)	(106.289)	1.557	1,46
Laba Sebelum Pajak	331.773	122.539	209.234	170,75
Pajak	(168.850)	(39.545)	129.305	326,98
Hak Minoritas Atas Laba Anak Perusahaan	2.606	(1.512)	4.118	272,37
Laba Bersih	165.530	81.482	84.048	103,15

menggunakan kurs tanggal transaksi.

3. Pos non moneter yang dinilai dengan nilai wajar dalam mata uang asing harus dilaporkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat nilai tersebut ditentukan.

Deskripsi	Aset	Kewajiban
US\$	98.126.222	55.662.974
Yen	65.291	-
Singapore \$	50	-
Riyal Oman	10.433.830	10.433.830

URAIAN KOMPONEN-KOMPONEN SUBSTANSIAL DARI PENDAPATAN (BIAYA) LAINNYA

PENDAPATAN (BEBAN) LAINNYA

Ditahun 2009, Pendapatan (Beban) Lain-lain Perseroan turun 30,11% dari Beban Lainnya sebesar (Rp139.079 juta) di tahun 2008 menjadi Beban lainnya sebesar (Rp97.200 juta). Pendapatan (Beban) Lain-lain tahun 2009 dikarenakan adanya pembebanan pencairan jaminan pelaksanaan proyek Qatar sebesar Rp89.762 juta, penyisihan piutang proyek Qatar sebesar Rp23.478 juta dan penyisihan beberapa proyek lainnya dengan jumlah penyisihan sebesar Rp27.954 serta adanya beban provisi dan administrasi bank sebesar Rp25.445 juta. Selain itu dalam pendapatan (bebannya) terdapat pendapatan atau laba atas penjualan aktiva tetap sebesar Rp44.398 juta. Penjelasan secara lengkap tentang penyisihan dapat dilihat pada Catatan Laporan Keuangan No. 5 dan 7.

BEBAN KEUANGAN

Beban Bunga Perseroan ditahun 2009 mengalami kenaikan sebesar Rp1.557 juta dari Rp106.289 juta ditahun 2008 menjadi Rp107.846 juta di tahun 2009, tetapi secara prosentase terhadap pendapatan usaha ada penurunan dari

1,60% ditahun 2008 menjadi 1,40% ditahun 2009, yang terdiri dari beban bunga kredit bank sebesar Rp52.846 juta dan beban bunga obligasi & sukuk sebesar Rp55.000 juta.

PENINGKATAN ATAU PENURUNAN YANG MATERIAL DARI PENDAPATAN USAHA ATAU PENDAPATAN BERSIH

Peningkatan pendapatan usaha terbesar selama tahun 2009 adalah kepada PT Semesta Marga Raya atas proyek Jalan Tol Kanci-Pejagan sebesar Rp673.538 juta dari tahun 2008 sebesar Rp618.535 menjadi sebesar Rp1.292.072 juta ditahun 2009.

DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENDAPATAN USAHA/ PENDAPATAN BERSIH SERTA LABA OPERASI (2009-2008)

Tidak terdapat dampak perubahan harga yang signifikan terhadap pendapatan usaha / pendapatan bersih selama tahun 2009.

PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Sampai dengan dibuat Laporan per 31 Desember 2009 ada beberapa kejadian penting setelah tanggal neraca diantaranya :

Pada tanggal 27 Januari 2010, PT Adhi Karya (Persero) Tbk beserta Para Pemegang Saham mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan di Kantor Pusat PT Adhi Karya (Persero) Tbk Jl. Pasar Minggu Km.18, dengan hasil RUPSLB menetapkan perubahan susunan Direksi dan Komisaris dengan adanya penambahan 1 (satu) orang Direksi dan Komisaris baru sehingga susunan komisaris dan direksi setelah RUPS Luar Biasa tersebut adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama :	Imam Santoso Ernawi
Komisaris :	Harry Susetyo Nugroho
Komisaris :	Gatot Trihargo
Komisaris Independen :	Murhadi
Komisaris Independen :	Amir Muin

Dewan Direksi

Direktur Utama :	Bambang Triwibowo
Direktur Operasi I :	Indradjaja Manopol
Direktur Operasi II :	Bambang Pramusinto
Direktur Pengembangan Usaha :	M. Fauzan
Direktur Keuangan dan SDM :	Supardi

Pada tanggal 11 Desember 2009 telah dikeluarkan Surat Ketetapan Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun 2007 dengan nilai lebih bayar sebesar Rp35.626.132.100 yang diterima pencairannya di bulan Januari 2010.

Pada tanggal 19 Februari 2010 dikeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010. Dalam Instruksi Presiden RI tersebut proyek monorail termasuk dalam prioritas di bidang infrastruktur, dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

- Perhitungan investasi atas proyek monorail yang telah dilakukan selambat-lambatnya diselesaikan akhir Maret 2010.
- Konsep dan proposal pembangunan proyek monorail ditargetkan selesai bulan Agustus 2010.

Pada tanggal 2 Februari 2010 Perseroan dan Lapindo Brantas Inc. membuat Kesepakatan Penyelesaian Utang Nomor: AGR-021/FIN/2010 - 017-0/008A (Catatan 57) dengan cara pelunasan yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1 sebagai berikut:

- Pembayaran tunai sebesar Rp1.247.887.380 selambat-lambatnya pada tanggal 19 Februari 2010.
- Sisanya sebesar Rp23.709.860.232 akan dilakukan pelunasan dengan penyerahan aset milik Lapindo Brantas Inc. yang berupa Kavling Siap Bangun yang terletak di daerah Graha Kota dan Pager Wojo, Sidoarjo, Jawa Timur selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2010
- Pembayaran tagihan PPN 10% sebesar Rp8.896.843.408 dibayarkan tunai selambat-lambatnya pada saat penyerahan fisik aset.

Pada tanggal 17 Maret 2010 Lapindo Brantas Inc. telah melakukan pembayaran tunai sebesar Rp. 623.778.973,00 dan sisanya sebesar Rp623.778.973 akan dibayar akhir bulan Maret 2010.

PROSPEK USAHA

Kinerja positif Perseroan yang berhasil dibukukan di tahun 2009 sebagaimana yang sudah dipaparkan dalam Laporan Direksi pada Laporan Tahunan ini menunjukkan bahwa situasi dan kondisi perekonomian nasional khususnya pada industri jasa konstruksi sudah mulai membaik meskipun saat itu perekonomian nasional masih mengalami fase recovery akibat dari krisis keuangan global yang terjadi di semester kedua tahun 2008.

Antisipasi yang dilakukan manajemen dalam upaya menghadapi tantangan industri jasa konstruksi di tahun lalu, ternyata berhasil membawa prestasi kinerja yang memuaskan. Efisiensi dan produktifitas perusahaan ditingkatkan sehingga terjadi penghematan-penghematan yang secara overall

memberikan dampak yang signifikan kepada Perseroan. Struktur biaya yang sehat diharapkan akan terus terjaga dan semakin membaik di periode-periode selanjutnya.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2009 mencapai 4,5% dengan tingkat inflasi yang cukup rendah 2,8% sedangkan BI Rate berada di tingkat 6,5% di akhir tahun lalu. Pertumbuhan ekonomi nasional termasuk dalam top three kinerja ekonomi negara-negara emerging market, di bawah Cina dan India. Artinya bahwa, di tengah kondisi perekonomian global yang sedang recovery, Indonesia berhasil menggerakkan roda perekonomian dengan sukses. Lebih mikro, laju pertumbuhan sektor konstruksi pada tahun lalu mencapai 10% atau memiliki kontribusi sebesar 0,4% dari Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) 2009. Sektor ini pula mampu menyerap tenaga kerja langsung hingga 4%-5%.

Perseroan melihat prospek bisnis ke depan akan semakin membaik. Hal ini tidak tanpa alasan karena ada dua alasan utama yaitu faktor eksternal, meningkatnya permintaan dari pemerintah dan swasta; dan faktor internal, Perseroan akan mengembangkan inovasi-inovasi baru melalui Departemen Riset & Teknologi sehingga akan tercipta metode-metode kerja yang lebih efektif dan efisien seperti halnya keunggulan kompetitif ADHI pada pekerjaan jalan tol yaitu ACPS (Adhi Concrete Pavement System).

Di dalam APBN-P tahun 2010, Pemerintah menargetkan pertumbuhan PDB 5,5%, Inflasi 5,7%, dan BI Rate pada level 7,0%. Potensi kenaikan inflasi di tahun ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Namun, sejumlah program pembangunan siap dijalankan Pemerintah seperti proyek-proyek infrastruktur jalan tol, pembangkit listrik, agar supaya perekonomian tetap tumbuh melalui penciptaan lapangan kerja.

Nilai proyek konstruksi di tahun 2010 diproyeksikan akan mencapai Rp170 triliun dimana 55% diantaranya adalah proyek-proyek APBN/APBD dan sisanya adalah proyek-proyek swasta. Pemerintah menawarkan 100 proyek kemitraan pemerintah-swasta atau yang dikenal dengan Public Private Partnership (PPP) untuk periode 2010-2014 dengan nilai US\$47,3 miliar yang terdiri dari sektor transportasi udara/darat/laut, rel kereta api, jalan tol, penyediaan air, sanitasi & manajemen sampah, dan pembangkit listrik (PPP Book 2010). Sementara itu, Kementerian PU juga menawarkan 42 proyek senilai Rp159 triliun terdiri dari proyek jalan tol dan pengolahan air minum.

Menurut Bappenas diperlukan total dana investasi sebesar Rp2.000 triliun atau setara 5% dari PDB untuk mempercepat pembangunan infrastruktur selama periode 2010-2014. Melihat potret tersebut di atas, Perseroan optimis dalam pencapaian target tahun ini yang tercermin dari komposisi atas target Pendapatan Usaha tahun 2010 dimana 65% disumbangkan dari proyek pemerintah dan 35% adalah proyek swasta. Untuk target perolehan kontrak, Perseroan menargetkan Rp9,8 triliun kontrak baru diperoleh di tahun ini. Sehingga diharapkan order book tahun 2010 mencapai Rp15,6 triliun.

Perseroan juga menyadari bahwa sejumlah kendala klasik dapat mengganggu program percepatan infrastruktur Pemerintah. Pembebasan lahan (land acquisition) untuk jalan tol misalnya. Hingga saat ini kemajuan proses pembebasan lahan tol Trans Jawa baru mencapai 30,38% dari total lahan yang harus dibebaskan sekitar 4.500 hektare (ha). Keterbatasan finansial dan masalah di lapangan seperti spekulan tanah, penolakan dari pemilik lahan (landowner), membuat progres pembebasan lahan sangat lambat. Diperlukan peraturan terobosan baru dan koordinasi antar instansi terkait sehingga eksekusi di lapangan bisa terkoordinir dengan rapi dan efektif.

Disamping itu untuk proyek pembangkit listrik, pemerintah dalam waktu dekat akan mengadakan proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW tahap dua. Diperkirakan total investasi untuk tahap kedua ini bisa mencapai US\$16,343 miliar. Perseroan juga membidik proyek ini, dan mengupayakan kerja sama operasi (Joint Operation) dengan mitra yang sarat pengalaman di bidang EPC agar dapat memenangkan tender-tender yang ditawarkan.

Sedangkan untuk pasar luar negeri, untuk saat ini Perseroan masih fokus pada penyelesaian proyek-proyek yang sedang berjalan (existing) yaitu di Oman dan India. Melalui anak perusahaan Adhi Oman LLC., saat ini ADHI sedang menyelesaikan pembangunan proyek Mix-Use Complex yaitu hotel, apartemen, dan shopping mall Tilal Complex at Al-Khuwair serta proyek Shadden Al Hail. Ke depan, ADHI akan menerapkan strategi Joint Venture dengan perusahaan lokal setempat dalam mengerjakan proyek-proyek di luar negeri seperti di kawasan Timur Tengah.

Melalui strategi pemilihan proyek yang selektif, pemilihan mitra yang kompeten

khususnya untuk pekerjaan proyek EPC, pengendalian biaya yang lebih baik lagi, dan tentunya inovasi akan teknologi maupun metode kerja, diharapkan kinerja tahun 2010 akan lebih baik lagi dan dapat meningkatkan nilai bagi para pemegang saham.

ASPEK PEMASARAN

Portofolio realisasi perolehan kontrak baru tahun 2009 masih didominasi oleh proyek-proyek infrastruktur yang menghasilkan Pendapatan Usaha dengan portofolio proyek infrastruktur sebesar 54% diikuti dengan proyek-proyek gedung sebesar 39% dan sisanya sebesar 7% adalah proyek EPC.

Dari sisi pemilik proyek, portofolio proyek swasta meningkat menjadi 44% dibandingkan proyek pemerintah sebesar 56%. Hal ini dikarenakan terdapat proyek pembangunan jalan tol Kanci-Pejagan yang dimiliki oleh swasta senilai Rp2 triliun

Posisi proyek carry over dari tahun 2009 yang dibawa ke tahun 2010 adalah sebesar Rp5,75 triliun yang terdiri dari proyek Non Joint Operation sebesar Rp4,34 triliun dan proyek Joint Operation sebesar Rp1,41 triliun.

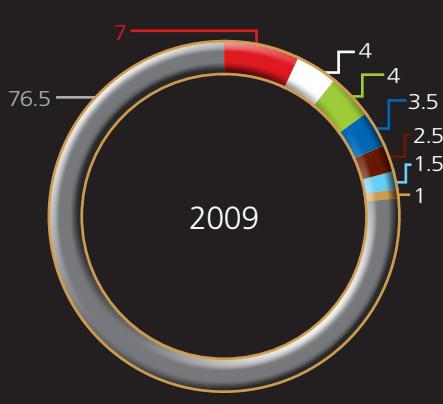
DIVIDEN

Pada tahun buku 2007, Perseroan menerapkan kebijakan pembagian dividen sebesar 25% dari Laba Bersih Rp111.601 juta dikurangi laba dari Pendapatan Usaha aktiva sebesar Rp 5.122 juta, menjadi sebesar Rp26.620 juta (Rp14,78/saham) yang dibayarkan tanggal 25 Juli 2008. Untuk tahun buku 2008, Perseroan menerapkan kebijakan pembagian dividen sebesar 25% dari Laba Bersih Rp81.482 juta menjadi sebesar Rp20.371 juta (Rp11,51/saham) yang dibayarkan tanggal 11 Agustus 2009.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Obligasi IV ADHI Tahun 2007 Realisasi penggunaan dana dari Obligasi IV ADHI Tahun 2007 adalah sebagai berikut: (i) Pelunasan hutang Perseroan berdasarkan Obligasi III Adhi Karya yang jatuh tempo pada tanggal 13 Juli 2007 sekitar Rp173 miliar; (ii) Pelunasan Hutang Bank Perseroan di PT Bank Syariah Mandiri sekitar sekitar Rp100 miliar. Hutang Bank tersebut adalah hutang modal kerja dengan ekspektasi nisbah bagi hasil ekuivalen

Pangsa Pasar Konstruksi 2009



- Lain-lain 76,5
- ADHI 7
- A : 4
- B : 4
- C : 3,5
- D : 2,5
- E : 1,5
- F : 1

Tabel Dividen

Rasio	2008	2007
Laba Bersih (Rp)	81.482.495.008	111.601.403.512
Dividen (Rp)	20.370.623.752	26.619.838.290
Dividen per Saham (Rp)	11,59	14,78
Payout Ratio (%)	25,00	23,85

dengan suku bunga sebesar 13,00% per tahun, dimana hutang tersebut dapat dilunasi sewaktu-waktu; dan (iii) Sisanya digunakan untuk modal kerja.

Tidak ada perubahan dari rencana dalam merealisasikan penggunaan dana. Biaya emisi obligasi sebesar Rp1.745 juta diamortisir setiap bulan sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 6 Juli 2012.

Sukuk Mudharabah I ADHI Tahun 2007 Realisasi penggunaan dana dari Sukuk Mudharabah I ADHI Tahun 2007 adalah seluruhnya digunakan untuk modal kerja proyek jasa konstruksi dan tidak ada perubahan dalam realisasi penggunaan dana dari rencana awal.

Biaya emisi dari Sukuk Mudharabah I ADHI adalah sebesar Rp665 juta, diamortisir tiap bulan sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 6 Juli 2012.

Selain penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi dan Sukuk tsb. di atas, Perseroan juga telah menggunakan dana hasil IPO sesuai dengan prospektus yang telah diterbitkan tanggal 9 Maret 2004. Dana hasil penawaran umum yang diperoleh tsb. saat ini seluruhnya telah dipergunakan. Hal tsb. telah disampaikan melalui surat No. 062/SP-IV/09 tanggal 27 April 2009.

INFORMASI MATERIAL LAIN

ADHI melakukan transaksi dengan Perusahaan Asosiasi PT Jakarta Monorail yang telah dilakukan pada tahun 2004 senilai US\$200 juta, pada tahun 2007 statusnya masih berjalan.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANGAN/ REGULASI BARU YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN

Dalam tahun 2009, terdapat beberapa peraturan atau ketentuan yang dapat memberi dampak signifikan terhadap kinerja ADHI, perubahan peraturan tersebut adalah

perubahan peraturan dibidang Pasar Modal, adalah :

1. Keputusan Ketua Bappepam dan LK Nomor : Kep-429/BL/2009, tanggal 9 Desember 2009, tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Peraturan Bapepam LK. No. IX.D4), yang merupakan perubahan atas Keputusan Ketua Bappepam dan LK Nomor : Kep-44/ PM/1998 tanggal 4 Agustus 1998.

Secara garis besar perubahan-perubahan yang ada pada Peraturan IX.D.4, meliputi:

- Perubahan jangka waktu penambahan modal;
- Perubahan persentase maksimum penambahan modal;
- Penambahan kewajiban pengumuman pelaksanaan dan hasil pelaksanaan penambahan modal tanpa HMETD.

Peraturan ini khususnya ketentuan tentang persentase penambahan modal maksimum akan memberikan dampak yang positif bagi ADHI, karena ketentuan tersebut akan memperbesar jumlah alternatif

pendanaan melalui pasar modal

2. Keputusan Ketua Bappepam dan LK Nomor : Kep-412/BL/2009, tanggal 25 Nopember 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, (Peraturan Bapepam LK. No. IX.E.1) yang merupakan perubahan atas Keputusan Ketua Bappepam dan LK Nomor : Kep-521/BL/2008.

Perubahan Peraturan IX.E.1 menyebabkan perubahan paradigma signifikan sebagai berikut:

- Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan bukan hanya berasal dari Transaksi Afiliasi namun juga dapat berasal dari transaksi dengan pihak ketiga;
- Emiten memiliki tanggung jawab yang besar untuk menentukan mana transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan mana yang tidak;

Peraturan ini akan memberikan dampak waktu yang lebih panjang, mengingat Transaksi Afiliasi yang dilakukan ADHI bertujuan untuk mendukung kegiatan operasional ADHI guna pencapaian laba, sehingga dengan adanya perubahan peraturan ini, yang mewajibkan menyampaikan keterbukaan kepada Bapepam-LK dan Bursa Efek, dan mengumumkan melalui media massa, akan memakan biaya dan waktu yang relatif lama.

3. Keputusan Ketua Bappepam dan LK Nomor : Kep-413/BL/2009, tanggal 25 Nopember 2009, tentang Transaksi

Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, (Peraturan Bapepam LK. No. IX.E.2)yang merupakan perubahan atas Keputusan Ketua Bappepam dan LK Nomor : Kep-02/ PM/2001.

Berbeda dengan peraturan sebelumnya, peraturan IX.E.2 yang baru ini secara definitif menguraikan transaksi-transaksi apa saja yang masuk di dalam Transaksi Material, yaitu:

- Pembelian saham termasuk dalam rangka pengambilalihan;
- Penjualan saham;
- Penyertaan pada badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu;
- Pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar atas segmen usaha atau aset selain saham;
- Sewa menyewa aset;
- Pinjam meminjam dana;
- Menjaminkan aset; dan/atau memberikan jaminan perusahaan, dengan nilai 20% atau lebih dari ekuitas Perusahaan, yang dilakukan dalam satu kali atau dalam suatu rangkaitan transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu.

Dari sisi besarnya Nilai Transaksi, Transaksi Material dibedakan menjadi dua, yaitu:

- Transaksi Material dengan nilai transaksi 20% sampai dengan 50% dari ekuitas Perusahaan;
- Transaksi Material dengan nilai transaksi di atas 50% dari ekuitas Perusahaan.

Peraturan ini khususnya ketentuan yang membedakan Transaksi Material atas dasar Nilai Transaksi, memberikan keleluasaan bagi manajemen ADHI dalam melaksanakan transaksi-transaksi yang nilai transaksinya antara 20% sampai dengan 50% dari ekuitas Perusahaan saja, karena untuk melaksanakan transaksi dengan nilai tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari RUPS. Sedangkan untuk transaksi yang nilainya > 50% dari ekuitas, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari RUPS.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

ADHI CORPORATE GOVERNANCE

ADHI beserta seluruh jajaran berkomitmen penuh dalam melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) dalam setiap kegiatan bisnisnya. Implementasi GCG akan memberikan dampak positif dalam pengembangan potensi bisnis dan peningkatan kinerja ADHI secara berkesinambungan.

Nilai-nilai yang terkandung pada Adhi Principles merupakan komitmen ADHI dalam melaksanakan prinsip GCG tsb., dimana seluruh insan ADHI harus tegas dan konsisten memegang prinsip tata kelola perusahaan yang baik sehingga akan memperkuat daya saing ADHI.

Perwujudan implementasi GCG di lingkungan ADHI ditunjukkan dalam:

1. Pelaksanaan Job Description Dewan Komisaris dan Anggota Direksi.
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal perseroan.
3. Penerapan fungsi kepatuhan melalui audit internal dan audit eksternal.
4. Implementasi pengelolaan manajemen risiko.
5. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan perseroan.

Hasil implementasi GCG di lingkungan ADHI diwujudkan dengan telah dilaksanakannya assessment GCG sesuai standar kriteria Kementerian BUMN untuk periode tahun 2009 oleh Sodiq, Purwoko & Associates Consulting dengan pencapaian nilai 90,13 atau mencapai kualifikasi sangat baik. Demikian pula penghargaan dari pihak eksternal, baik dari kalangan pemerintah otoritas perbankan, Pasar Modal, maupun lembaga independen. ADHI meraih predikat Perusahaan Terpercaya dari

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) yang bekerja sama dengan Majalah SWA dengan perolehan skor 81,54. Memperoleh penghargaan Best Disclosure & Transparency dari The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) yang bekerja sama dengan majalah Business Review. ADHI juga menduduki Peringkat I untuk Kategori BUMN Non Keuangan Listed dalam Annual Report Award dan sekaligus menjadi Juara Umum Ketiga dalam penghargaan tsb. Hal ini menunjukkan komitmen Perseroan beserta seluruh jajarannya sebagai tanggung jawabnya dalam transparansi dan keterbukaan informasi.

Untuk mengoptimalkan penerapan GCG, ADHI memiliki strategi yaitu tersedianya Manual Perusahaan berikut peraturan dan prosedur internal lainnya; GCG Manual, Board Manual yang mengatur hubungan antarkomisaris, antardirektur, dan antara Dewan Komisaris dengan Direksi, serta hubungan antara Direksi Perseroan dengan Direksi/Dewan Komisaris Anak Perusahaan; Komite-Komite sebagai perangkat Komisaris serta Corporate Secretary.

LANDASAN PENERAPAN GCG

Prinsip tata kelola perusahaan yang diacu oleh ADHI dalam penerapan GCG adalah transparansi (transparency),

akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responsibility), kemandirian (independency), serta kewajiban dan kesetaraan (fairness) yang diperkenalkan oleh Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) dan Komite Nasional GCG (KN-GCG). Pelaksanaan GCG oleh ADHI mengacu pada Keputusan Menteri Negara BUMN No. 117M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002.

STRUKTUR TATA KELOLA

Struktur tata kelola ADHI terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi sebagai organ Perseroan dengan dilengkapi komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang terdiri dari Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Manajemen Risiko, dan Komite Kebijakan Corporate Governance, Internal Auditor, Risk Management Department serta Corporate Secretary.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Anggota Dewan Komisaris serta Anggota Direksi Perseroan, menentukan besarnya kompensasi para Komisaris dan Direktur, menilai kinerja Perseroan selama tahun fiskal melalui sejumlah evaluasi,

mengesahkan perubahan Anggaran Dasar, memberikan persetujuan atas laporan tahunan, menunjuk akuntan publik, dan memutuskan jumlah penggunaan laba perusahaan. RUPS merupakan otoritas dan struktur tertinggi pada perusahaan, serta merupakan forum utama dimana para pemegang saham dapat menggunakan hak dan otoritasnya pada Perseroan. RUPS Tahunan diselenggarakan setiap tahun sekali, sedangkan RUPS Luar Biasa dapat dilakukan setiap saat apabila dipandang perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham. Forum ini juga merupakan otoritas tertinggi dimana sejumlah resolusi penting diputuskan dan disahkan untuk kemudian menjadi kebijakan resmi Perseroan.

Dalam rangka menjaga perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham, ADHI selalu memberikan kemudahan untuk melakukan akses informasi mengenai Perseroan setiap saat melalui website maupun press release yang diterbitkan oleh Perseroan. Anggaran Dasar ADHI menjamin hak para pemegang saham sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Selama tahun 2009, ADHI telah menyelenggarakan satu kali RUPS dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2009 yang menghasilkan keputusan yaitu:

1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2008 termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan mengesahkan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku 2008.
- b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2008.

2. Persetujuan dan penetapan penggunaan laba bersih setelah pajak Perseroan untuk tahun buku 2008, yaitu:
 - a. Sebesar 25% dari laba bersih dibagikan dalam bentuk dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp20.370.623.752 atau Rp11,59 per saham.
 - b. Sebesar 0,25% dari laba bersih atau Rp203.706.238 dialokasikan untuk Program Kemitraan.
 - c. Sebesar 0,50% dari laba bersih atau Rp407.412.475 dialokasikan untuk Program Bina Lingkungan.
 - d. Sebesar 74,25% dari laba bersih atau Rp60.500.752.543 dibukukan sebagai laba ditahan.
 - e. Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Persetujuan dan penetapan besaran gaji dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan besaran tantiem tahun 2008 bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
4. a. Penunjukkan kembali Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2009 dan melakukan audit tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2009, serta memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti termasuk menetapkan kondisi dan syarat-syarat penunjukan apabila Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun dan atau berdasarkan ketentuan dan peraturan di bidang pasar modal.
5. Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/ MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Badan Usaha Milik Negara sebagai salah satu pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Perseroan.
6. Pengukuhan pelaksanaan pembelian kembali saham perseroan (shares buy back) sesuai Peraturan Bapepam & LK No. XI.B.3. yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2008.
7. a. Menguatkan keputusan Dewan Komisaris tanggal 5 Mei 2009 No. 041/DK-AK/2009 dengan memberhentikan Sdr. Bambang Subekti sebagai Direktur Luar Negeri.
- b. Pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi Perseroan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 92 ayat (6) UU PT No. 40 Tahun 2007 diputuskan oleh Direksi dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Komisaris. Sehingga susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama: Imam Santoso Ernawi
- Komisaris: Harry Susetyo Nugroho
- Komisaris: Gatot Trihargo
- Komisaris Independen: Murhadi

Direksi

- Direktur Utama: Bambang Triwibowo
- Direktur : Indradjaja Manopol
- Direktur : M. Fauzan
- Direktur : Supardi

Pada tanggal 27 Januari 2010, ADHI menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang menghasilkan keputusan yaitu:

1. Pengangkatan Sdr. Amir Muin, sebagai Komisaris Independen.
2. Pengangkatan Sdr. Bambang Pramusinto, sebagai Direktur.
3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk

menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi.

4. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Keterangan:
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan pembagian tugas anggota Direksi diputuskan dalam Rapat Direksi setelah terbitnya Surat Keputusan Dewan Komisaris sesuai Keputusan RUPS No. 3 di atas.

Sehingga susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Imam Santoso Ernawi
 Komisaris : Harry Susetyo Nugroho
 Komisaris : Gatot Trihargo
 Komisaris Independen : Murhadi
 Komisaris Independen : Amir Muin

Direksi

Direktur Utama : Bambang Triwibowo
 Direktur : Indradjaja Manopol
 Direktur : M. Fauzan
 Direktur : Supardi
 Direktur : Bambang Pramusinto

dengan masa jabatan untuk Sdr. Amir Muin dan Sdr. Bambang Pramusinto adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2014.

PERAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Anggaran Dasar Perseroan mengamanatkan secara jelas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagai pengawas serta tugas dan tanggung Direksi sebagai penanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dewan Komisaris dan Direksi telah memiliki Board Manual yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

1. DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada para pemegang saham dan memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perseroan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Anggaran Dasar Perseroan pasal 17 menyebutkan bahwa tugas utama Dewan Komisaris adalah:

Tabel Remunerasi Komisaris (dalam Rp)

Nama	Gaji	Tunjangan	THP Bulanan	THP 2009	Tantiem	Pendapatan 2009
Imam Santoso Ernawi	24.000.000	800.000	24.800.000	297.600.000	60.000.000	357.600.000
Harry Susetyo Nugroho	21.000.000	720.000	21.720.000	260.640.000	54.000.000	314.640.000
Gatot Trihargo	21.000.000	720.000	21.720.000	260.640.000	54.000.000	314.640.000
Murhadi	21.000.000	720.000	21.720.000	260.640.000	54.000.000	314.640.000

Keterangan:

Selain tunjangan di atas, Komisaris juga mendapatkan tunjangan Purna Jabatan berupa keikutsertaan dalam asuransi dengan premi/tahun sebesar 25% dari gaji

Tabel Kehadiran Rapat Dewan Komisaris Tahun 2009

Nama	Jabatan	Jumlah Kehadiran
Imam Santoso Ernawi	Komisaris Utama	18
Harry Susetyo Nugroho	Komisaris	19
Gatot Trihargo	Komisaris	20
Murhadi	Komisaris Independen	19

Keterangan:

Jumlah frekuensi rapat Dewan Komisaris 22 kali

- Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan memberi nasihat kepada Direksi.
- Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.
- Dalam melakukan tugasnya bertindak untuk kepentingan dan usaha Perseroan dan bertanggungjawab kepada RUPS.
- Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan tsb.

KOMISARIS INDEPENDEN

Jumlah dan komposisi Anggota Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi Peraturan di bidang Pasar Modal dimana jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan pada saat ini adalah lima orang dimana dua orang diantaranya atau 40% adalah Komisaris Independen. Hal tsb. telah melebihi batas minimum jumlah Komisaris Independen yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia

yaitu 30%. Selain tugas pengawasan, Komisaris Independen juga berperan dalam memperjuangkan kepentingan pemegang saham minoritas.

Profil anggota Dewan Komisaris disajikan pada halaman 68-69.

KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

Secara terperinci Dewan Komisaris memiliki kewajiban sbb.:

- Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta menyampaikan hasil penilaian dan pendapatnya kepada RUPS.
- Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan memberikan laporan kepada RUPS disertai saran dan langkah perbaikan manakala kinerja Perseroan memperlihatkan kemunduran yang berarti.
- Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai berbagai persoalan yang dianggap penting dalam pengelolaan Perseroan.
- Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan

pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Perseroan.

- Mengusulkan calon-calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk disampaikan kepada RUPS sebagaimana direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
- Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi (triwulanan, tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.

Selama tahun 2009, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap:

- Kinerja Keuangan.
- Kerangka Manajemen Risiko.
- Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan audit internal dan eksternal.
- Kecukupan sistem pengendalian intern.
- Rencana Bisnis Perseroan.
- Mengusulkan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
- Mengusulkan calon Komisaris Independen dan anggota Direksi.

Tabel Remunerasi Direksi (dalam Rp)

Nama	Gaji	Tunjangan	THP Bulanan	THP 2009	Tantiem	Pendapatan 2009
Bambang Triwibowo	60.000.000	17.000.000	77.000.000	924.000.000	75.000.000	999.000.000
Indradjaja Manopol	54.000.000	17.000.000	71.000.000	852.000.000	135.000.000	987.000.000
M. Fauzan	54.000.000	17.000.000	71.000.000	852.000.000	135.000.000	987.000.000
Supardi	54.000.000	17.000.000	71.000.000	852.000.000	135.000.000	987.000.000
Bambang Subekti*	54.000.000	17.000.000	71.000.000	426.000.000	135.000.000	561.000.000

Keterangan:

* Menjabat Direksi hingga Juni 2009

Selain tunjangan di atas, Direksi juga mendapatkan tunjangan Purna Jabatan berupa keikutsertaan dalam asuransi dengan premi/tahun sebesar 25% dari gaji

Tabel Kehadiran Rapat Direksi Tahun 2009

Nama	Jabatan	Jumlah Kehadiran
Bambang Triwibowo	Direktur Utama	46
Indradjaja Manopol	Direktur Keuangan & SDM	44
M. Fauzan	Direktur Operasi I	48
Supardi	Direktur operasi II & EPC	48
Bambang Subekti*	Direktur Luar Negeri	16

Keterangan:

* Menjabat sebagai Direksi hingga Juni 2009

Jumlah frekuensi rapat Direksi 50 kali

REMUNERASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Remunerasi anggota Dewan Komisaris diusulkan dan ditetapkan pada RUPS setelah Dewan Komisaris memperhatikan saran dan usulan yang diberikan oleh Komite Nominasi & Remunerasi. Remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri dari honorarium, tunjangan-tunjangan dan tantiem. Selain mendapatkan honorarium bulanan dan untuk menunjang tugas-tugasnya, Komisaris juga mendapatkan tunjangan transportasi, tunjangan telekomunikasi dan asuransi purna jabatan.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan untuk membahas hal-hal yang bersifat strategis. Rapat Dewan Komisaris harus diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan dan setiap saat atas permintaan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris. Kuorum Rapat Dewan Komisaris tercapai jika lebih dari setengah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakilkan dengan kuasa kepada Komisaris lain. Keputusan rapat diambil secara mufakat. Jika mufakat tidak terjadi, maka dilakukan pemungutan suara di antara anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakilkan dalam rapat dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari setengah dari jumlah suara yang sah. Jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama, maka usulan yang disampaikan ditolak, kecuali mengenai diri orang akan diputuskan oleh Ketua Rapat.

Dewan Komisaris telah melakukan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 22 kali pada tahun 2009, dengan frekuensi kehadiran sebagaimana disajikan pada tabel.

2. DIREKSI

TUGAS POKOK DIREKSI

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan pasal 14 ayat 3, maka tugas pokok Direksi adalah:

- Memimpin, mengurus, dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan.

- Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.

Selain itu, Direksi juga bertanggung jawab atas terlaksananya Good Corporate Governance (GCG).

Sehubungan dengan tugas pokok tersebut di atas, Direksi dalam operasional sehari-hari membagi tugas sebagai berikut:

DIREKTUR UTAMA

Bertanggung jawab atas kegiatan yang berkaitan dengan tugas-tugas sbb.:

- Menetapkan visi, misi, filosofi, sasaran, dan strategi Perseroan berdasarkan kajian internal dan eksternal.
- Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP).
- Menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP).
- Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Memimpin kegiatan yang bersifat strategis dalam pengembangan Perseroan.
- Mengkoordinir kegiatan para Direktur.
- Melakukan pembinaan anak perusahaan dan perusahaan joint venture.
- Mengarahkan dan membina pelaksanaan tugas Internal Audit.

DIREKTUR KEUANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bertanggung jawab atas kegiatan yang berkaitan dengan tugas-tugas sbb.:

- Memimpin dan mengelola kegiatan keuangan dan akuntansi Perseroan.
- Memimpin dan mengelola kegiatan mitigasi risiko.
- Memimpin, mengelola serta mengembangkan sistem SDM dan kegiatan umum di Kantor Pusat.
- Membina kegiatan non struktural.

- Memimpin dan mengelola kegiatan produksi termasuk quality control dan pelaksanaan K3L di wilayah operasinya.
- Membina pengelolaan SDM di wilayah operasinya.
- Membina kegiatan sinerji antar unit kerja operasional dan pengembangan teknologi.

DIREKTUR PENGEMBANGAN USAHA

Bertanggung jawab atas kegiatan yang berkaitan dengan tugas-tugas sbb.:

- Memimpin dan mengelola kegiatan riset dan pengembangan teknologi.
- Memimpin dan mengelola kegiatan investasi dan pengembangan usaha.
- Mengkoordinir, memimpin, dan mengelola kegiatan pemasaran, produksi, dan SDM bidang EPC.
- Memimpin dan mengelola kegiatan pemasaran berkaitan dengan perencanaan pengembangan pasar baru.
- Memimpin dan mengelola kegiatan kesisteman dan teknologi informasi Perseroan.
- Memimpin dan mengelola kegiatan evaluasi kinerja Perseroan termasuk administrasi kontrak.
- Mengkoordinir kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja Anak Perusahaan.

Seluruh anggota Direksi bertanggung jawab dalam membina kegiatan investor relations, corporate communication, kesekretariatan, Pelayanan Hukum, tanggung jawab sosial perusahaan.

Susunan Anggota Direksi Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 11 Juni 2009 serta pembagian tugas anggota Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Direksi tanggal 27 Juli 2009 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama: Bambang Triwibowo
Direktur Keuangan, SDM, dan

Kesisteman: Indradjaja Manopol

Direktur Operasi I: M. Fauzan

Direktur Operasi II dan EPC: Supardi

DIREKTUR OPERASI

Bertanggung jawab atas kegiatan yang berkaitan dengan tugas-tugas sbb.:

- Mengkoordinir kegiatan pemasaran (penetrasi pasar dan pelayanan pada pelanggan) khususnya pasar konvensional.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 27 Januari 2010, menghasilkan salah satu keputusan yaitu mengangkat Sdr. Bambang Pramusinto sebagai Direktur serta pembagian tugas anggota Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Direksi tanggal 3 Februari 2010, sehingga Susunan Anggota Direksi menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama : Bambang Triwibowo
 Direktur Operasi I: Indradjaja Manopol
 Direktur Operasi II: Bambang Pramusinto
 Direktur Pengembangan Usaha: M.
 Fauzan
 Direktur Keuangan dan SDM: Supardi

Profil masing-masing anggota Direksi disajikan pada halaman 70-71.

REMUNERASI ANGGOTA DIREKSI

Remunerasi anggota Direksi diusulkan oleh Dewan Komisaris atas rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi yang selanjutnya ditetapkan oleh RUPS. Remunerasi anggota Direksi terdiri dari gaji, tunjangan-tunjangan berupa tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, tunjangan telekomunikasi, dan asuransi purna jabatan. Di samping itu anggota Direksi diberikan tantiem yang besarnya sesuai dengan hasil evaluasi kinerja anggota Direksi.

Penilaian performance Direksi tahun 2009 dijabarkan dalam *Balance Scored Card (BSC)* diukur berdasarkan indikator-indikator sesuai dengan aspek-aspek *Key Performance Indicator (KPI)* Kementerian BUMN yaitu aspek Keuangan, aspek Operasional, dan aspek Dinamis.

RAPAT DIREKSI

Rapat Direksi diselenggarakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari Dewan Komisaris dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. Kuorum Rapat Direksi tercapai jika lebih dari setengah anggota Direksi hadir atau diwakilkan dengan kuasa kepada anggota Direksi lainnya. Keputusan rapat diambil secara mufakat. Jika mufakat tidak terjadi, maka dilakukan pemungutan suara di antara anggota Direksi yang hadir atau diwakilkan dalam rapat dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari setengah dari jumlah suara yang sah. Jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama, maka usulan yang disampaikan ditolak, kecuali mengenai diri orang akan diputuskan oleh Ketua Rapat.

Setiap kali rapat diselenggarakan, dibuat daftar hadir yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat yang hadir

dan notulen rapat yang dibuat oleh Corporate Secretary. Notulen Rapat yang telah ditandatangani oleh Direksi yang hadir dalam rapat, didistribusikan kepada seluruh Direktur dan bila perlu kepada unit kerja yang terkait dengan keputusan rapat.

Untuk tahun 2009, Direksi telah melakukan Rapat Direksi sebanyak 50 kali dengan tingkat kehadiran seperti terlihat pada tabel berikut:

PROGRAM PELATIHAN DIREKSI

Sehubungan dengan adanya pergantian Komisaris dan Direksi, maka untuk memberikan gambaran dan pemahaman kepada pejabat baru tentang kondisi yang ada dalam perusahaan, telah dilaksanakan program pengenalan komprehensif atas perusahaan. Program pengenalan diarahkan agar pejabat baru memahami hal-hal yang berkaitan dengan organisasi dan operasional perusahaan, seperti: struktur organisasi, *key person*, *nature of business*, serta *job description*. Untuk memastikan agar pejabat baru mendapatkan pemahaman yang komprehensif atas perusahaan dan tugas serta kewajibannya, maka kepada setiap pejabat baru diberikan satu paket dokumen yang terdiri dari:

- Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Jumlah Rapat Dewan Komisaris - Direksi Tahun 2009

Nama	Jabatan	Jumlah Kehadiran
Imam Santoso Ernawi	Komisaris Utama	9
Harry Suseyo Nugroho	Komisaris	9
Gatot Trihargo	Komisaris	9
Murhadi	Komisaris Independen	8
Bambang Triwibowo	Direktur Utama	7
Indrajaja Manopol	Direktur Keuangan & SDM	8
M. Fauzan	Direktur Operasi I	6
Supardi	Direktur Operasi II & EPC	9
Bambang Subekti*	Direktur Luar Negeri	4

Keterangan:

- * Menjabat sebagai Direksi hingga Juni 2009
- Jumlah frekuensi rapat Dewan Komisaris - Direksi 9 kali

- Anggaran Dasar Perseroan;
- Struktur Organisasi Perusahaan berikut nama pejabatnya;
- Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun yang bersangkutan beserta Rencana Jangka Panjang Perusahaan yang terkait;
- Laporan-laporan bulanan tahun yang bersangkutan;
- Materi mengenai Good Corporate Governance (GCG);
- Manual Perusahaan;
- Board Manual;

Persaingan di industri konstruksi yang semakin kompetitif menuntut Direksi untuk terus meningkatkan kompetensi yang dimilikinya. Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kompetensi Direksi untuk dapat menunjang pelaksanaan tugasnya, Direksi telah mengikuti seminar-seminar, seperti:

- Mitigasi Risiko Kontrak bagi BUMN dan Penyelesaian Sengketa.
- *Internalizing Best Practices of GCG and Directorship in Facing Global Finance Crisis.*
- Konvergensi IFRS dan dampaknya terhadap industri.
- Pengembangan Teknologi Informasi.
- Papua *Investment.*
- Peningkatan efektivitas birokrasi, konsistensi kebijakan menuju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta berkelanjutan.
- Aplikasi teknologi untuk mendorong sektor riil pembangunan jangka menengah 2010-2014.

3. KOMITE-KOMITE

KOMITE AUDIT

Diketuai oleh Pjs. Murhadi yang juga menjabat sebagai Komisaris Independen menggantikan Prof. Dr. Mas'ud Machfoedz. Anggota Komite Audit pada tahun 2009 adalah:

- Gatot Trihargo
- Erick, SH, M.Si., CPA
- Syaiful (diangkat sejak bulan Mei 2008)

Untuk menjaga independensi dalam pelaksanaan tugasnya, dua anggota Komite Audit yaitu Erick, SH, M.Si., CPA dan Syaiful adalah personil-personil

yang tidak memiliki hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.

Profil masing-masing anggota Komite Audit disajikan pada halaman 72-73.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Berdasarkan Piagam Komite Audit yang disahkan oleh Dewan Komisaris tanggal 1 Oktober 2004, tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sbb.:

- Melakukan evaluasi atas efektifitas dari pengendalian interen Perseroan pada laporan keuangan lainnya, termasuk evaluasi atas efektifitas pengawasan dan keamanan pada teknologi informasi yang digunakan.
- Menelaah ruang lingkup dari kajian audit interen atas Laporan Keuangan, serta memperoleh daftar temuan dan rekomendasi, termasuk tanggapan dari pihak manajemen.
- Melaporkan berbagai risiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Perseroan.
- Memastikan ketataan Perseroan terhadap regulasi yang berlaku.

Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 18 kali, dengan tingkat kehadiran 100%.

Rincian kegiatan Komite Audit dalam tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi laporan hasil audit internal dan menyampaikan hasil penilaian kepada Dewan Komisaris. Kegitan ini dilakukan dalam rangka menilai efektifitas pengendalian internal perseroan dan meningkatkan efektifitas fungsi dan tindak lanjut hasil audit internal.
- b. Melakukan reviu atas Laporan Keuangan Interim.
- c. Menetapkan TOR dan menyelenggarakan proses penunjukan KAP dengan pemenang KAP Husni, Mucharam, dan Rasidi.
- d. Mereviu dan membantu kelancaran pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan tahun 2009.
- e. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dipublikasikan oleh

Direksi dan menyampaikan hasilnya kepada Dewan Komisaris.

- f. Melakukan penelaahan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2010.
- g. Melakukan evaluasi praktik Good Corporate Governance.
- h. Melakukan penelaahan atas efektifitas sistem internal kontrol Perseroan.
- i. Mengkaji, memahami, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan resiko yang ditetapkan oleh Perseroan.
- j. Mengkaji, memahami, dan mengevaluasi kepatuhan Perseroan terhadap kepatuhan peraturan yang berlaku.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Diketuai oleh Imam S. Ernawi dengan anggota:

- Harry Susetyo Nugroho
- Gatot Trihargo
- Murhadi

Dalam keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi ini terdapat satu anggota independen yaitu Murhadi, yang sekaligus sebagai Komisaris Independen. Selanjutnya riwayat singkat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi disajikan pada profil Komisaris halaman 68-69.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.KEP.087/DK/K/2005 tanggal 18 Desember 2007, tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sbb.:

- Menyusun, menganalisa, dan melaksanakan kriteria dan prosedur nominasi bagi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- Menyusun, menganalisa, dan melaksanakan kriteria dan prosedur pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- Menyusun sistem penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- Memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengadakan rapat sebanyak dua kali, dengan tingkat kehadiran 100%.

Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi:

- Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap bakal calon Direksi yang akan direkomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk menggantikan Sdr. Bambang Subekti.
- Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap bakal calon Komisaris Independen yang akan - direkomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk mengisi kekosongan Komisaris Independen.
- Merekomendasikan besarnya gaji, tunjangan, dan tantiem Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2009 kepada Dewan Komisaris untuk diusulkan dalam RUPS.
- Merekomendasikan besarnya gaji, tunjangan, dan tantiem Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2010 kepada Dewan Komisaris untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2010.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Diketuai oleh Murhadi dengan anggota:

- Antonius Alijoyo
- Eddy F. Sinaga

Untuk menjaga independensi dalam pelaksanaan tugasnya, Komite ini diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan dua orang anggota yang dipilih dari personil-personil yang tidak memiliki hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.

Profil masing-masing anggota Komite Manajemen Risiko disajikan pada halaman 75.

Komite Manajemen Risiko (KMR) adalah perangkat Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas pengawasan dalam bidang pemantauan dan mitigasi risiko Perseroan.

Tugas dan tanggung jawab KMR meliputi:

- Melakukan reviu dan evaluasi konsep kebijakan manajemen risiko yang

disiapkan oleh Direksi dan memberi masukan kepada Dewan Komisaris sebelum kebijakan itu dijalankan.

- Melakukan reviu dan evaluasi penetapan area risiko bisnis Perseroan yang dilakukan oleh Direksi untuk bersama-sama disepakati dengan Dewan Komisaris.
- Melakukan reviu/valuasi atas upaya pencegahan risiko sistemik dan non-sistemik atas aktivitas investasi.

Dalam tahun 2009, Perseroan telah memiliki dan mengimplementasikan sistem informasi manajemen risiko secara terintegrasi, sehingga secara berkala Direksi dan Dewan Komisaris menerima laporan peta risiko atas kegiatan yang sedang dikerjakan (*Risk Mapping report*).

KMR melakukan reviu laporan itu dalam rapat-rapat berkala dan memberi masukan tentang upaya mitigasi risiko yang diperlukan, khususnya untuk proyek-proyek konstruksi dan EPC yang bernilai Rp100 miliar atau lebih. Masukan dari KMR dapat juga berupa rekomendasi kepada Komite Audit untuk mengupayakan dilakukannya audit kinerja atas proyek-proyek konstruksi dan EPC tertentu yang dinilai sedang menghadapi risiko berkategori tinggi baik dari segi kemungkinannya (*likelihood*) maupun dari dampaknya. Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 10 kali, dengan tingkat kehadiran 100%.

KOMITE KEBIJAKAN CORPORATE GOVERNANCE

Diketuai oleh Gatot Trihargo dengan anggota:

- AP Purnomo Widodo
- Bin Nahadi

Untuk menjaga independensi dalam pelaksanaan tugasnya, kedua Anggota Komite Kebijakan Corporate Governance tersebut dipilih dari personil-personil yang tidak memiliki hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.

Profil masing-masing anggota Komite Kebijakan Coporate Governance disajikan pada halaman 74.

Tugas dari Komite Kebijakan Corporate Governance meliputi:

- Pengkajian kebijakan Corporate Governance yang disusun oleh Direksi secara menyeluruh serta menilai konsistensi penerapannya termasuk yang bertalian dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*);
- Penelaahan dan pengkajian Anggaran Dasar dan peraturan-peraturan yang terkait dengan penerapan kebijakan Corporate Governance yang meliputi:
 - Kesesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tujuan Perseroan;
 - Implikasi peraturan-peraturan terhadap penerapan kebijakan Corporate Governance.
- Pelaksanaan tugas khusus terkait dengan penerapan kebijakan Corporate Governance.

Komite Kebijakan Corporate Governance telah mengadakan rapat sebanyak 8 kali, dengan tingkat kehadiran 100%.

Kegiatan Komite Kebijakan Corporate Governance selama tahun 2009 adalah:

- Menajamkan area of improvement hasil self assessment praktek-praktek GCG tahun 2008, di mana area yang diidentifikasi untuk diperbaiki adalah:
 - a. Perlunya peningkatan disclosure atas informasi baik yang bersifat keuangan dan non keuangan kepada para pemegang saham.
 - b. Dalam RUPS, perlu dibahas dalam mata acara tersendiri mengenai evaluasi kinerja yang bersifat korporat.
 - c. Perlu penyempurnaan berbagai manual GCG terutama terkait dengan penyesuaian manual dengan UU PT Nomor 40 Tahun 2007 serta penyempurnaan Code of Conduct.
 - d. Perlunya mendisain KPI, Komisaris, dan Direksi sebagai dasar penilaian kinerja secara formal.
- Menyusun TOR untuk assessment GCG bagi independent Assessor.

4. CORPORATE SECRETARY

Dalam upaya mematuhi hukum, peraturan, dan ketentuan pasar modal, serta menjamin pelaksanaan GCG, Perseroan sebagai perusahaan publik telah memiliki Corporate Secretary. Corporate Secretary merupakan jabatan struktural satu tingkat di bawah Direksi dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi. Corporate Secretary tidak hanya bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan pada hukum, peraturan dan ketentuan pasar modal, namun juga harus memastikan kelancaran komunikasi antara Perseroan dengan pemangku kepentingan; dan menjamin tersedianya informasi yang boleh diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan wajar dari pemangku kepentingan.

Corporate Secretary dijabat oleh Kurnadi Gularso. Profil Corporate Secretary disajikan pada halaman 76.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Corporate Secretary di antaranya:

- Memastikan kelancaran komunikasi (corporate communication) antara perusahaan dengan pemangku kepentingan yang meliputi antara lain: pemegang saham, karyawan, mitra bisnis, masyarakat serta pengguna jasa sesuai dengan kebutuhan wajar dari pemangku kepentingan tersebut.
- Menjamin tersedianya informasi yang boleh diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan wajar dari pemangku kepentingan.
- Menjalankan kegiatan fungsi investor relations (antara lain: RUPS, Public Expose, Analyst Meeting, Investor Meeting, dll.).
- Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memfasilitasi penyelenggaraan rapat manajemen di tingkat pusat.
- Bertanggung jawab kepada Direksi dan laporan pelaksanaan tugasnya disampaikan pula kepada Dewan Komisaris.

- Menatausahaakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, Daftar Pemegang Saham Khusus dan Risalah Rapat Direksi maupun RUPS.
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan.

Di tahun 2009 Corporate Secretary telah melakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan stakeholder antara lain:

- Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Menyenggarakan/partisipasi Public Expose, Analyst Meeting, Conference, Exhibition.
- Menyelenggarakan press conference.
- Menjalin komunikasi dengan Kementerian BUMN, Departemen Keuangan, Sekretariat Negara, Bapepam, Self Regulatory Organisation (KSEI, BEI, KPEI, BAE, Lembaga Pemeringkat), Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga-lembaga terkait lainnya.
- Menyempurnakan website Perseroan.
- Bekerja sama dengan Dinas Koperasi Pandeglang menyelenggarakan pelatihan pembukuan dan motivasi kepada Mitra Binaan.
- Dan Lain-lain.

Selain tugas-tugas tsb. di atas, Corporate Secretary juga mempunyai tugas yang lain yaitu:

- Bidang Hukum, meliputi compliance terhadap regulasi, penanganan masalah-masalah hukum (konsultasi, negosiasi, mediasi, litigasi), pendirian anak perusahaan,
- Bidang Corporate Communications, yaitu pencitraan Perusahaan melalui pemberitaan di media massa, press conference, pameran, penerbitan company profile, penerbitan annual report, pemasangan iklan, menjadi sponsor event tertentu dll.

5. PENGENDALIAN INTERNAL

Pengendalian internal Perseroan dilakukan di semua lini, mulai dari Proyek, Divisi dan tingkat Korporasi. Pengendalian mencakup antara lain

pengendalian empat fungsi yaitu keuangan, produksi, pemasaran, dan SDM, pengendalian kesisteman, pengendalian IT, dll.

Pengendalian tersebut dilakukan melalui beberapa audit yaitu berupa Audit Sistem Mutu, Audit Sistem Lingkungan, Audit Sistem K3L/OHSAS, Audit Sistem IT, Audit Implementasi GCG, Performance Excellence Audit, Audit Internal dan Audit Eksternal untuk bidang audit operasional.

Tindak lanjut hasil audit dilakukan melalui Management Review Meeting (MRM), yang dilaksanakan secara berjenjang yaitu satu kali dalam satu minggu untuk tingkat proyek, satu kali dalam satu bulan untuk tingkat divisi, dan dilakukan satu kali dalam tiga bulan untuk tingkat korporat. Sedangkan untuk mitigasi risiko dilakukan mulai saat Perseroan menentukan akan mengambil proyek sampai dengan proyek diselesaikan yang dipantau oleh Risk Management Department.

Perseroan juga membentuk Tim Efisiensi yang bertugas melakukan reviu atas biaya-biaya produksi maupun biaya usaha yang sudah direncanakan dan memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk dilakukan efisiensi.

6. INTERNAL AUDIT

Berdasarkan SK Direksi PT ADHI KARYA (Persero) Tbk. nomor: 014-6/033, tanggal 19 Juni 2008, tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi PT ADHI KARYA (Persero) Tbk., Internal Audit yang sebelumnya bernama Satuan Pengawasan Intern bertanggung jawab dalam pelaksanaan seluruh kegiatan audit, dengan prioritas audit operasional di samping audit Sistem Mutu, audit SMK3, dan audit Lingkungan. Internal Audit bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Kepala Internal Audit dijabat oleh Budhi Hidayati. Profil Kepala Internal Audit disajikan pada halaman 76.

Adapun tugas dan tanggung jawab Internal Audit :

- Melakukan audit internal terhadap efektifitas sistem dan pelaksanaannya untuk menjamin kegiatan usaha yang mengarah pada tercapainya sasaran Perseroan dan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG).
- Menyampaikan laporan dan rekomendasi terhadap hasil audit sebagai bagian dari upaya memperbaiki kinerja Perseroan secara berkelanjutan.

Audit dilakukan dengan risk based audit yang mengacu pada Internal Audit Charter, Manual Perusahaan , Standar Audit, Prosedur, dan Peraturan Perundungan. Laporan Hasil Audit disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Perseroan telah memiliki Audit Charter sejak 14 Oktober 2005 yang antara lain berisi:

Visi dan Misi, wewenang, kewajiban, ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, standar pelaksanaan pekerjaan internal audit, serta persetujuan oleh Direktur Utama dan Komite Audit atas isi Audit Charter.

Audit Charter merupakan dokumen yang secara formal mengakui pembentukan fungsi Internal Audit Charter dapat dipandang sebagai kontrak antara Internal Audit dengan Direksi dan Komisaris (Komite Audit) yang memberi wewenang untuk memulai pekerjaan auditing dalam perusahaan. Audit Charter menetapkan hak Kepala Internal Audit dan para Auditor untuk memeriksa setiap bagian dalam organisasi, dan melihat berbagai aset serta dokumen perusahaan.

Pada tahun 2009, sesuai dengan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT), Internal Audit merencanakan 25 (dua puluh lima) kali kunjungan ke unit-unit kerja di Kantor Pusat, Divisi Operasional dan Proyek-proyek. Pelaksanaan audit melibatkan 4 (lima) orang anggota Internal Auditor, tidak termasuk Chief of Internal Audit.

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2009 telah dilaksanakan 14 (empat belas) kali kunjungan audit reguler, dua kali audit Joint Operation, dua kali audit khusus serta dua kali audit cut off.

Jumlah temuan/ketidaksesuaian dalam Laporan Hasil Audit sampai dengan 31 Desember 2009 sebanyak XX (tujuh puluh delapan) ketidaksesuaian, dengan status:

Pada akhir tahun 2009 seorang Auditor memasuki masa pensiun, sehingga karyawan di Internal Audit tinggal berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari seorang Chief of Internal Audit merangkap Auditor, 3 (tiga) orang Auditor, dan seorang staf Tata Usaha. Seluruh Auditor merupakan auditor terlatih dan memiliki sertifikat Qualified Internal Auditor (QIA). Internal Audit juga dibantu seorang outsourcing auditor yang memiliki sertifikat Audit Safety, Lingkungan dan Mutu.

7. RISIKO PERSEROAN

Industri konstruksi sebagaimana industri-industri lainnya memiliki risiko. Untuk meminimalisasi risiko, Perseroan melakukan pengendalian risiko dimulai dari proses evaluasi informasi proyek, proses tender, proses kontrak, pelaksanaan konstruksi hingga pemeliharaannya. Seluruh kegiatan dalam rangka meminimalisasi risiko tersebut, harus dikelola secara bertanggung jawab dengan berlandaskan pada prinsip kehati-hatian untuk menjamin pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan

ADHI telah memiliki Risk Management Department, yang dibentuk dengan tujuan agar Perseroan lebih fokus dalam mengelola risiko di seluruh proses bisnisnya, yaitu Jasa Konstruksi, bisnis EPC, dan Investasi.

Untuk menjaga agar implementasi sistem Manajemen Risiko berjalan dengan baik pada seluruh jajaran Perseroan, maka dilakukan penetapan Risk Management Framework yang mencakup pemastian:

1. Awareness & Culture yang kondusif terhadap penerapan Manajemen Risiko secara menyeluruh;
2. Alignment penerapan Manajemen Risiko dengan Visi, Misi & Strategi Korporasi;
3. Penentuan Risk Tolerance & Risk Appetite;
4. Penentuan Struktur Organisasi & Fungsi Risk Management Department;
5. Penetapan Risk Management Policy yang tertulis jelas dan memiliki batasan-batasan yang diperlukan.

Secara khusus Direksi dengan SK No. 014-6/053 tertanggal 22 Juni 2007 tentang Penerapan Enterprise Risk Management (ERM) pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk., yang menetapkan infrastruktur & software yang diperlukan untuk mengelola sistim manajemen risiko.

Penetapan infrastruktur & software tersebut memperhatikan:

1. Pendekatan & metodologi yang sudah teruji dalam industri jasa konstruksi;
2. Penggunaan teknologi informasi yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan;
3. Prosedur yang baku untuk memastikan terjadinya proses manajemen risiko di setiap lini proses bisnis perusahaan;
4. Platform sistem pelaporan yang memastikan kecukupan kapasitas untuk membangun sistim informasi yang terstruktur dengan baik dari segi isi maupun arus informasi, sehingga dengan sistem dashboard, manajemen dapat melakukan pengendalian berbasis risiko secara efektif.

Proses Manajemen Risiko yang sistematis dan berbasis pada rujukan penerapan terbaik akan memastikan terjadinya manfaat optimal dari penerapan Manajemen Risiko secara keseluruhan yang mencakup antara lain:

1. Identitas & pendefinisian risiko yang dihadapi perusahaan;
2. Asesmen & pengukuran risiko sebagai proses kuantifikasi risiko yang telah teridentifikasi;
3. Bagaimana memilih tindakan antisipasi atau cara pengelolaan risiko yang tepat & efektif;

4. Pelaksanaan proses pemantauan & pelaporan yang memadai bagi seluruh pihak yang membutuhkan informasi dengan menggunakan software untuk mengefektifkan proses pelaksanaan Manajemen Risiko pada berbagai tingkatan, mulai dari proyek, divisi dan korporat;
5. Pada masing-masing tingkatan ada segregasi risiko yang harus dikendalikan oleh Proyek, Divisi, dan Korporat;

Perseroan melaksanakan pengelolaan Sistem Manajemen Risiko secara berjenjang, yaitu:

- a. Tingkat Korporat, yang bertanggungjawab adalah Direktur ;
- b. Di masing-masing Unit Kerja Kantor Pusat, yang bertanggungjawab adalah *Head of Department / Corporate Secretary*;
- c. Di masing-masing Unit Kerja Operasional, yang bertanggungjawab adalah *Head of Division/Project Manager*.

Secara periodik dilakukan pembahasan, baik pada tingkat Proyek, Divisi, dan Korporat mengenai keefektifan proses pelaksanaan Manajemen Risiko. Proyek melaksanakan pembahasan setiap dua minggu, sedangkan pembahasan di tingkat Divisi dan tingkat Korporat dilakukan setiap bulan.

PENGAWASAN AKTIF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Direksi dan Dewan Komisaris memonitor perkembangan profil Risiko secara kontinu. Secara periodik dilakukan pembahasan untuk mengkaji profil Risiko Korporat dengan Dewan Komisaris dan Direksi, dan ditetapkan suatu strategi dan rencana mitigasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Manajemen Risiko yang menjadi counterpart dari Risk Management Department.

KECUKUPAN PERANGKAT SISTIM MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka pengelolaan risiko, Perseroan telah menetapkan Risk Philosophy dan membuat Kebijakan, Prosedur, dan Manual, yang kesemuanya telah ditetapkan untuk menunjang pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko.

1. Filosofi Risiko

Filosofi Risiko Perseroan adalah memastikan pencapaian laba yang stabil dan meningkat melalui pengelolaan risiko yang proaktif dan effektif pada seluruh aktifitas Perseroan untuk mencapai Visi Perseroan.

Melalui peningkatan *risk awareness* secara terus menerus, dengan peningkatan *capacity building* agar filosofi risiko ini dipahami dan dijalankan oleh para pemilik risiko pada berbagai tingkatan organisasi Perseroan dalam rangka menjaga pencapaian VISI Perseroan.

2. Manual Manajemen Risiko

Maksud dan Tujuan Perseroan menyusun Manual Manajemen Risiko dengan maksud untuk memberikan petunjuk secara umum mengenai pelaksanaan Manajemen Risiko agar dapat dilaksanakan secara efektif dan terpadu.

Adapun tujuan dari disusunnya Manual Manajemen Risiko adalah sebagai pedoman bagi pejabat/fungsii terkait yang bertanggung jawab di masing-masing unit kerja untuk dapat merumuskan dan menjabarkan tugas dan fungsinya ke dalam Manual Manajemen Risiko.

Ruang Lingkup

Manual Manajemen Risiko berdasarkan pada Australian/NZ Standard 4360, merupakan pedoman penerapan manajemen risiko di seluruh unit kerja baik di tingkat Kantor Pusat, Divisi/Proyek, termasuk sub kontraktor, pemasok serta asset dan siapapun yang berada di lingkungan ADHI.

Manual Manajemen Risiko memberi petunjuk yang meliputi:

- 1 Tanggung jawab personel dan struktur;
 - 2 Penentuan kriteria untuk asesmen Risiko;
 - 3 Ketentuan toleransi Risiko / Risk Tolerance & Selera Risiko / Risk Appetite yang perlu diberi tanggapan dan perlakuan (sesuaikan dengan kebijakan, tujuan dan sasaran organisasi, kepentingan para pemegang kepentingan dan persyaratan peraturan);
 4. Identifikasi Risiko;
 5. Assessment, menganalisis untuk menetapkan level Risiko & mengevaluasi untuk membandingkan level Risiko yang ditemukan dalam analisis dan menetapkan prioritas Risiko (untuk tindakan lebih lanjut);
 6. Memberi tanggapan & perlakuan atas Risiko, penanganan dan tindakan, pencegahan atas peristiwa Risiko;
 7. Program Rencana Tindakan (tanggapan & perlakuan);
 8. Memantau dan mengkaji ulang;
 9. Komunikasi dan konsultasi;
 10. Langkah penyempurnaan sistem manajemen Risiko dan penerapannya;
 11. Program dan pelaksanaan audit internal;
 12. Standar informasi / pelaporan & rekaman-tercatat;
 13. Pengendalian dokumen.
3. Prosedur Pengelolaan Risiko P000 PM034.
- Prosedur tentang Pengelolaan Risiko yang dimiliki oleh Perseroan, mulai berlaku efektif terhitung dari tanggal 1 Juli 2008 dan terakhir ditinjau pada tanggal 1 Juli 2009. Dalam prosedur tersebut diatur antara lain uraian aktivitas yang berkaitan dengan penanganan risiko, yang meliputi: menetapkan sasaran, pengidentifikasi risiko, kegiatan asesmen risiko, memberikan tanggapan atas risiko yang akan ditindaklanjuti/direspon sesuai dengan

urutan prioritas, melakukan kajian terhadap biaya dan manfaat setiap respon yang akan ditindaklanjuti, menguji ulang hasil tindak lanjut respon risiko, mempertahankan level risiko yang sudah dapat diterima serta membuat program pelaksanaan atas hasil respon risiko tersebut, melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan program pelaksanaan respon risiko, melakukan pengendalian kontrol dan evaluasi terhadap keefektifan respon dengan melakukan analisa ulang, melakukan komunikasi dan mengkonsultasikan peristiwa/skenario risiko, kondisi, asumsi kemungkinan dan akibat serta respon yang dipilih kepada para pihak yang terkait sesuai dengan area risikonya.

4. Kebijakan Korporasi

Beberapa kebijakan korporasi yang di dalamnya memperhatikan aspek manajemen risiko, antara lain:

- SK Direksi 014-6/019 yang mengatur kebijakan pengambilan proyek;
- SK Direksi 014-6/001A yang mengatur tentang Penyempurnaan Kebijakan Keuangan,
- SK Direksi 014-6/001 yang mengatur tentang Kerjasama Operasi,
- SK Direksi 014-6/019 yang mengatur batasan kewenangan finalisasi tender;

Kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam SK Direksi tersebut, terus dimonitor oleh Internal Audit/SPI, untuk mengukur effektifitas dan pelanggaran yang terjadi lewat.

SELERA RISIKO

Adalah gambaran jumlah risiko yang siap diterima, ditoleransi atau diekspose oleh Perseroan di saat kapanpun risiko itu terjadi dalam upaya pencapaian sasaran. Selera Risiko memberikan gambaran kapasitas Perseroan untuk menanggung suatu kerugian yang dapat terjadi pada berbagai level probabilitas. Selera Risiko yang ditetapkan untuk tahun 2009 adalah sebesar Rp30 miliar

JENIS RISIKO YANG DIKELOLA

Berdasarkan tingkat risiko yang paling mempengaruhi, Perseroan dihadapkan pada risiko pembayaran, kenaikan harga bahan baku/material, perubahan kurs, kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi dan sosial politik, persaingan usaha, perbedaan regulasi di luar negeri, tidak diterimanya instrumen perbankan nasional di luar negeri, pemutusan kontrak, dan kelangkaan bahan baku.

RISIKO PEMBAYARAN

Risiko pembayaran dapat terjadi manakala pemberi pekerjaan menunda atau tidak membayar biaya proyek yang mengakibatkan cost of fund meningkat dan piutang bermasalah yang pada gilirannya akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko tersebut, Perseroan telah menetapkan beberapa langkah sebagai berikut:

- Menilai *bonafiditas* dan reputasi pemberi pekerjaan.
- Mengharuskan adanya Uang Muka Proyek dan pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan termin yang disepakati.
- Melindungi kepentingan Perseroan dengan isi perjanjian kontrak yang kuat.
- Mengambil langkah-langkah negosiasi jika terjadi perselisihan dengan pihak pemberi pekerjaan untuk mencegah terjadinya risiko tidak dibayar.

RISIKO KENAIKAN HARGA BAHAN BAKU/MATERIAL

Nilai kontrak pekerjaan proyek disepakati sebelum dilaksanakannya kegiatan produksi bahan baku/material. Kondisi ini menimbulkan risiko atas kenaikan harga material dan upah baik secara regular maupun dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah di bidang ekonomi dan moneter, selama pelaksanaan proyek. Apabila terjadi kenaikan harga dapat mengakibatkan penurunan laba Perseroan.

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko kenaikan harga bahan baku/material ini maka tindakan yang

dilakukan adalah sebagai berikut:

- Melakukan kontrak pengadaan dengan pemasok utama yang akan terikat untuk memasok barang yang dibutuhkan oleh Perseroan dengan harga, jumlah, dan waktu yang telah ditentukan sebelumnya.
- Melakukan perencanaan dan pengelolaan kebutuhan barang secara akurat, khususnya bagi barang yang pemesanannya meminta jumlah minimal tertentu.
- Khusus untuk kontrak dengan pemberi kerja dicantumkan pasal tentang eskalasi.

RISIKO PERUBAHAN KURS

Risiko ini timbul apabila Perseroan mengambil hutang dalam bentuk valuta asing atau apabila Perseroan menerima pembayaran dalam valuta asing dalam kontrak-kontrak proyeknya. Risiko ini dapat dimitigasi dengan melakukan hedging maupun menyamakan denominasi kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga dengan denominasi pembayaran termijn pekerjaan.

RISIKO KEBIJAKAN PEMERINTAH, KONDISI EKONOMI, DAN SOSIAL POLITIK

Kebijakan Pemerintah baik yang menyangkut ekonomi dan moneter serta kondisi sosial politik yang kurang kondusif akan berakibat menurunnya investasi dan pembangunan. Hal ini dapat menyebabkan tertundanya proyek-proyek yang telah maupun yang akan diperoleh Perseroan.

Risiko ini merupakan risiko yang bersifat sistemik (systemic risk) di mana bila risiko ini terjadi maka akan mempengaruhi secara negatif seluruh variabel yang terlibat. Artinya, sulit untuk menghindarkan diri dari risiko ini bila terjadi. Bahkan diversifikasi tidak mampu menghilangkan risiko ini.

Upaya yang bisa dilakukan adalah meminimalisasi dampak bila risiko ini terjadi:

1. Segera menekan biaya overhead yang tidak perlu.
2. Mengurangi hutang dengan bunga tinggi, atau restrukturisasi hutang.

3. Meningkatkan upaya pencairan tagihan-tagihan yang masih outstanding.
4. Bersikap hati-hati dalam memilih proyek dan menghindarkan diri mengerjakan proyek yang berpotensi besar macet bila risiko ini terjadi.
5. Menjaga dan menghemat cashflow sebagai "cadangan" untuk bisnis saat kondisi membaik.
6. Menghentikan investasi yang kurang perlu.
7. Menghentikan pengerjaan proyek yang besar kemungkinannya untuk tidak terbayar.
8. Membentuk konsorsium dalam hal proyek yang dikerjakan bernilai besar.
9. Mencantumkan klausul dalam kontrak tentang eskalasi harga apabila terjadi perubahan kebijakan moneter.

RISIKO PERSAINGAN USAHA

Persaingan pada bidang usaha jasa konstruksi disadari akan semakin tajam, baik oleh pemain dalam maupun asing. Pada saat krisis, jumlah pemain menurun, tetapi sejalan dengan bangkitnya perekonomian Indonesia dan mulai dilaksanakannya proyek-proyek yang tertunda, maka pemain-pemain yang bergerak di bidang jasa konstruksi akan semakin bertambah dan hal ini dapat menurunkan pendapatan Perseroan.

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko persaingan usaha ini maka tindakan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan efisiensi yang dapat menekan harga pokok produksi (cost of good sold) yang dampaknya dapat meningkatkan tingkat kompetisi Perseroan.
- Pemanfaatan teknik-teknik terbaru yang dapat menaikkan efisiensi.
- Melakukan kerja sama dengan pihak lain yang mempunyai keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki oleh Perseroan.

RISIKO PERBEDAAN REGULASI DI LUAR NEGERI

Risiko ini dapat terjadi manakala Perseroan menjalankan bisnis di luar negeri namun tidak diikuti dengan penguasaan regulasi yang berlaku di negara tersebut, yang pada akhirnya

berdampak pada terhambatnya proses bisnis itu sendiri.

Untuk mengurangi kemungkinan risiko tersebut, dalam masa penjajagan bisnis, Perseroan mengedepankan penguasaan regulasi suatu negara di mana bisnis akan dijalankan.

Risiko Tidak Diterimanya Instrumen Perbankan Nasional oleh Perbankan Luar Negeri dimana Bisnis Perseroan Dijalankan

Risiko ini dapat terjadi manakala instrumen perbankan nasional yang akan digunakan oleh Perseroan ternyata ditolak/tidak diterima oleh lembaga perbankan luar negeri di mana bisnis Perseroan sedang dijalankan, yang berdampak pada terhambatnya proses bisnis.

Untuk mengurangi kemungkinan risiko tersebut, Perseroan berupaya semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi persyaratan yang disyaratkan, antara lain dengan memberikan cross collateral yang dikeluarkan oleh bank Nasional atau Bank Asing yang berada di Indonesia yang memiliki hubungan korespondensi dengan Bank di luar negeri tersebut.

RISIKO PEMUTUSAN KONTRAK

Hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kontrak proyek, antara lain adalah pembatalan atau pemutusan perjanjian secara sepihak yang disebabkan oleh ketidakmampuan melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian. Hal ini dapat menurunkan pendapatan Perseroan.

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko pemutusan kontrak ini maka tindakan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Strategi aliansi dalam pengerjaan proyek yang bukan menjadi kompetensinya.
- Menyiapkan alternatif solusi penyelesaian outsourcing ataupun pengalihan kepada pihak lain dalam hal diketahui bahwa ADHI mempunyai masalah teknis dalam menyelesaikan kontraknya.

RISIKO BAHAN BAKU/MATERIAL

Dalam pelaksanaan kegiatan penyelesaian proyek, bahan utama produksi berupa bahan olahan seperti semen dan produk baja bisa saja terjadi kelangkaan/kekurangan penyediaan di beberapa daerah yang dapat mengganggu penyelesaian proyek. Kelangkaan bahan dapat mengakibatkan naiknya harga bahan dan mundurnya waktu pelaksanaan sehingga dapat menyebabkan penurunan laba Perseroan.

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko ini maka tindakan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Memonitor penuh supply-demand bahan baku utama di pasar untuk dasar pembuatan keputusan yang harus dilakukan.
- Perencanaan kebutuhan bahan yang baik.
- Kontrak pengadaan barang dengan beberapa pemasok yang mengikat pemasok dalam hal harga, jumlah, dan waktu.

Di luar risiko-risiko tersebut di atas, Perseroan juga menghadapi risiko-risiko yang secara spesifik ada dalam bisnis EPC dan Investasi.

RISIKO PERSEROAN DALAM BISNIS EPC

Risiko Gagal Tender

Hal yang tidak diinginkan dalam setiap mengikuti proses tender adalah saat tender tidak berhasil dimenangkan. Hal tersebut bisa terjadi oleh karena adanya kompetitor yang memiliki penawaran lebih baik atau bisa juga terjadi karena ketidakmampuan dalam memenuhi syarat-syarat tender.

Dibandingkan dengan persiapan dalam pengerjaan proyek-proyek konvensional lainnya, biaya yang dikeluarkan untuk persiapan tender dan pengerjaan proyek EPC relatif lebih besar. Dengan demikian dapat dipastikan, kegagalan dalam mengikuti tender proyek EPC akan berdampak pada timbulnya High Cost.

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko ini maka tindakan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan efisiensi.
- Melakukan persiapan yang matang dalam mengikuti proses tender EPC.
- Membentuk konsorsium dengan perusahaan lain yang memiliki keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki Perseroan.

Risiko Dalam Pemilihan Mitra/Partner

Seperti tahun sebelumnya, saat ini tender/pengadaan proyek-proyek EPC juga masih booming, terutama proyek Power Plant. Perseroan menyadari adanya proyek-proyek EPC tersebut di satu sisi sebagai tantangan dan prospek cerah namun juga sekaligus merupakan batu ujian yang sesungguhnya karena bila tidak direncanakan secara matang dan penuh kehati-hatian akan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit.

Menyadari kekhususan dari bidang EPC khususnya untuk proyek-proyek Power Plant dan pengalamannya yang belum cukup luas, dalam mengikuti tender/pengadaan proyek-proyek EPC, Perseroan mau tak mau harus mengandeng perusahaan-perusahaan yang telah memiliki nama dan pengalaman di bidang tersebut dengan membentuk sebuah konsorsium atau Joint Operation.

Mencari dan menentukan mitra/partner kerja sama merupakan risiko tersendiri karena kesalahan dalam memilih mitra/partner kerja sama baik dalam bentuk konsorsium maupun joint operation, akan secara langsung/tidak langsung menimbulkan kerugian bagi Perseroan, karena dalam kemitraan/partnership, ada satu kesatuan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban kepada pemilik proyek/Owner. Ketidakmampuan mitra/partner dalam memenuhi kewajibannya sebagai mitra secara langsung/tidak langsung akan berimbang kepada Perseroan sebagai mitra/partner dalam kerja sama.

Untuk mengurangi terjadinya potensi risiko kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dalam memilih mitra/

partner kerja sama, perlu dilakukan due diligence/uji tuntas atas calon mitra/partner kerja sama untuk mengetahui kapabilitas, kompetensi dan performance dari segi teknis, sumber daya manusia dan keuangannya.

Risiko atas Kegagalan Desain

Berbeda dengan jasa konstruksi konvensional, di mana kontraktor hanya melaksanakan pekerjaan berdasarkan desain/rancangan yang dibuat oleh pihak lain (perencana), maka dalam proyek EPC, di samping sebagai pelaksana konstruksi, Kontraktor EPC juga sekaligus sebagai pembuat desain/rancangan (engineering) dan melaksanakan pengadaan (procurement) sendiri. Dengan demikian, tanggung jawab atas keseluruhan pekerjaan dalam proyek EPC berada pada Kontraktor EPC.

Kegagalan proyek EPC sebagai akibat dari kegagalan desain/rancangan dapat dipastikan sebagai sebuah bencana besar karena desain/rancangan merupakan kegiatan awal dari keseluruhan rangkaian pekerjaan proyek EPC yang mempunyai dampak besar pada output yang diharapkan. Mempertimbangkan beratnya tanggung jawab dalam pelaksanaan proyek EPC tersebut, Perseroan telah melakukan langkah-langkah untuk mencegah/meminalisasi risiko atas kemungkinan kegagalan desain/rancangan, antara lain dengan:

- Menggandeng partner yang memiliki kompetensi/keahlian dan pengalaman luas dalam pelaksanaan proyek-proyek EPC;
- Mengasuransikan proyek EPC pada perusahaan-perusahaan Asuransi yang bonafid;
- Mempersiapkan engineer-engineer yang handal.

RISIKO PERSEROAN DALAM BISNIS INVESTASI RISIKO PADA FASE PRA KONSTRUKSI

Risiko pada fase pra konstruksi dapat terjadi manakala Perseroan gagal memenangkan proses tender investasi yang bisa disebabkan oleh karena adanya kompetitor yang memiliki penawaran lebih baik atau bisa juga terjadi karena ketidakmampuan dalam memenuhi

syarat-syarat tender, yang berakibat pada timbulnya *High Cost*, hal ini karena biaya yang dikeluarkan untuk persiapan tender investasi relatif cukup besar berbeda dengan biaya yang dikeluarkan untuk proyek konvensional lainnya.

Untuk mengurangi kemungkinan risiko pada fase pra konstruksi, maka tindakan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan efisiensi.
- Melakukan persiapan yang matang dalam mengikuti proses tender investasi.
- Membentuk konsorsium dengan perusahaan lain yang memiliki keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki Perseroan.

Investasi atas proyek-proyek infrastruktur, khususnya untuk pembangkit tenaga listrik, pembangunan jalan tol, dan pelabuhan, memerlukan pendanaan yang cukup besar dengan masa konstruksi yang sangat panjang. Konsekuensinya, proyek semacam ini mempunyai risiko tinggi pada masa konstruksi, yang antara lain ditunjukkan dengan makin lamanya waktu yang diperlukan dalam penyelesaian konstruksi. Akibatnya, biaya yang diperlukan semakin membengkak.

Untuk mengurangi kemungkinan risiko pada fase konstruksi, Perseroan dapat mengalihkan risiko tersebut kepada pihak kontraktor yang mempunyai reputasi dan kredibilitas tinggi melalui kontrak kerja dalam bentuk *turn key project*.

RISIKO PADA FASE OPERASIONAL

Dalam proyek-proyek investasi di bidang infrastruktur, terutama yang masih bersifat monopoli, sangat tergantung dari regulasi penentuan dan penyesuaian tarif oleh pemerintah. Pengalaman yang ada selama ini, penyesuaian tarif selalu tidak tegas, bahkan setiap akan dilakukan penyesuaian tarif selalu mendapatkan protes keras dari masyarakat serta badan legislatif, yang pada akhirnya penyesuaian tarif ditentukan bukan berdasarkan pertimbangan finansial, tetapi lebih pada pertimbangan politis. Distorsi pasar sangat terkait dengan kemungkinan tidak tepatnya proyeksi pemakai jasa infrastruktur (demand

projection) yang diketahui pada saat proyek tersebut beroperasi.

Untuk mengurangi kemungkinan risiko pada fase operasional, Perseroan dapat menempuh jalan negosiasi dengan meminta kepada pemerintah untuk memberikan kompensasi dalam rangka public service obligation (PSO), dan meminta jaminan jumlah minimum pemakaian jasa dari pemerintah untuk mengurangi risiko kegagalan pasar.

8. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Komitmen Perseroan dalam tanggung jawab sosial dalam rangka kepedulian masyarakat dan lingkungan dapat dilihat dalam misi korporasi serta ADHI Principle. Pada butir 3 Misi Adhi 2007 – 2011 disebutkan, "Berperan aktif dalam program *Public-Private Partnership* (PPP) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menjalankan inisiatif-inisiatif *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia." Artinya, ADHI harus berkembang secara bisnis, namun tetap peduli terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan ikut meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat pada satu nilai ADHI yaitu dalam prinsip "humane" terdapat nilai "*preserving environment*" dan "*supporting community development*".

Secara tegas, ADHI juga menyatakan, penerapan CSR bagi ADHI adalah bertujuan:

- menjadi mitra bagi pengembangan ekonomi masyarakat yang berwatak kemanusiaan dan berkelanjutan (sustainable) dengan komitmen mengentaskan kemiskinan
- menjadi agen perubahan sosial demi peningkatan kualitas hidup yang berkaitan dengan pendidikan dan kehidupan spiritual
- mengambil inisiatif dalam pelestarian lingkungan hidup.

KOMITMEN PERUSAHAAN TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN STAKEHOLDER LAINNYA.

Perlindungan hak-hak konsumen dengan melakukan penerapan Kebijakan Mutu dan Pemeliharaan Lingkungan merupakan Komitmen yang dilakukan Perseroan yaitu :

- Mengusahakan jasa dan produk yang bermutu tinggi untuk memenuhi kelancaran, keamanan, dan kenyamanan konsumen.
- Mendorong segenap jajaran Perseroan untuk selalu meningkatkan ketrampilan dan keahlian serta selalu bertanggung jawab dan tertib dalam menjalankan tugasnya.
- Menyempurnakan sistem dan lingkungan kerja secara terus menerus ke arah yang lebih efektif dan efisien untuk mendukung tercapainya mutu pelayanan.

PEMBENTUKAN PUSAT PENGADUAN KONSUMEN DALAM HAL PELAYANAN TERBAIK KEPADA

konsumen, Perseroan memberikan Pusat Pengaduan Konsumen yang dapat dilihat dalam website www.adhi.co.id, telepon maupun facsimile, melakukan rapat koordinasi mingguan dengan owner yang merupakan arena untuk penyampaian komplain, dan klausul dalam kontrak yang mengatur tentang masa pemeliharaan.

Biaya untuk peningkatan layanan kepada konsumen telah dialokasikan pada biaya overhead, mulai dari tingkat proyek sampai ke tingkat pusat.

PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN KEPADA KONSUMEN

Dalam memberikan pelayanan kepada Dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, ADHI melakukan hal-hal sebagai berikut:

Melakukan survei kepuasan pelanggan terhadap kinerja seluruh divisi operasional. Survey dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada para Pemilik Proyek dengan sasaran untuk mengetahui tingkat kualitas kinerja Perseroan di mata para Pemilik Proyek dan masyarakat pada umumnya. Untuk menjaga obyektifitas, survey tersebut dilakukan oleh sebuah lembaga independen dan hasilnya akan dipergunakan untuk dasar dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen.

Dalam melakukan pengelolaan atas keluhan pelanggan, ADHI menetapkan penanggungjawab untuk tiap-tiap tingkatan organisasi, yaitu tingkat proyek, tingkat Divisi, dan tingkat Kantor Pusat. Biaya rework yang dikeluarkan berkaitan dengan penyelesaian keluhan pelanggan dimasukkan ke dalam biaya proyek. Realisasi biaya rework selama tahun 2009 adalah sebesar Rp5,785 miliar.

ADHI memiliki ADHI Base yang antara lain berisi metode kerja yang pernah dilaksanakan di proyek maupun inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dan diuji keberhasilannya. Melalui sarana tersebut, dan dengan memperhatikan diharapkan dapat menghindari terjadinya defect yang sama di waktu yang akan datang.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL)

Sebagai Badan Usaha Milik Negara, peran sosial ADHI dituangkan dalam Surat Peraturan Menteri Negara BUMN yang sekarang menjadi Kementerian BUMN Nomor : PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, serta Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : SE-433/MBU/2003 tanggal 16 September 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Pertanggung Jawaban atas pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dituangkan dalam sebuah Laporan Keuangan setahun sekali dan diaudit oleh Akuntan Publik yang ditunjuk Perseroan dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri BUMN. Sesuai keputusan Menteri BUMN, kinerja PKBL juga merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi penilaian atas kinerja Perseroan

PROGRAM KEMITRAAN

Program Kemitraan merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari sebagian laba perusahaan. Dimana pinjaman kepada mitra binaan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Modal Kerja atau Investasi dalam rangka pengembangan usaha.

Pinjaman program kemitraan ini mensyaratkan bahwa usaha yang diberi pinjaman adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp200 juta atau omset maksimal Rp1 miliar per tahun, telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 tahun dan WNI. Jasa administrasi bagi pinjaman ini adalah 6% per tahun, yang akan dipergunakan untuk biaya operasional penyaluran, seperti biaya survey lapangan, penagihan, pembinaan, beban administrasi, dan umum.

Sumber dana Program Kemitraan di tahun 2009 berasal dari Penyisihan Laba Bersih perusahaan tahun buku 2008 yang besarnya ditentukan berdasarkan hasil keputusan RUPS yaitu 0,25% atau Rp203.706.238 ditambah Angsuran Pokok Pinjaman, Pendapatan Jasa Administrasi dan Saldo awal tahun 2009 dengan total dana Rp1.892.877.931.

Di tahun 2009, ADHI telah menyalurkan pinjaman Program Kemitraan sebesar Rp1,717 Miliar kepada para mitra binaan di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sektor usaha yang mendapat pinjaman dari ADHI untuk tahun 2009 adalah industri, perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, jasa, dan lainnya.

Dana Program Kemitraan tersebut didistribusikan ke wilayah dengan jumlah mitra sebagai berikut :

Wilayah	Nilai (Rp.)	Jumlah Mitra
DKI Jakarta	382,500,000	21
Jawa Barat	560,000,000	20
Banten	215,000,000	13
Jawa Tengah	290,000,000	3
Jawa Timur	270,000,000	2

Sedangkan Dana Pembinaan Kemitraan dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang diharapkan dapat mendorong perkembangan usaha serta meningkatkan produktivitas Mitra Binaan atau penelitian dan pengembangan. Pembinaan dapat berupa pendidikan, pelatihan, magang, pemasaran, dan pameran. Di tahun 2009 telah dikeluarkan Dana Pembinaan Kemitraan sebesar Rp166,2 Juta yang dipergunakan untuk pelatihan dan pameran.

Mitra Binaan yang telah dibina dan diberi pinjaman sampai bisa lebih Mandiri dan tangguh dalam sisi finansial, maka diharapkan dapat menjadi *Bankable*. Sampai saat ini ada sepuluh mitra binaan ADHI yang sudah *Bankable*, diantaranya dua mitra dari Jakarta, lima mitra dari Jawa Barat, dua mitra dari Jawa Tengah dan satu mitra dari Jawa Timur.

Realisasi Penyaluran Dana Program Kemitraan Tahun 2009 (dalam Rp)

Berdasarkan Sektor

Uraian	Jumlah
Pinjaman Modal	
Sektor Industri	907,500,000
Sektor Perdagangan	530,000,000
Sektor Pertanian	10,000,000
Sektor Peternakan	10,000,000
Sektor Perkebunan	15,000,000
Sektor Perikanan	-
Sektor Jasa	195,000,000
Sektor Lainnya	50,000,000
Sub Jumlah	1,717,500,000
Beban Pembinaan	
Pendidikan & Pelatihan	44,033,350
Promosi & Pameran	46,581,000
Sub Jumlah	90,614,350
Jumlah	1,808,114,350

Berdasarkan Wilayah

Uraian	Jumlah
Pinjaman Modal	
DKI Jakarta	382,500,000
Jawa Barat	560,000,000
Banten	215,000,000
Jawa Tengah	290,000,000
Lampung	270,000,000
Jawa Timur	-
Sulawesi	-
Sub Jumlah	1,717,500,000
Beban Pembinaan	
Banten	44,033,350
DKI Jakarta	46,581,000
Sub Jumlah	90,614,350
Jumlah	1,808,114,350

PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Program Bina Lingkungan adalah merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat yang bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah sekitar wilayah kerja perseroan.

Sumber dana Program Bina Lingkungan perseroan tahun 2009 ini berasal dari penyisihan laba bersih perseroan setelah pajak tahun buku 2008 sebesar 0,5% yaitu sebesar Rp407.412.475 ditambah saldo awal dan pendapatan bunga jasa giro, dengan total dan sebesar Rp1.644.549.098.

Di tahun 2009 ADHI telah menyalurkan dana Bina Lingkungan sebanyak Rp401,28 Juta yang dialokasikan di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera Barat. Dana Program Bina Lingkungan tersebut diberikan untuk kegiatan :

- **Bantuan Bencana Alam.**
Perseroan memberikan bantuan sandang dan pangan untuk korban bencana alam di Padang sebesar Rp100 Juta dan bencana alam di Kabupaten Garut sebesar Rp100 Juta.

- Bantuan Pendidikan dan Pelatihan**
Perseroan memberikan bantuan bea siswa untuk siswa yang kurang mampu, khususnya anak karyawan yang berprestasi, pemberian ATK dan Buku Pelajaran untuk siswa, bantuan komputer, renovasi sekolah, dengan jumlah bantuan yang diberikan sebesar Rp106.27 Juta.
- Bantuan Peningkatan Kesehatan**
Perseroan memberikan bantuan untuk Pos Sehat bagi para balita dan memberikan pelayanan kesehatan kepada salah satu sekolah dengan jumlah dana sebesar Rp5 Juta.
- Bantuan Sarana dan Prasarana**
Perseroan memberikan bantuan untuk perbaikan jalan setapak dan selokan di daerah Depok dengan jumlah dana sebesar Rp2 Juta.
- Bantuan Sarana Ibadah**
Perseroan memberikan bantuan untuk kegiatan musholah dan Majelis Taklim sebesar Rp2,5 Juta.

Realisasi Penyaluran Dana Bina Lingkungan Tahun 2009 (dalam Rp)

Per Bidang

Bantuan	Jumlah
Korban Bencana Alam	100,000,000
Pendidikan & Pelatihan	106,275,000
Peningkatan Kesehatan	5,000,000
Prasarana & Sarana Umum	2,000,000
Sarana Ibadah	2,500,000
Pelestarian Alam	85,500,000
Sub Jumlah	301,275,000
BUMN Peduli	100,000,000
Jumlah	401,275,000

Per Wilayah

Bantuan	Jumlah
DKI Jakarta	77,100,000
Banten	7,500,000
Jawa Barat	100,000,000
Jawa Tengah	85,500,000
Lampung	5,000,000
Jawa Timur	11,175,000
Sumatera	105,000,000
Kalimantan	5,000,000
Sulawesi	5,000,000
Sub Jumlah	401,275,000

Dalam pelaksanaan kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Kementerian BUMN sudah memasukan dalam suatu Sistem Informasi Kementerian BUMN dengan nama www.bumn.go.id dengan nama Portal PKBL yang mencakup : Rencana Tahunan, Laporan Kinerja Triwulan, Laporan Kinerja Tahunan, Cerita Sukses, Data dan Produk Mitra, Kegiatan Bina Lingkungan, Berita, Siaran Pers, Makalah, Situs, Agenda.

KEGIATAN SOSIAL ADHI LAINNYA

Perseroan dalam rangka pelestarian Seni Budaya warisan bangsa, ADHI mengadakan lomba pertunjukan Ketoprak yang dilaksanakan di Jakarta. Di saat bersamaan diselenggarakan juga pertandingan Vokal Group antar Divisi ADHI, untuk mempererat rasa persaudaraan antar karyawan unit operasi seluruh Indonesia dan karyawan di Kantor Pusat.

Dalam meningkatkan kesadaran karyawan untuk pemakaian produk dalam negeri dan pelestarian seni budaya, Perseroan menyelenggarakan Pasar Rakyat di Jakarta yang penjualnya merupakan Mitra Binaan ADHI, produk yang dijual berupa : Batik dari Pekalongan dan Cirebon, Souvenir dari Tasikmalaya, Produk Kulit dari Garut, makanan ringan dari Kuningan, dan lain-lain. Dalam kegiatan tersebut ADHI telah memberikan dukungan dana sebesar Rp30 Juta.

Dalam rangka promosi produk Mitra Binaan ADHI mengikutsertakan Mitra Binaannya dalam Pameran Gelar Karya PKBL BUMN dan Inactraft di Jakarta Convention Center Jakarta dengan mendukung pendanaan sebesar Rp84 Juta.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PELESTARIAN ALAM DAN MANAJEMEN LINGKUNGAN

Dalam melaksanakan fungsi usahanya Perseroan bergerak dibidang Usaha Jasa Konstruksi, setiap hari bersentuhan dengan lingkungan disekitarnya dengan

berbagai aplikasi teknologi, maka perseroan dengan senantiasa menjaga keseimbangan antara pekerjaan dengan alam sekitarnya dengan menjaga kebersihan disekitar tempat kerja dan menjaga keselamatan pekerja dari hal-hal yang mengakibatkan keadaan tidak aman.

Setiap insan ADHI berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan baik di kantor maupun di proyek dengan selalu memperhatikan aspek lingkungan, menjaga kestabilan lingkungan sekitarnya dalam rangka turut memelihara kelangsungan hidup dunia. Perilaku individu unggul ini dibentuk dan ditanamkan terus menerus pada setiap insan ADHI berdasarkan nilai-nilai yang tercantum pada ADHI Principle. ADHI selalu berupaya agar setiap insan ADHI selalu peduli terhadap kelestarian lingkungan yang bertujuan agar ADHI menjadi perusahaan besar yang selalu peduli terhadap lingkungan.

Hal ini dibuktikan dengan telah didapatnya sertifikasi Manajemen Lingkungan berdasarkan ISO 14001, dimana secara periodik dilakukan assessment oleh pihak eksternal untuk memastikan apakah dalam setiap kegiatannya ADHI telah memenuhi persyaratan Standar & Peraturan perundungan yang berlaku. Sejak diperolehnya sertifikat pada tahun 2007 sampai dengan saat ini belum terdapat non conformance (NC) yang sifatnya major.

Secara organisasi telah ditetapkan penanggungjawab secara berjenjang untuk pengelolaan lingkungan, yaitu:

- Tingkat proyek adalah Kepala Proyek dibantu oleh HSE Supervisor;
- Tingkat Divisi adalah Kepala Divisi dibantu oleh Manajer Produksi;
- Tingkat Kantor Pusat adalah Finance & HR Director dibantu oleh Operating Support Department &
- General Affairs;

Pelaporan juga dilakukan secara berjenjang bersama dengan Laporan K3 dari Proyek ke Divisi, dari Divisi ke Kantor

Pusat dimana pada masing-masing tingkatan dilakukan evaluasi untuk perbaikan.

Contoh implementasi manajemen lingkungan di kantor adalah :

1. Mengurangi penggunaan listrik dan air untuk operasional Kantor ;
2. Membantu program langit biru Pemerintah dengan mensyaratkan bahwa setiap kendaraan operasional Kantor sudah lulus uji emisi;
3. Menggunakan lampu hemat energi;
4. Menggunakan freon ramah lingkungan;
5. Menurunkan jumlah pemakaian kertas;
6. Menjaga baku mutu air buangan & standar kebisingan;

Implementasi di Proyek:

1. menjaga baku mutu air buangan & standar kebisingan;
2. mengelola limbah B3;
3. berupaya mematuhi Peraturan Perundangan yang terkait dengan pelaksanaan Proyek;
4. mengelola sampah padat;
5. mengusulkan penggunaan lampu hemat energi;
6. mengusulkan penggunaan freon ramah lingkungan;
7. mengusulkan penggunaan building system management;
8. kendaraan operasional Proyek lulus uji emisi;
9. melakukan evaluasi operasi terkait aspek lingkungan yang penting.

Bantuan Pelestarian Alam

- ADHI memberikan bantuan untuk kegiatan penanaman 10.000 bibit pohon mahoni muda di Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kulon Progo Propinsi DI Yogyakarta dengan jumlah dana sebesar Rp85,5 Juta.
- Kegiatan yang sama juga dilakukan di sekitar Proyek PLTU Tarahan Lampung sejumlah 1.000 pohon usia sedang dengan nilai Rp80 juta dan di sekitar proyek Banjir Kanal Timur sejumlah 1.176 pohon trembesi usia sedang dengan nilai Rp220 juta.

9. PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI

Dalam tahun 2009, anggota Direksi maupun Dewan Komisaris tidak mempunyai perkara penting yang sedang dihadapi. Sedangkan Perseroan mempunyai beberapa perkara sbb.:

1. Proyek Jakarta Monorail

Pada proyek tersebut ADHI sebagai Kontraktor Design and Build dan sebagai pemilik proyek adalah PT Jakarta Monorail. Saat ini proyek terhenti dikarenakan PT Jakarta Monorail belum dapat menyediakan pendanaan proyek sehingga pekerjaan-pekerjaan yang telah diselesaikan oleh ADHI tidak terbayar, sehingga ADHI melakukan gugatan kepada PT Jakarta Monorail atas piutang tersebut. Dalam persidangan ADHI dan PT Jakarta Monorail sepakat untuk melakukan perdamaian. Adapun isi perdamaian antara lain:

- PT Jakarta Monorail mengakui seluruh hutangnya terdiri dari pokok dan bunga kepada ADHI,
- PT Jakarta Monorail akan membayar kepada ADHI setelah adanya *financial closed* dan *draw down* dana,
- ADHI akan mendapat prioritas utama untuk mendapatkan pembayaran sebagai piutang yang diutamakan/kreditur preferen.

Proyek tersebut saat ini sedang dilakukan audit oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan BPKP Perwakilan Provinsi DKI untuk melakukan penilaian kelayakan atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka penjajaran pengambilalihan proyek oleh Pemerintah.

Kondisi tersebut akan sedikit berpengaruh terhadap cashflow, namun ADHI berkeyakinan piutang tersebut akan terbayar. Hal ini dikarenakan pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden No.1 Tahun 2010 tentang Prioritas Pembangunan dimana Proyek

Monorail merupakan salah satu proyek yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan.

Nilai tagihan yang dicairkan dan tagihan yang belum dibayar dapat dilihat pada Laporan Keuangan Audited tahun buku 2009 pada bagian terakhir Laporan Tahunan ini.

2. Proyek Shangri-la dan Merweb Tower Doha City Centre Qatar

ADHI sebagai sub kontraktor dari Al Habtoor Engineering. Pada proyek ini terjadi pemutusan kontrak secara sepihak oleh Al Habtoor Engineering dengan alasan ADHI tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak, sehingga jaminan pelaksanaan dicairkan dan tagihan-tagihan atas pekerjaan yang telah diselesaikan tidak dibayar.

Atas hal tersebut ADHI berusaha melakukan negosiasi dengan Al Habtoor Engineering agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah. Namun apabila cara tersebut tidak berhasil akan ditempuh jalur hukum yaitu melalui Arbitrase.

Permasalahan tersebut akan berpengaruh kepada cash flow dan berpotensi menimbulkan kerugian, namun ADHI secara bertahap melakukan penyisihan atas pencairan jaminan dan tagihan yang belum terbayar. Nilai jaminan yang dicairkan dan tagihan yang belum dibayar dapat dilihat pada Laporan Keuangan Audited tahun buku 2009 pada bagian akhir Laporan Tahunan ini.

ADHI dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dibantu oleh Pemerintah RI antara lain Utusan Khusus Pemerintah RI untuk Urusan Timur Tengah, Kementerian BUMN, Kedutaan Besar RI di Qatar dan Kantor Hukum dari Indonesia maupun Lawyer yang bertaraf International dan berpraktek di Qatar. Dengan demikian ADHI berkeyakinan bahwa dengan

KETERBUKAAN INFORMASI

Bulan	Kegiatan	Media
Januari	Pemberitahuan Meninggal Dunia Bapak Mas'oeed Mahfuz Komisaris Independen ADHI	BEI
	Penyampaian informasi tentang Rencana Buyback Saham ADHI	BEI, Bapepam-LK
	Penyampaian Laporan Realisasi Buyback Saham ADHI	BEI, Bapepam-LK
Februari	Pemberitahuan Informasi Perolehan Proyek Jalan Tol Semarang-Solo	BEI
	Koreksi Pemberitahuan Informasi Perolehan Proyek Jalan Tol Semarang-Solo	BEI
Maret	Penyampaian Informasi Pembayaran Bagi Hasil ke-7 Sukuk Mudharabah I	BEI, Bapepam-LK
April	Pemberitahuan Informasi Perolehan Proyek Kuningan City dan Bandara Kuala Namu	BEI
	Pemberitahuan Informasi tentang Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan per 31 Desember 2008 (Diaudit)	BEI, Bapepam-LK
	Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan per 31 Desember 2008 (Diaudit)	BEI, Bapepam-LK
	Penyampaian Laporan Realisasi Buyback Saham ADHI	BEI, Bapepam-LK
	Penyampaian Laporan Keuangan per 31 Desember 2008 (Diaudit)	Surat Kabar
	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	BEI, Bapepam-LK
	Penyampaian Laporan Keuangan per Maret 2009 (Tidak Diaudit)	BEI, Bapepam-LK
Mei	Penyampaian Materi Merry Lynch Conference	BEI
	Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham	Surat Kabar
	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham	BEI, Bapepam-LK
	Penyampaian Materi Analyst Meeting	BEI
	Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham	Surat Kabar
	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham	BEI, Bapepam-LK
Juni	Penyampaian Informasi Pembayaran Bagi Hasil ke-8 Sukuk Mudharabah I	BEI, Bapepam-LK
	Pemberitahuan Informasi tentang Perubahan Tanggal Dimulainya Periode Perdagangan Tanpa Hak Dividen (Ex Dividends)	BEI, Bapepam-LK
	Pemberitahuan Informasi Perolehan Proyek Taxiway Bandar Udara Medan Baru	BEI
	Penyampaian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham	Surat Kabar
	Penyampaian Bukti Iklan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham	BEI, Bapepam-LK
Juli	Penyampaian Informasi tentang Revisi Besaran Dividen Tahun 2008	BEI, Bapepam-LK
	Penyampaian Laporan Keuangan per Juni 2009 (Tidak Diaudit)	BEI, Bapepam-LK
September	Pemberitahuan Informasi Perolehan Proyek Stadion Gedebage	BEI
	Penyampaian Informasi Pembayaran Bagi Hasil ke-9 Sukuk Mudharabah I	BEI, Bapepam-LK
Oktober	Penjelasan atas Pertanyaan Bursa tentang Pemberitaan tentang ADHI di media massa	BEI, Bapepam-LK
	Penyampaian Informasi Terkait Bencana Alam di Sumbar	BEI
	Penjelasan atas volatilitas transaksi yang Dapat Mempengaruhi Harga Saham ADHI	BEI
	Penyampaian Laporan Keuangan per September 2009 (Tidak Diaudit)	BEI, Bapepam-LK
	Koreksi Penyampaian Laporan Keuangan per September 2009 (Tidak Diaudit)	BEI, Bapepam-LK
November	Penyampaian Materi Citi Indonesia Investor Conference	BEI
	Pemberitahuan Penyelenggaraan Public Expose	BEI, Bapepam-LK
	Penyampaian Materi Analyst Meeting	BEI, Bapepam-LK
	Penyampaian Materi Public Expose	BEI, Bapepam-LK
Desember	Laporan Hasil Public Expose	BEI, Bapepam-LK
	Penyampaian Informasi Pembayaran Bagi Hasil ke-10 Sukuk Mudharabah I	BEI
	Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	Surat Kabar
	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	BEI, Bapepam-LK

langkah-langkah tersebut memitigasi risiko kerugian.	4. Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melalui Gugatan No. 1382/pdt.G/2008/PNSlt, tanggal 27 Oktober 2008, Perseroan mengajukan gugatan wan prestasi kepada PT Lumbung Mustika Perkasa atas pembayaran (pokok ditambah bunga) senilai Rp52.500.000.000,- Pembangunan Proyek Mall Merdeka Square di Tangerang.	Perseroan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah dinyatakan bersalah atas dugaan pelanggaran terhadap larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan Perseroan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 1.500.000.000,-
3. Perkara No. 409/PDT.PLW/2007, Perseroan melakukan gugatan perlawanan atas penetapan eksekusi sebagai tindak lanjut dari permohonan eksekusi sertifikat hak tanggungan No. 103/S&P/IX/07 tanggal 3 September 2007 yang dimohonkan oleh PT Hero Supermarket Tbk. Perseroan merasa berhak atas asset bangunan yang akan dilelang oleh PT Hero Supermarket, karena sampai dengan saat diajukan gugatan Perseroan belum sepenuhnya menerima pelunasan pembayaran dari PT Lumbung Mustika Perkasa selaku pemilik proyek.	Tanggal 27 Agustus 2009 atas perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk mengabulkan permohonan Perseroan. Atas putusan ini PT Lumbung Mustika Perkasa dan PT Hero Supermarket Tbk. telah mengajukan banding.	Sehubungan dengan Putusan Perkara No. 62/KPPU-L/2008, tanggal 18 Mei 2009, Perseroan telah dinyatakan melanggar pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, atas Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumbawa, Paket Peningkatan Jalan Sejorong -Tetar Lunyuk Tahun Anggaran 2008.
Gugatan yang telah diajukan oleh Perseroan berdasarkan Putusan PN Tangerang tanggal 31 Juli 2008, gugatan Perseroan ditolak. Atas putusan tersebut Perseroan mengajukan banding dan telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Tangerang yang mengabulkan permohonan banding Perseroan. Saat ini PT Hero Supermarket Tbk. dan PT Lumbung Mustika Perkasa, mengajukan Kasasi atas Putusan No. 84/PDT/2008 tanggal 2 Desember 2008.	Pada saat Laporan Tahunan ini dibuat perkara tersebut sudah disepakati untuk diselesaikan dengan perdamaian yaitu disepakati untuk menjual bersama asset tanah dan bangunan yang menjadi pokok perkara yang hasilnya akan dibagi sebagaimana diatur dalam kesepakatan.	Perseoan atas putusan KPPU tersebut mengajukan Gugatan Keberatan di Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor Perkara : 261/pdt.g/2009/pn.dps tanggal 24 Juni 2009. Atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar melalui putusan tanggal 12 Oktober 2009 Pengadilan Negeri Denpasar menolak Gugatan Keberatan Perseroan.
Pada saat Laporan Tahunan ini dibuat perkara tersebut sudah disepakati untuk diselesaikan dengan perdamaian yaitu disepakati untuk mensual bersama asset tanah dan bangunan yang menjadi pokok perkara yang hasilnya akan dibagi sebagaimana diatur dalam kesepakatan.	Dengan demikian dampak terhadap keuangan Perseroan sedikit mempengaruhi arus kas dan biaya bunga bank namun relatif tidak signifikan.	Saat ini Perseroan telah melakukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung
Dengan demikian dampak terhadap keuangan Perseroan sedikit mempengaruhi arus kas dan biaya bunga bank namun relatif tidak signifikan.	Dalam perkara ini Perseroan melakukan kerjasama operasi dengan PT Metro Lestari Utama dengan porsi 60 : 40. Perseroan memenangkan tender atas Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumbawa, Paket Peningkatan Jalan Sejorong -Tetar Lunyuk. Namun setelah dinyatakan sebagai pemenang ada pihak yang melaporkan kepada KPPU bahwa telah terjadi persekongkolan dalam proses tender tersebut.	Dengan demikian dampak terhadap keuangan Perseroan sedikit mempengaruhi arus kas dan biaya bunga bank namun relatif tidak signifikan.
		6. Peradilan Tata Usaha Negara di Semarang. Perseroan melalui surat gugatannya No. 21/G/TUN/2009/PTUN.Smg, menggugat Badan Pertahanan Nasional Semarang, atas Terbitnya

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 38 Desa Randugarut Kotamadya Semarang atas nama PT Simongan Plastik Factory. Dalam sertifikat tersebut sebagian tanah milik Perseroan masuk kedalam batas tanah milik PT Simongan Plastik Factory, sehingga tanah Perseroan berkurang +/- 205 m².

Atas perkara tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui putusan Perkara No. 21/G/TUN/2009/PTUN.Smg, tanggal 6 Oktober 2009, mengabulkan Permohonan Perseroan.

Menanggapi putusan tersebut, Badan Pertanahan Nasional Semarang, dan Intervien (PT Simongan Plastik Factory) Pada tanggal 30 Oktober 2009 melakukan upaya banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Atas perkara tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mengabulkan permohonan banding Badan Pertanahan Nasional Semarang, dan Intervien (PT Simongan Plastik Factory).

Dampak terhadap keuangan Perseroan tidak berpengaruh terhadap arus kas dan biaya bunga bank.

10. AKSES DATA DAN INFORMASI PERUSAHAAN

Keterbukaan (*transparency*) kepada para pemegang saham dan masyarakat luas telah dilakukan dalam bentuk keterbukaan informasi melalui berbagai media dan kegiatan pengungkapan (*disclosure*) sesuai dengan peraturan otoritas pasar modal. Hal ini sejalan dengan kebijakan Perseroan untuk menegakkan dan mendorong keterbukaan. Dan pada tahun 2009 ADHI telah menerima penghargaan *Best Disclosure and Transparency* oleh *Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)* dan Majalah *Business Review*.

Seluruh kegiatan keterbukaan dilakukan di bawah koordinasi *Corporate Secretary* melalui bagian *Investor Relations* dan *Corporate Communications*. Perseroan secara konsisten telah melakukan siaran pers, analyst meeting, majalah internal yang juga disampaikan kepada para mitra kerja ADHI dan pemangku kepentingan lainnya, pameran, konferensi di dalam maupun di luar negeri serta pemaparan publik. Selama 2009, Perseroan telah mempublikasikan siaran pers yang berisi berbagai perkembangan material seperti perolehan kontrak baru dan klarifikasi atas pemberitaan proyek Monorail di media serta mempublikasikan empat laporan keuangan triwulanan. Selain itu seluruh publikasi kegiatan Perseroan juga dapat diakses masyarakat luas melalui website ADHI, www.adhi.co.id dan sub portal pada www.bumn.go.id.

11. ETIKA PERUSAHAAN

Sebagai perusahaan jasa konstruksi terpercaya, reputasi ADHI merupakan asset yang sangat berharga yang harus senantiasa dipertahankan dan dikembangkan oleh seluruh jajaran ADHI.

Etika Perusahaan dan hukum merupakan hal yang harus dipahami dimengerti dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Perseroan dalam melakukan aktifitas bisnis. Perilaku karyawan yang bertentangan dengan etika perusahaan dan hukum akan berdampak pada kepercayaan dan reputasi Perseroan.

Perseroan pada tahun 2007 telah membangun etika perusahaan yang disebut juga dengan budaya "ADHI" (Advanced, Determined, Humane, Inspiring) atau ADHI Principles yang dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk 78 macam perilaku yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Perseroan. Hal tersebut dibangun dalam upaya mempertahankan kepercayaan dan dalam rangka mencapai Visi dan Misi ADHI.

Sebagai upaya penegakan pelaksanaan ADHI Principles tersebut, manajemen akan melakukan penilaian atas konsistensi perilaku jajaran Perseroan dalam mengamalkan ADHI Principles tersebut. ADHI Principles telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan.

Sedangkan pada tahun 2009, ADHI melaksanakan survey keterikatan karyawan (Engagement Survey) yang dilakukan oleh PT Synovate dalam rangka mengukur iklim organisasi perusahaan. Hasil pelaksanaan survey tsb. akan ditindaklanjuti dengan penyusunan dan pelaksanaan program peningkatan atas rekomendasi yang disampaikan.

12. LAIN-LAIN

Apabila pada tahun-tahun sebelumnya, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan audit atas laporan tahun buku yang bersangkutan, maka pada RUPS Tahun 2009 telah ditetapkan langsung KAP Husni, Mucharam & Rasidi untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan tahun buku 2009.

Untuk keperluan monitoring kinerja anak-anak perusahaan, manajemen telah menugaskan Business Development Department melakukan analisa atas laporan manajemen anak perusahaan dan sekaligus melakukan koordinasi dengan komisaris anak perusahaan.

Penyelenggaraan Rapat Komisaris dan Direksi selama tahun 2009 sebanyak 15 kali, dengan tingkat kehadiran sebagaimana terlihat pada tabel.

PROFIL DEWAN KOMISARIS



Ir. Imam Santoso Ernawi, MCM, M.Sc.

Warga Negara Indonesia, dilahirkan pada tanggal 10 Oktober 1955 (54 Tahun) di Tuban. Meraih gelar S1 Teknik Arsitektur dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1979, dan S2 Construction Management, Engineering Policy dari Washington University, St. Louis, AS pada tahun 1991. Menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum. Jabatan lain yang pernah dipegang antara lain, yaitu: Staf Ahli Menteri PU Bidang Keterpaduan Pembangunan (2005-2007); Kepala Pusat Kajian Kebijakan, Dep. PU (2003-2005); Direktur Bina Teknik, Ditjen. Perumahan dan Permukiman, Dep. Kimpraswil (2001-2003); Kepala Biro Perencanaan dan Informasi Publik, Dep. Kimbangwil (1999-2001); Direktur Bina Program Ditjen. Cipta Karya Dep. PU (1998-1999); Kepala Subdit Tata Bangunan Ditjen. Cipta Karya Dep. PU (1994-1998). Keanggotaan profesi antara lain Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), Himpunan Ahli Manajemen Konstruksi Indonesia (HAMKI), Society Value Engineers (SAVE), dan Construction Management Association of America (CMAA).



Ir. Harry Susetyo Nugroho, MBA

Warga Negara Indonesia, dilahirkan pada tanggal 22 September 1955 (54 tahun) di Jakarta. Meraih gelar S1 Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1980, dan Master dari University of Denver, AS pada tahun 1988. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang. Saat ini menjabat sebagai Deputi Meneg BUMN Bidang Logistik dan Pariwisata. Jabatan lain yang pernah dipegang antara lain yaitu: Asisten Deputi Urusan Usaha Industri Lainnya (2002-2003); Kepala Bidang Usaha Aneka Industri Lainnya (2001-2002); Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Persero Industri dan Perdagangan (2000-2001); Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Usaha Pertambangan (1999-2000); Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Usaha Industri Manufaktur dan Pertambangan (1998-1999); Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Jasa Umum (1996-1998); Direktur PT Berikat Nusantara (1995-1996); Kasubdit Pendanaan dan Sumber Daya (1993-1995); Kepala Seksi Pertambangan dan Energi (1990-1993).



Gatot Trihargo, Ak., MAFIS

Warga Negara Indonesia, dilahirkan pada tanggal 29 Agustus 1960 (49 tahun) di Yogyakarta. Meraih gelar S1 Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, pada tahun 1989 dan Master of Accountancy and Financial Information Systems (MAFIS) dari Cleveland State University, Cleveland, Ohio, AS, pada tahun 1993. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang. Saat ini menjabat sebagai: Asisten Deputi Urusan Informasi dan Administrasi Kekayaan BUMN, Kementerian BUMN sejak 2006; Jabatan lain yang pernah dipegang antara lain yaitu: Staf Menteri Negara BUMN (2006-2007); Staf Sekretaris Kementerian Negara BUMN (2004-2006); Staf Khusus BUMN (2002-2004); BPPN (1999-2002); Kepala Seksi Pengawasan Usaha Patungan I Pertamina BPKP (1995-1999); Ketua Tim Pemeriksaan Restitusi Pajak (1989-1990); Anggota Tim Deputi Pengawasan Perminyakan dan Gas Bumi, Pertamina, BPKP (1983-1986).

Murhadi, S.Sos, M.Si.

Warga Negara Indonesia, dilahirkan pada tanggal 7 Mei 1950 (59 tahun) di Surakarta. Lulus AKABRI Darat pada tahun 1973 dan lulus SESKOAD pada tahun 1990. Meraih gelar S1 Ilmu Administrasi Negara dari Universitas Islam Malang pada tahun 2000 dan S2 Ilmu Administrasi Negara dari Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2002. Menjabat sebagai

Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang. Jabatan lain yang pernah dipegang antara lain yaitu: Bupati Kepala Daerah Tingkat II Probolinggo (1998-2003); Asisten Logistik Kodam V Brawijaya (1997-1998); Kazidam V Brawijaya (1995-1997); Pabandya 3/Devisa Paban II Ren Srenad (1993-1995); Kabag Inven Subdit Binmatzi Ditziad (1991-1993); Gumil Golvdepnubika Pusdikzi (1990-1991); Pabanda Renops Sops ABRI (1984-1990); Pasi II/Ops Yonzikon 12 (1981-1984); Dankiziban Yonzikon 12 (1979-1981); Paur Diklat Yonzikon 12 (1977-1979); Danton 1 K.I.A. Yonzikon 12 (1974-1977).



Amir Muin, BME, M.Sc.

Warga Negara Indonesia, dilahirkan pada tanggal 1 Desember 1943 (66 tahun) di Bukittinggi. Memperoleh gelar BME dari Akademi Teknik PUTL jurusan Mesin Departemen Industri Departemen Perindustrian di Jakarta pada tahun 1974. Menjabat sebagai Komisaris

Independen Perseroan sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang. Jabatan lain yang pernah dipegang antara lain yaitu: Komisaris Independen PT Perkebunan Nusantara VIII (2003-2008); Sekjen KPKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (2000-2004); Asisten Deputi IV Menpan Urusan Evaluasi Tata Laksana dan Kinerja Pelayanan Publik (2000); Pembantu Asisten Bidang Kebijaksanaan Menko Wabengpan Urusan Kebijaksanaan PAN (1998-2000); Pembantu Asisten Bidang Ketatalaksanaan Menpan Urusan Pelayanan Umum (1989-1998); Kepala Bagian Analisa Hasil Pengawasan, Itjen. Dept. PU (1983-1989); Kepala Sub. Bagian Analisa & Evaluasi Bagian Informasi & Tata Laksana Ditjen Bina Marga, Dept. PU (1977-1983) .



PROFIL DEWAN DIREKSI



Bambang Triwibowo

Warga Negara Indonesia, dilahirkan pada tanggal 24 Agustus 1953 (56 tahun) di Cilacap. Memperoleh gelar S1 bidang Teknik Sipil dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1979 dan Sekolah Bisnis Manajemen Prasetya Mulya pada tahun 2001. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak Juni 2008 sampai dengan sekarang. Sebelumnya pernah menjabat sebagai: Direktur Operasi PT Pembangunan Perumahan (Persero) atau PT PP (2004-2008); Direktur Teknik & Pemasaran PT PP (2002-2004); Kepala Divisi Operasi II (1999-2002); Kepala Cabang PT PP (1992-1999); Manager di PT PP (1984-1992); Asisten Dosen di Jurusan Teknik Sipil UGM Yogyakarta (1977-1979).



Indradjaja Manopol

Warga Negara Indonesia, dilahirkan pada tanggal 31 Juli 1958 (51 tahun) di Surabaya. Meraih gelar S1 bidang Teknik Sipil dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya pada tahun 1984. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang. Juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Adhi Realty dan sebagai Representative Partner Adhi Oman LLC. Sebelumnya pernah menjabat sebagai: Kepala Cabang I Medan (2001-2006); Audit Supervisor (2000-2001); Manajer Pemasaran Adhimix Precast (1998-2000); Manajer Pemasaran Adhi Beton (1991-1998); Kabag. Teknik Unit Adhi Property (1991-1991); Manajer Teknik JO ADHIKMAS (1991-1991); Office Engineer Proyek-Proyek di Sulawesi (1988-1991); Operation Manager Proyek-Proyek di NTT (1986-1988); Kepala Proyek-Proyek di Jawa Timur (1979-1986).



Bambang Pramusinto

Warga Negara Indonesia, dilahirkan pada tanggal 11 September 1959 (50 tahun) di Semarang. Meraih gelar S1 Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung, pada tahun 1983. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang. Sebelumnya pernah menjabat sebagai: Kepala Divisi Konstruksi II (2007-2010); Kepala Cabang VII Balikpapan (2000-2007); Kepala Bagian Teknik merangkap Kepala Cabang VIII Balikpapan (1998-2000); Koordinator Kepala Proyek-proyek Pengembangan Bandara Pattim (1997-1998).

M. Fauzan

Warga Negara Indonesia, dilahirkan pada tanggal 8 April 1953 (56 tahun) di Gresik. Meraih gelar S1 Teknik Sipil dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, pada tahun 1978 dan S2 Manajemen dari STM Prasetya Mulya pada tahun 1994. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang. Sebelumnya pernah menjabat sebagai: Kepala Divisi Konstruksi I, Jakarta (1998-2001); Kabag/Manager SDM Divisi Konstruksi I, Jakarta (1999-2001); Kepala Divisi ME, Jakarta (1996-2000); Kepala Divisi Gedung, Jakarta (1996-1998); Kepala Divisi Konstruksi II, Jakarta (1996); Kepala Cabang IV, Jakarta & Jawa Barat (1991-1996); Kepala Cabang merangkap Kabagtek Cabang V & VI, Aceh & Sumut (1990-1991); Wakil Kepala Cabang V & VI (Aceh & Sumut) (1989-1990); Kepala Bagian Teknik Cabang III, Semarang (1987-1990); Resident Engineer Cabang Lampung (1979-1981); Resident Engineer Cabang Kalimantan Barat (1978-1979).



Supardi

Warga Negara Indonesia, dilahirkan pada tanggal 2 Maret 1958 (51 tahun) di Cirebon. Meraih gelar S1 bidang Teknik Sipil dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, pada tahun 1983 dan S2 dari STIE IBII pada tahun 2003. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang. Sebelumnya pernah menjabat sebagai: Kepala Divisi Perekayasaan (2003-2006); Wakil Kepala Divisi Perekayasaan (2002-2003); Kepala Divisi ME (2000-2003); Wakil Kepala Divisi ME (1996-2000); Kepala Bagian Teknik (1991-1996); Kepala Proyek (1987-1991).



KOMITE AUDIT

Ketua

Murhadi

Riwayat singkat Murhadi disajikan pada Profil Komisaris halaman 69.



Anggota

Gatot Trihargo

Riwayat singkat Gatot Trihargo disajikan pada Profil Komisaris halaman 68.



Anggota

Erick

Dilahirkan pada tanggal 18 Mei 1973 (36 tahun) di Jakarta, Lulusan S2 Manajemen Akuntansi dan S1 Ekonomi dan Hukum dari Universitas Indonesia.



Anggota

Slamet Widodo

Lulusan S1 Teknik Arsitektur Universitas Borobudur yang dilahirkan pada 19 Agustus 1973 (36 tahun) dengan pengalaman kerja selama 10 tahun di beberapa perusahaan konstruksi.



Anggota

Syaiful

Lahir di Pariaman pada 15 Agustus 1958 (51 tahun). Lulus Sarjana STAN Jakarta pada tahun 1989. Mengawali karir sebagai Auditor pemerintah di BPKP (1981-2000). Anggota Komite Audit pada PT Perkebunan Nusantara XI (2006-sekarang). Anggota Komite Audit pada Perum Penjaminan Kredit Indonesia (2006-sekarang). Konsultan Bidang Akuntansi dan Keuangan pada RSAB Harapan Kita (2008-sekarang), RS Ananda Bekasi (2003-sekarang), Institut Pertanian Bogor (2004-sekarang). Staf Ahli Dewan Komisaris pada PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Bandar Lampung (2006-2007). Anggota Komite Audit pada PT Perkebunan Nusantara VII Bandar Lampung (2004-2006).



KOMITE KEBIJAKAN CORPORATE GOVERNANCE

Ketua



Gatot Trihargo

Riwayat singkat disajikan pada profil Komisaris Halaman 68.

Anggota



AP Purnomo Widodo

Lahir 9 Agustus 1968 (41 tahun) di Semarang, meraih gelar MBA dari International University of Japan (UIJ) Nagata tahun 2001. Mengawali karir sebagai auditor pemerintah di BPKP (1990-1999). Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia Pusat Kompartemen Sektor Publik tahun 2005-2008. Sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang menjadi konseptor, penulis pedoman GCG dan quality assurance atas assessment GCG di BUMN.

Anggota



Bin Nahadi

Dilahirkan pada tanggal 12 Februari 1976 (33 tahun) di Boyolali. Lulus sarjana dari STAN tahun 1999, dilanjutkan dengan meraih gelar MBA dari University of The Thai Chamber of Commerce Bangkok Thailand tahun 2005. Saat ini juga menjabat sebagai Pengajar di STAN, Anggota Komite Audit PT Hutama Karya, Peneliti The Indonesia Economic Intelligence.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Ketua

Murhadi

Riwayat singkat Murhadi, disajikan pada Profil Komisaris halaman 69.



Anggota

Antonius Alijoyo

Kelahiran Jakarta 25 November 1963 (46 tahun), meraih gelar S2 dari IPPM. Saat ini menjabat sebagai Asia Pasific Group Director of PRMIA, anggota Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), dan Leading Consultant di Indonesia bidang Corporate Governance dan Enterprise Risk Management.



Anggota

Eddy F. Sinaga

Lahir di Siantar 10 Juni 1958 (51 tahun), meraih gelas S1 dari STAN. Mengawali karir sebagai auditor pemerintah di BPKP. Kemudian bekerja di BPPN sampai dengan tahun 2004 dengan posisi terakhir sebagai Senior Vice President di Unit Aset Manajemen Investasi (AMI). Saat ini bekerja sebagai konsultan swasta.



Corporate Secretary



Kurnadi Gularso

Lahir di Surabaya 26 Mei 1966 (43 tahun), lulusan Sarjana Teknik Sipil Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya dan lulus S2 Bidang Strategic Management dari STM Prasetiya Mulya. Menjabat sebagai Corporate Secretary sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang. Komisaris PT Adhicon Persada (2009-sekarang). Direktur Adhi MultiPower Pte. Ltd (2008-sekarang). Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Bina Adhi Sejahtera (2008-2009). Direktur Teknik Dana Pensiun Bina Adhi Sejahtera (2005-2008). Regulator Member dari Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia, Presidium Forum Humas BUMN (2006-sekarang). Marketing Manager Divisi Konstruksi II (2002-2004). General Manager Adhi Lao Precast Corporation, Philippines (2001-2002). Kepala Bagian Teknik Divisi Adhimix & Precast (1996-2001). Plant/Area Manager Unit Adhimix & Precast (1991-1996). Mengikuti dan menjadi pembicara di berbagai pelatihan dan seminar baik di dalam maupun luar negeri.

Kepala Audit Internal



Budhi Hidayati

Lahir di Bandung pada tanggal 12 Februari 1956 (53 tahun). Lulus Sarjana Teknik Sipil Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 1982. Menjabat sebagai Chief of Internal Audit sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang. Auditor Internal pada Internal Audit/ Satuan Pengawasan Intern (2003-2010). Manajer Pengendalian dan Pembinaan Proyek Divisi P3T (1997-2003). Kasie Pengendalian Proyek Cabang Semarang (1985-1992), Kasie Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu Divisi P3T (1992-1997). Mengawali karir sebagai Estimator Cabang Semarang (1983-1985).



JARINGAN DAN ALAMAT



KANTOR PUSAT

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18
Jakarta 12510 - Indonesia
P. +62 21 797 5312
F. +62 21 797 5311
E. corsec@adhi.co.id
www.adhi.co.id

DIVISI

DIVISI KONSTRUKSI I

Jl. Iskandarsyah Raya No. 65 A-B
Jakarta 12160 - Indonesia
P. +62 21 7278 8050
F. +62 21 7278 8051
E. adhicons1@adhi.co.id

DIVISI KONSTRUKSI II

Jl. Ir. H. Juanda No. 39
Jakarta 10120 - Indonesia
P. +62 21 345 5731
F. +62 21 345 5730
E. adhicons2@adhi.co.id

Jl. Cilaki No. 57
Bandung 40114 - Indonesia
P. +62 22 721 3346
+62 22 710 7205
+62 22 723 4156
F. +62 22 727 1605
E. adhibdg@adhi.co.id

DIVISI KONSTRUKSI III

Jl. Dr. Mansyur No. 169
Medan 20121 - Indonesia
P. +62 61 821 2607- 9
+62 61 821 5454
F. +62 61 821 2610
E. adhimes@adhi.co.id

Jl. Babu Rahma No.7 Setui
Banda Aceh, NAD - Indonesia
P. +62 651 429 59
F. +62 651 429 59

Jl. Rambutan No. 27
Pekanbaru 28294 - Indonesia
P. +62 761 561 330
F. +62 761 561 329
E. adhipku@adhi.co.id

Jl. Khatib Sulaeman No. 68
Padang 25135 - Indonesia
P. +62 751 705 2115
F. +62 751 705 2115

Jl. Blekok Raya No. 25
Rt. 25/Rw. 08 Kota Baru
Jambi - Indonesia
P. +62 741 410 64
F. +62 741 410 64

Jl. Residen Abdul Rozak
Komp. Perum. Kebun Sirih Satelit
Blok A No.1
Palembang 30114 - Indonesia
P. +62 711 813 449
F. +62 711 811 644
E. adhitgk@adhi.co.id
Jl. Arief Rahman Hakim No. 38
Bandar Lampung 35132 - Indonesia
P. +62 721 708 966
F. +62 721 708 964

Jl. Tembok Baru No. 6
Bengkulu 38222 - Indonesia
P. +62 736 21662
F. +62 736 21662

DIVISI KONSTRUKSI IV

Jl. Gayung Kebonsari No. 167A
Surabaya 60231 - Indonesia
P. +62 31 828 7251
+62 31 829 1671
+62 31 829 0910
F. +62 31 829 0710
E. adhisub@adhi.co.id

Jl. Pemuda No. 82
Semarang 50133 - Indonesia
P. +62 24 354 7455
+62 24 354 7456
+62 24 351 6474
F. +62 24 355 1911
E. adhisrg@adhi.co.id

DIVISI KONSTRUKSI V

Jl. Milono No. 16
Balikpapan 76112 - Indonesia
P. +62 542 736 315
F. +62 542 735 221
E. adhibpn@adhi.co.id

Jl. Uray Bawadi No. 25
Pontianak - Indonesia
P. +62 561 734 860
F. +62 561 732 508
Jl. Nusantara No. 1
Loktabat Selatan
Banjarbaru - Indonesia
P. +62 511 477 3424
F. +62 511 477 3424

DIVISI KONSTRUKSI VI

Jl. Letjen. Hertasning B II/02
Makassar 90222 - Indonesia
P. +62 411 867 176
+62 411 867 183
F. +62 411 862 212
E. adhimks@adhi.co.id

Perum. Vuria Indah Jalur V No. 225
Jayapura - Indonesia
P. +62 967 588 346
F. +62 967 588 346

Jl. Camar No. 82 HBM
Sorong - Indonesia
P. +62 951 329 828
F. +62 951 329 828

Jl. Nusantara IV Trikora, Wosi Dalam
Manokwari - Indonesia
P. +62 986 212 269
F. +62 986 212 269

Jl. Istiqlal Lingkungan II No. 78
Kampung Arab, Manado - Indonesia
P. +62 431 852 893
F. +62 431 852 893

DIVISI KONSTRUKSI VII

Jl. Merdeka VIII/6, Denpasar
Bali 80235 - Indonesia
P. +62 361 244 722 - 3
+62 361 246 197
F. +62 361 246 196
E. adhidps@adhi.co.id

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 35-37
Pagesangan, Mataram
NTB - Indonesia
P. +62 370 626 894
F. +62 370 626 894

Jl. Cak Doko No. 6, Kupang
NTT - Indonesia
P. +62 380 838 228
F. +62 380 831 444
E. adhikupang@telkom.net

Jl. Wolter Monginsidi
RT. 001/RW. 01, Passo
Maluku - Indonesia
P. +62 911 361 036
F. +62 911 361 036

DIVISI EPC

Jl. Iskandarsyah I No. 8, Kebayoran Baru
Jakarta 12160 - Indonesia
P. +62 21 7279 6567
F. +62 21 7279 6568
E. epc@adhi.co.id

DIVISI INTERNASIONAL

INDONESIA

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18 Lt. 3
Jakarta 12510 - Indonesia
P. +62 21 7130 0707
F. +62 21 7918 2927
E. adhi.international@adhi.co.id

QATAR

PO Box 55126, Doha - State of Qatar
Ramanda Signal Area
Al-Mana Building, 2nd Floor, Office #6
P. +974 437 6286
F. +974 431 4467

INDIA

Plot No. N3/3 IRC Village, Nayapali
Bhuneswar fi 751015
Orissa, India
P. +91 9938 748 988

PHILIPPINES

#6A, Church Street, Grace Village
Quezon City - The Philippines
P. +632 367 9943
F. +632 367 9984

ANAK PERUSAHAAN

PT ADHI REALTY

Gedung Adhi Graha Lt. 15 Suite 1503
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56
Jakarta 12950 - Indonesia
P. +62 21 526 4545
F. +62 21 526 3535
E. info@adhirealty.co.id

ADHI OMAN, LLC

PO Box 1826, Postal Code 130,
Al Azaiba Block 38, Way 4011,
Building 847, Suite 106, Plot No. 435/19
North Ghubrah, Muscat,
Sultanate of Oman
P. +968 2449 4710
F. +968 2449 5367
E. adhiooman@omantel.net.om

ADHI MULTIPOWER PTE. LTD

20 Mactaggart Road #07-02
Singapore 368079
P. +65 6256 7790
F. +65 6254 5487

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18
Jakarta 12510 - Indonesia
P. +62 21 797 5312
F. +62 21 797 5311

PT ADHICON PERSADA

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18
Jakarta 12510 - Indonesia
P. +62 21 797 4523
+62 21 797 4524
F. +62 21 797 4525
E. adhicon@adhi.co.id

PT DURI INDAH RAYA

Jl. Tuanku Tambusai No. 459 B
Pekan Baru - Riau
P. +62 761 659 99
F. +62 761 650 88
E. matos_duri@yahoo.co.id

Jl. Jendral Sudirman
Komp. Duri Indah Raya Kav. 109
Duri Riau - Indonesia
P. +62 765 597 888
F. +62 765 597 733

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN

Kebenaran isi Laporan Tahunan ini, beserta laporan keuangan dan informasi lain yang terkait, merupakan tanggung jawab penuh Dewan Komisaris dan Direksi dengan membubuhkan tanda tangan masing-masing di bawah ini.

DEWAN KOMISARIS

Ir. Imam Santoso Ernawi, MCM, M.Sc.
Komisaris Utama

Ir. Harry Susetyo Nugroho, MBA
Komisaris

Gatot Trihargo, Ak., MAFIS
Komisaris

Murhadi, S.Sos., M.Si.
Komisaris Independen

Amir Muin, M.Sc.
Komisaris Independen

DIREKSI

Bambang Triwibowo
Direktur Utama

Indradjaja Manopol
Direktur Operasi I

Bambang Pramusinto
Direktur Operasi II

M. Fauzan
Direktur Pengembangan Usaha

Supardi
Direktur Keuangan & SDM

Laporan Tahunan 2009



PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.
Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18,
Jakarta 12510 - Indonesia
T. +62 21 797 5312
F. +62 21 797 5311
E. corsec@adhi.co.id
www.adhi.co.id